



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS) TA. 2023

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR**

NOMOR : 03 / MCB / DPRD / 2023
NOMOR : 000.2.4 / 04156 - 03 / DPKPBD
TANGGAL : 7 Agustus 2023

**TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Nama : H. Saidi Mansyur, S.I.Kom
 Jabatan : Bupati Banjar
 Alamat Kantor : Jalan A. Yani No.1 Martapura
 bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar.

- 2. a. Nama : H. Muhammad Rofiqi, SH
 Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Banjar
 Alamat Kantor : Jalan A. Yani No.2 Martapura
- b. Nama : H. Agus Maulana
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar
 Alamat Kantor : Jalan A. Yani No.2 Martapura
- c. Nama : Akhmad Rizanie Anshari, ST
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar
 Alamat Kantor : Jalan A. Yani No.2 Martapura
- d. Nama : H. Akhmad Zacky Hafizie, SH, MH
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar
 Alamat Kantor : Jalan A. Yani No.2 Martapura

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Banjar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-PPAS APBD) Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA.2023, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Martapura, 7 Agustus 2023

PIMPINAN

BUPATI BANJAR,
selaku,
PIHAK PERTAMA



H. SAIDI MANSYUR, S.I.KOM

KETUA DPRD KABUPATEN BANJAR,
selaku,
PIHAK KEDUA



H. MUHAMMAD ROFIQI, SH
KETUA


H. AGUS MAULANA
WAKIL KETUA


AKHMAD RIZANIE ANSHARI, ST
WAKIL KETUA


H.AKHMAD ZACKY HAFIZIE, SH, MH
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	3
1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.....	6
BAB II PERUBAHAN RENCANA PENERIMAAN DAERAH	8
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	10
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN.....	112
4.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	12
4.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	1826
BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	20
BAB VI PENUTUP	21

- LAMPIRAN I SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
- LAMPIRAN II SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
- LAMPIRAN III PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH
- LAMPIRAN IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Rencana Perubahan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	9
Tabel 4. 1.	Rekapitulasi Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD Tahun 2023.....	14
Tabel 4. 2.	Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	17
Tabel 4. 3.	Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun 2023	18
Tabel 5. 1.	Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS), Kepala Daerah harus menyampaikan KUPA dan P-PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUPA dan P-PPAS dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 akan lebih efektif. P-PPAS disusun dengan tahapan :

- 1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) Menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun;
- 3) Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Skala Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 yang secara bersamaan disusun juga Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dimaksudkan untuk memformulasikan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD. Formulasi dimaksud juga diarahkan untuk menetapkan pagu tertinggi untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Sesuai dengan makna dari keberadaan P-PPAS tersebut di atas, diharapkan terjadi satu rangkaian yang saling terkait antara perencanaan yang telah dirumuskan pada dokumen perencanaan dengan tahap awal penganggaran yang dilaksanakan melalui formulasi kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran serta disusun mengacu pada rumusan yang dimuat dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Banjar Tahun 2023. untuk kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Tujuan

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2023 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

1.3. Dasar Hukum

Ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan materi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023, secara berurutan adalah meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 08);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
26. Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024).

1.4. **Sistematika Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara**

Sistematika Penyusunan P-PPAS sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan yang memuat mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Penyusunan P-PPAS Tahun Anggaran 2023, Dasar Hukum serta Sistematisa Penyusunan.

- BAB II. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berisikan tentang perubahan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah
- BAB III. Prioritas Belanja Daerah, memuat prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam perubahan RKPD tahun 2023 yang harus dibiayai oleh daerah.
- BAB IV. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, memuat uraian perubahan Plafon anggaran berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- BAB V. Rencana Pembiayaan Daerah.
- BAB VI. Penutup.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya menggiatkan berbagai langkah untuk meningkatkan perolehan pendapatan. Upaya peningkatan pendapatan daerah dimaksud, tentu saja tetap memperhatikan kondisi perkembangan ekonomi di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat semakin memperkuat ekonomi daerah bukannya menjadi kontra produktif yang berakibat menambah beban bagi kegiatan perekonomian di masyarakat.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar menggiatkan pada upaya mengoptimalkan peningkatan sumber-sumber dana pembangunan, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah termasuk peningkatan dari Bagi hasil dari BUMD optimalisasi BLUD termasuk juga sumber pendapatan yang berasal dari APBN dan Provinsi, terutama yang berasal dari Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah pusat.

Melalui upaya peningkatan pendapatan daerah ini akan semakin meningkat alokasi dana yang diberikan ke Kabupaten Banjar, selain itu pula diharapkan akan semakin banyak program kegiatan yang turut mendapat alokasi pembiayaan dari pemerintah pusat dan provinsi dilaksanakan di Kabupaten Banjar. Masuknya berbagai program dan kegiatan tersebut tentunya akan semakin memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat dan memperkuat kemampuan daerah, terutama memberikan kekuatan pembiayaan daerah dalam meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman daerah sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2. 1. Rencana Perubahan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.300.000.000	250.300.000.000	0
4.1.01	Pajak Daerah	95.037.929.649	95.037.929.649	0
4.1.02	Retribusi Daerah	8.385.320.000	8.263.062.975	(122.257.025)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.498.156.214	18.241.160.591	(4.256.995.623)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	124.378.594.137	128.757.846.785	4.379.252.648
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.907.783.203.428	1.907.783.203.428	0
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.784.552.925.590	1.784.552.925.590	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.230.277.838	123.230.277.838	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.036.000.000	3.036.000.000	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.036.000.000	3.036.000.000	0
	JUMLAH PENDAPATAN	2.161.119.203.428	2.161.119.203.428	0
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	111.943.617.224	363.419.641.283	251.476.024.059
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	111.943.617.224	363.419.641.283	251.476.024.059
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	111.943.617.224	363.419.641.283	251.476.024.059
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2.273.062.820.652	2.524.538.844.711	251.476.024.059

Secara kumulatif pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2.161.119.203.428 Pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa, diproyeksikan sesuai dengan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal dari Kementerian Keuangan. Untuk Penerimaan Pembiayaan, diperoleh dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp363.419.641.283 Dari penjelasan tabel diatas dapat diketahui jumlah penerimaan daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp2.524.538.844.711.

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perubahan Prioritas pembangunan daerah dalam perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Banjar tahun 2021 – 2026 yang saat ini masih dalam tahap penyusunan. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2023 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 maka telah dirumuskan kegiatan prioritas tahun 2023. Kegiatan prioritas tersebut dilandaskan pada Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dan Isu Strategis Kabupaten Banjar di Kabupaten Banjar. Prioritas Belanja Pemerintah Kabupaten Banjar yang tertuang dalam perubahan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2023 memuat:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;

2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada perubahan RKPD Tahun 2023.

Adapun sinergitas program dimaksud sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana pada lampiran dokumen ini:

Lampiran I. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Lampiran II Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Lampiran III Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

Lampiran IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN

4.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Usuran yang menjadi kewenangan daerah sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a) pendidikan,
 - b) kesehatan,
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang,
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
 - f) sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a) tenaga kerja,
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
 - c) pangan,
 - d) pertanahan,
 - e) lingkungan hidup,

- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
 - g) pemberdayaan masyarakat dan desa,
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
 - i) perhubungan,
 - j) komunikasi dan informatika,
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah,
 - l) penanaman modal,
 - m) kepemudaan dan olahraga,
 - n) statistik,
 - o) persandian,
 - p) kebudayaan,
 - q) perpustakaan, dan
 - r) kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
- a) kelautan dan perikanan,
 - b) pariwisata,
 - c) pertanian,
 - d) kehutanan,
 - e) energi dan sumber daya mineral,
 - f) perdagangan,
 - g) perindustrian, dan
 - h) transmigrasi.
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
- a) Sekretariat Daerah
 - b) Sekretariat DPRD
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
- a) Keuangan
 - b) Kepegawaian
 - c) Pendidikan dan pelatihan
 - d) Penelitian dan pengembangan
 - e) Penghubung
 - f) Pengelolaan perbatasan
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
- Inspektorat Daerah

7. Unsur Kewilayahan
Kecamatan
8. Unsur Pemerintahan Umum
Kesatuan Bangsa dan Politik

Program dan kegiatan Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 yang akan dibahas dan disepakati antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD dan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada

Tabel 4. 1 dan Tabel 4. 2 berikut :

Tabel 4. 1. Rekapitulasi Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD Tahun 2023		Bertambah/(kurang)
		APBD-Murni	Perubahan APBD	
1	Dinas Pendidikan	625.265.522.367	656.636.412.133	31.370.889.766
2	Dinas Kesehatan	249.046.218.656	263.996.783.020	14.950.564.364
3	Puskesmas Martapura 1	4.238.884.000	5.157.131.782	918.247.782
4	Puskesmas Martapura 2	2.041.443.255	2.201.119.189	159.675.934
5	Puskesmas Martapura Timur	1.981.024.800	2.192.779.484	211.754.684
6	Puskesmas Martapura Barat	1.981.603.058	2.100.315.531	118.712.473
7	Puskesmas Astambul	2.664.009.300	2.657.150.773	-6.858.527
8	Puskesmas Mataraman	1.703.082.932	1.816.010.948	112.928.016
9	Puskesmas Simpang Empat 1	1.238.111.500	1.412.118.558	174.007.058
10	Puskesmas Simpang Empat 2	1.314.688.600	1.511.073.028	196.384.428
11	Puskesmas Sambung Makmur	1.281.032.900	1.423.140.249	142.107.349
12	Puskesmas Pengaron	1.918.510.380	2.489.945.536	571.435.156
13	Puskesmas Sungai Pinang	1.487.364.000	1.652.341.958	164.977.958
14	Puskesmas Paramasan	1.072.335.399	1.131.785.156	59.449.757
15	Puskesmas Sungai Tabuk 1	2.272.311.285	2.441.620.994	169.309.709
16	Puskesmas Sungai Tabuk 2	1.301.276.300	1.379.462.400	78.186.100
17	Puskesmas Sungai Tabuk 3	1.209.274.172	1.355.458.407	146.184.235
18	Puskesmas Gambut	2.750.090.705	2.852.450.446	102.359.741
19	Puskesmas Kertak Hanyar	2.307.101.558	2.367.162.399	60.060.841
20	Puskesmas Tatah Makmur	1.166.151.188	1.481.533.087	315.381.899
21	Puskesmas Aluh Aluh	3.078.278.699	2.811.580.948	-266.697.751
22	Puskesmas Beruntung Baru	1.504.654.800	1.652.556.757	147.901.957
23	Puskesmas Karang Intan 1	1.343.158.100	1.519.580.306	176.422.206
24	Puskesmas Karang Intan 2	1.486.917.600	1.793.882.578	306.964.978

25	Puskesmas Aranio	1.946.120.761	2.054.993.317	108.872.556
26	Puskesmas Telaga Bauntung	984.417.750	1.175.540.680	191.122.930
27	Laboratorium Kesehatan Daerah	600.999.898	600.999.898	0
28	Instalasi Farmasi Kabupaten	628.375.000	628.375.000	0
29	Puskesmas Cintapuri Darussalam	1.219.449.542	1.252.124.942	32.675.400
30	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	162.690.113.443	176.923.311.989	14.233.198.546
31	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	256.768.396.342	299.348.181.337	42.579.784.995
32	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	59.354.929.629	76.489.836.879	17.134.907.250
33	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	5.280.997.500	8.366.297.670	3.085.300.170
34	Satuan Polisi Pamong Praja	11.347.035.191	12.823.696.358	1.476.661.167
35	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	6.839.547.086	7.128.990.754	289.443.668
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.821.711.286	9.283.287.081	2.461.575.795
37	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29.258.813.101	30.046.241.460	787.428.359
38	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.598.988.825	7.405.735.976	806.747.151
39	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	10.525.753.772	10.751.422.766	225.668.994
40	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.508.770.911	8.844.374.992	335.604.081
41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	154.072.040.141	166.516.185.913	12.444.145.772
42	Dinas Perhubungan	9.365.444.571	13.516.468.532	4.151.023.961
43	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	14.252.708.465	17.527.631.920	3.274.923.455
44	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	14.115.274.541	14.898.108.482	782.833.941
45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.089.830.171	12.157.861.372	3.068.031.201
46	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	18.034.597.836	24.766.816.389	6.732.218.553
47	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.147.181.007	5.340.406.170	193.225.163
48	Dinas Pertanian	38.329.554.136	39.369.248.339	1.039.694.203
49	Sekretariat Daerah	49.668.885.445	58.018.819.037	8.349.933.592
50	Sekretariat DPRD	68.918.419.745	80.092.041.032	11.173.621.287
51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	12.815.527.482	13.911.197.630	1.095.670.148
52	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	270.194.205.549	278.198.628.633	8.004.423.084
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.466.375.134	16.476.322.863	3.009.947.729
54	Inspektorat Daerah	11.584.860.032	13.292.825.148	1.707.965.116
55	Kecamatan Kertak Hanyar	4.457.757.055	4.778.265.721	320.508.666
56	Kelurahan Manarap Lama	312.921.600	512.921.600	200.000.000
57	Kelurahan Kertak Hanyar I	325.330.050	525.330.050	200.000.000
58	Kelurahan Mandar Sari	311.218.550	511.218.550	200.000.000
59	Kecamatan Astambul	2.474.470.851	2.582.470.851	108.000.000
60	Kecamatan Gambut	5.575.503.758	5.728.307.434	152.803.676
61	Kelurahan Gambut	400.000.000	600.000.000	200.000.000
62	Kelurahan Gambut Barat	350.000.000	550.000.000	200.000.000

63	Kecamatan Karang Intan	2.830.595.747	3.035.554.557	204.958.810
64	Kecamatan Martapura	8.521.448.453	9.105.313.559	583.865.106
65	Kelurahan Sungai Paring	346.547.000	546.547.000	200.000.000
66	Kelurahan Murung Keraton	346.405.000	546.405.000	200.000.000
67	Kelurahan Jawa	350.833.000	550.833.000	200.000.000
68	Kelurahan Keraton	497.345.740	697.345.740	200.000.000
69	Kelurahan Sekumpul	372.766.000	572.766.000	200.000.000
70	Kelurahan Tanjung Rema Darat	346.864.913	546.864.913	200.000.000
71	Kelurahan Pasayangan	346.379.000	546.379.000	200.000.000
72	Kecamatan Aranio	2.137.835.983	2.576.560.063	438.724.080
73	Kecamatan Sungai Tabuk	2.992.493.558	3.512.338.736	519.845.178
74	Kelurahan Sungai Lulut	419.573.100	619.573.100	200.000.000
75	Kecamatan Aluh-Aluh	1.748.004.926	2.387.675.021	639.670.095
76	Kecamatan Mataraman	2.486.583.377	2.616.792.746	130.209.369
77	Kecamatan Simpang Empat	2.057.768.666	2.204.830.422	147.061.756
78	Kecamatan Pengaron	2.456.442.906	2.605.292.906	148.850.000
79	Kecamatan Sungai Pinang	1.906.499.033	2.227.724.650	321.225.617
80	Kecamatan Beruntung Baru	2.304.664.242	2.462.434.091	157.769.849
81	Kecamatan Martapura Barat	2.290.794.271	2.511.824.579	221.030.308
82	Kecamatan Sambung Makmur	2.033.128.299	2.163.298.443	130.170.144
83	Kecamatan Martapura Timur	2.677.243.743	3.044.092.937	366.849.194
84	Kecamatan Paramasan	2.017.107.276	2.654.522.507	637.415.231
85	Kecamatan Tatah Makmur	2.256.493.182	2.436.728.532	180.235.350
86	Kecamatan Telaga Bauntung	2.132.808.378	2.257.098.986	124.290.608
87	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	2.156.547.380	2.285.281.161	128.733.781
88	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	13.440.075.769	44.746.884.630	31.306.808.861
	Jumlah	2.249.762.820.652	2.488.488.844.711	238.726.024.059

Sumber : TAPD Kab. Banjar

Lebih rincian perubahan belanja SKPD dijabarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	625.265.522.367	656.636.412.133	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	625.265.522.367	656.636.412.133	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	625.265.522.367	656.636.412.133	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	481.464.265.554	501.123.205.586	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.838.400	45.838.400	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.250.600	5.250.600	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.000.000	7.000.000	
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.500.000	6.500.000	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.500.000	6.500.000	
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.500.000	6.500.000	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.710.500	12.710.500	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.377.300	1.377.300	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	469.451.334.326	488.458.697.358	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	469.119.040.826	488.082.031.358	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	289.583.000	333.955.500	
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.398.500	8.398.500	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.208.000	24.208.000	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.104.000	10.104.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	113.362.000	113.362.000	
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	63.362.000	63.362.000	
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	50.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.016.727.280	1.203.065.880	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.262.000	37.262.000	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.590.000	14.590.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.765.180	82.765.180	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87.510.100	97.971.700	
1.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	29.000.000	59.790.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	765.600.000	910.687.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.075.000	2.203.086.000	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.075.000	2.203.086.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.806.395.348	7.260.775.348	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	297.993.598	297.993.598	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.508.401.750	6.962.781.750	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	913.533.200	1.838.380.600	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	38.990.000	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.790.000	134.790.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	42.900.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	739.753.200	1.621.700.600	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	143.705.384.013	155.417.333.747	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	78.397.593.063	80.786.335.079	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.281.745.880	1.509.029.880	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	456.860.000	511.189.999	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	875.050.000	920.324.999	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.121.730.000	1.196.433.748	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.283.570.693	2.333.373.192	
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.137.541.950	1.137.541.950	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	15.412.729.964	16.488.779.594	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.575.198.400	1.634.961.399	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	881.473.782	926.748.781	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	942.952.645	988.227.644	
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	770.188.140	770.188.140	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	302.530.000	502.450.000	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.750.000.000	1.952.930.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	819.098.100	812.390.600	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	546.244.300	546.244.300	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	815.759.400	2.303.759.400	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	823.946.800	852.281.800	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	42.691.950.000	41.413.722.896	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.125.540.000	1.125.540.000	
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.783.483.009	2.860.216.757	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24.428.377.679	33.281.245.597	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.962.650.000	8.647.180.000	
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	465.730.000	498.820.000	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	139.302.500	138.877.500	
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	15.000.000	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	397.030.000	479.760.000	
1.01.02.2.02.10	Pembangunan Fasilitas Parkir	572.245.750	558.955.750	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	877.264.240	915.494.240	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	781.695.000	839.805.000	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	352.350.000	375.340.000	
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	10.000.000	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	649.467.500	680.647.500	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	326.025.000	386.025.000	
1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	349.095.939	340.735.939	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	224.492.500	261.142.500	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	83.860.000	97.955.000	
1.01.02.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	176.828.000	199.185.000	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	63.285.000	135.891.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	589.631.550	589.631.550	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	453.008.300	453.008.300	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	578.010.200	970.010.200	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	159.366.200	104.873.200	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	14.957.040.000	16.311.907.918	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	270.000.000	261.000.000	
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	0	10.000.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	14.572.816.591	14.990.212.391	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.425.152.426	1.456.585.426	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.275.394.315	1.366.936.315	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	99.998.750	167.553.750	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	101.290.000	101.615.000	
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	150.000.000	349.999.800	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	251.980.000	270.756.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	297.196.000	297.196.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	325.084.600	325.084.600	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.160.856.500	1.168.621.500	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.367.590.000	9.367.590.000	
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	118.274.000	118.274.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	26.306.596.680	26.359.540.680	
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	573.705.000	727.730.000	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	372.674.780	374.254.780	
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	125.000.000	126.955.000	
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	100.000.000	101.955.000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	4.480.064.900	4.431.793.900	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	11.948.652.000	11.890.352.000	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	8.706.500.000	8.706.500.000	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	34.695.000	34.695.000	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	34.695.000	34.695.000	
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	34.695.000	34.695.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	61.177.800	61.177.800	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	61.177.800	61.177.800	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	35.494.400	35.494.400	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.683.400	25.683.400	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	458.456.999.581	492.032.329.360	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	295.766.886.138	315.109.017.371	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	249.046.218.656	263.996.783.020	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.592.939.085	146.393.120.634	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	490.364.735	276.140.000	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.528.700	186.478.700	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.378.500	15.568.500	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	461.457.535	74.092.800	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	132.623.654.076	131.613.160.703	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	131.869.324.076	130.314.830.703	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	720.060.000	1.198.560.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.270.000	99.770.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.161.500	116.161.500	
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	16.161.500	16.161.500	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	100.000.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	850.421.000	1.308.771.300	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.934.000	10.434.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	162.241.000	186.091.300	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.246.000	42.246.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.000.000	1.070.000.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.485.800	260.469.800	
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.485.800	260.469.800	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.220.460.000	11.220.460.000	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	8.000.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.910.000	274.910.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.937.550.000	10.937.550.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.238.391.974	1.597.957.331	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.921.300	33.921.300	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	292.996.674	462.996.674	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	875.784.000	971.144.000	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.690.000	129.895.357	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100.698.719.871	113.699.657.086	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	66.395.295.545	63.973.584.325	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	19.050.000.000	17.289.548.280	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	888.295.200	1.558.374.400	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	731.905.200	667.981.600	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	118.776.000	120.356.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.004.529.000	7.370.712.500	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	28.818.009.000	29.118.009.000	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	150.000.000	40.950.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	6.307.976.580	5.967.389.580	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.242.003.565	1.647.561.965	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	53.801.000	53.801.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30.000.000	138.900.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.135.344.726	49.352.011.261	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	999.042.300	680.660.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	402.750.000	145.000.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	138.803.100	13.303.100	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	217.663.100	23.731.100	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	146.841.000	146.841.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	577.240.800	612.032.400	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	65.473.500	41.001.500	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	11.700.000	11.700.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	69.411.000	55.191.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	26.112.000	26.112.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	35.180.000	756.180.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	407.589.750	587.589.750	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	42.849.800	42.849.800	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.596.580.076	3.914.291.776	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	64.979.700	114.340.700	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.057.123.900	1.027.123.900	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.124.003.000	551.100.000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	59.949.800	21.999.800	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	326.909.400	204.377.400	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0	36.390.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	56.390.000	20.000.000	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	848.825.200	1.048.825.200	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	805.035.800	1.173.813.535	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.871.664.000	36.809.290.700	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.164.907.500	958.925.600	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	0	174.021.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	18.320.000	18.320.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	137.000.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	111.767.800	111.767.800	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	23.399.800	23.399.800	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	88.368.000	88.368.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.311.800	262.293.700	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	38.112.000	244.093.900	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	18.199.800	18.199.800	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	800.531.200	2.204.731.200	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	24.908.000	339.740.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	24.908.000	339.740.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	775.623.200	1.864.991.200	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	775.623.200	1.864.991.200	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	694.203.500	578.626.500	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	659.396.000	578.626.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	659.396.000	578.626.500	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	259.825.000	1.120.647.600	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.825.000	59.825.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	59.825.000	59.825.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100.000.000	100.000.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	960.822.600	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100.000.000	960.822.600	
1.02.0.00.0.00.01.0001	Puskesmas Martapura 1	4.238.884.000	5.157.131.782	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.238.884.000	5.072.681.782	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	52.952.000	52.952.000	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	12.132.000	12.132.000	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	40.820.000	40.820.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.185.932.000	5.019.729.782	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.175.000	132.675.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	18.000.000	4.900.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	109.200.000	109.200.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	400.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	33.000.000	15.000.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	21.600.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	51.600.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	27.200.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	544.700.000	470.700.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	23.615.000	23.225.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	35.400.000	35.400.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	48.931.000	31.321.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	73.800.000	57.250.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	27.600.000	6.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	369.950.000	216.200.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	15.900.000	15.900.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.835.411.000	3.755.158.782	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	2.400.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	43.200.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	400.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	84.450.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	84.450.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	84.450.000	
1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Martapura 2	2.041.443.255	2.201.119.189	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.030.893.255	2.188.819.189	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	183.419.755	189.238.505	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	62.635.250	64.614.000	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	77.920.000	81.760.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	36.000.000	36.000.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.864.505	6.864.505	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.847.473.500	1.999.580.684	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	66.430.000	57.650.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.600.000	2.600.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.450.000	2.000.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	33.000.000	37.450.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.450.000	13.600.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	1.400.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	16.900.000	38.500.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	16.800.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.000.000	2.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	303.915.000	310.095.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	32.092.000	32.092.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.600.000	8.600.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	54.956.800	52.156.800	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.200.000	26.400.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	216.668.000	138.018.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.094.211.700	1.248.068.884	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	12.150.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.550.000	12.300.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.550.000	12.300.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.550.000	12.300.000	
1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Martapura Timur	1.981.024.800	2.192.779.484	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.957.424.800	2.181.579.484	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	32.170.000	84.360.000	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	7.170.000	7.170.000	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25.000.000	77.190.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.925.254.800	2.097.219.484	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	71.285.000	114.525.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	44.000.000	14.000.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31.600.000	34.150.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	10.800.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	42.900.000	12.900.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	6.300.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	8.000.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	15.000.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	1.200.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	311.345.000	322.405.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.140.000	9.140.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.450.000	13.450.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	19.067.400	25.067.400	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	87.850.000	5.400.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	4.100.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	118.379.600	187.529.600	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	1.950.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.144.837.800	1.305.802.484	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	2.200.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	3.300.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	23.600.000	11.200.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.600.000	11.200.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	23.600.000	11.200.000	
1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Martapura Barat	1.981.603.058	2.100.315.531	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.981.603.058	2.067.570.531	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	29.315.000	29.315.000	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	22.373.000	22.373.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.942.000	6.942.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.952.288.058	2.038.255.531	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	21.440.000	115.950.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	16.380.000	5.390.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	56.000.000	56.000.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.710.000	3.710.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	15.120.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	9.800.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	19.600.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.520.000	2.520.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	351.705.000	273.575.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.250.000	280.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.940.000	9.940.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	51.255.000	33.120.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.140.000	9.800.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	23.520.000	8.400.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	110.170.000	164.420.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3.000.000	3.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.180.238.058	1.298.950.531	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	980.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	7.700.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	32.745.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	32.745.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	32.745.000	
1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Astambul	2.664.009.300	2.657.150.773	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.664.009.300	2.634.540.773	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.120.000	9.120.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.120.000	9.120.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.654.889.300	2.625.420.773	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	81.685.000	174.085.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	118.800.000	20.160.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	76.790.000	26.390.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	53.060.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	72.160.000	16.720.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	32.130.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	9.240.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	4.200.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	344.595.000	354.195.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	6.440.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.180.000	20.180.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	55.815.000	26.765.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60.350.000	5.320.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	1.540.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	184.220.000	234.480.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	5.400.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.632.734.300	1.625.875.773	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	3.080.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	6.160.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	22.610.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	22.610.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	22.610.000	
1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Mataraman	1.703.082.932	1.816.010.948	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.696.132.932	1.810.010.948	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	71.134.000	81.134.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	26.780.000	26.780.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	37.700.000	47.700.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.654.000	6.654.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.624.998.932	1.728.876.948	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.320.000	167.440.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	94.780.000	700.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.230.000	41.230.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	13.160.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.200.000	4.200.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.280.000	2.800.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	10.920.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	249.315.000	261.025.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.660.000	6.660.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	13.160.000	15.460.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	69.980.000	1.760.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	4.480.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	153.000.000	193.060.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	750.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	890.613.932	993.541.948	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	420.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	10.920.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	350.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.950.000	6.000.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.950.000	6.000.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.950.000	6.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Simpang Empat 1	1.238.111.500	1.412.118.558	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.238.111.500	1.400.898.558	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41.354.000	78.526.687	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.930.000	28.166.750	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	5.424.000	5.424.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.000.000	44.935.937	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.196.757.500	1.322.371.871	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	54.920.000	63.050.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	79.090.000	77.290.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.200.000	17.760.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	4.800.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	36.480.000	44.160.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	6.400.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	6.720.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	7.200.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	222.400.000	242.490.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.852.000	4.320.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.310.000	10.310.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	21.331.000	14.863.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	47.870.000	5.380.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	11.200.000	4.800.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88.820.000	83.760.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	3.150.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	586.204.500	723.038.871	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	960.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	1.920.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	11.220.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	11.220.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	11.220.000	
1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Simpang Empat 2	1.314.688.600	1.511.073.028	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.280.548.600	1.498.503.028	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	51.638.000	51.638.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	47.120.000	47.120.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.518.000	4.518.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.228.910.600	1.446.865.028	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.280.000	87.160.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	62.600.000	6.300.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.080.000	8.160.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.280.000	640.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	17.280.000	19.760.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.840.000	3.840.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.880.000	3.840.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	1.920.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	166.230.000	189.810.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.075.200	3.840.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.500.000	7.500.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	29.320.000	55.535.200	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.440.000	18.880.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	2.080.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72.730.000	70.640.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	1.800.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	759.975.400	957.079.828	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	1.440.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	3.200.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	3.440.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	34.140.000	12.570.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.140.000	12.570.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	34.140.000	12.570.000	
1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Sambung Makmur	1.281.032.900	1.423.140.249	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.269.402.900	1.414.390.249	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.112.000	6.112.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.112.000	6.112.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.263.290.900	1.408.278.249	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.960.000	75.200.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	16.540.000	42.660.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	56.240.000	49.520.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	14.400.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	20.160.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	9.600.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	13.440.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	7.040.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	290.555.000	260.666.200	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	29.102.500	29.102.500	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	53.153.600	29.502.400	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	33.920.000	5.100.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	2.880.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	144.520.000	94.600.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	7.500.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	588.959.800	731.067.149	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	480.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	4.800.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	10.560.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.630.000	8.750.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.630.000	8.750.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.630.000	8.750.000	
1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Pengaron	1.918.510.380	2.489.945.536	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.314.927.980	2.477.640.536	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27.544.000	27.544.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19.240.000	19.240.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.304.000	8.304.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.287.383.980	2.450.096.536	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	92.150.000	167.120.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	114.220.000	48.960.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31.360.000	24.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	11.760.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.060.000	12.060.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.840.000	3.840.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.720.000	15.520.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	6.400.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	14.400.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	308.358.000	382.292.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	16.740.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.920.000	16.320.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	6.886.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32.400.000	6.140.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	1.920.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	226.285.000	175.900.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	3.600.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	412.630.980	1.529.678.536	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	1.440.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	3.200.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	1.920.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	57.970.000	12.305.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	12.305.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	12.305.000	
1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Sungai Pinang	1.487.364.000	1.652.341.958	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.487.364.000	1.635.006.958	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	52.777.800	52.777.800	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	45.157.800	45.157.800	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.620.000	7.620.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.434.586.200	1.582.229.158	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	92.250.000	94.550.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	40.000.000	112.800.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.400.000	15.600.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	15.600.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	55.710.000	12.510.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	10.400.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	13.000.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	9.900.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	339.245.000	332.009.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	7.199.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.910.000	15.910.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	26.087.000	9.624.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	7.200.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	12.300.000	1.900.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	215.835.000	151.300.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.700.000	2.700.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	585.849.200	750.827.158	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.400.000	2.400.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	5.000.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	11.800.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	17.335.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	17.335.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	17.335.000	
1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Paramasan	1.072.335.399	1.131.785.156	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.059.735.399	1.126.085.156	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.140.000	20.140.000	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	6.250.000	6.250.000	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.890.000	13.890.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.039.595.399	1.105.945.156	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51.600.000	76.910.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	46.800.000	12.600.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	32.700.000	32.700.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	3.600.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	21.600.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	4.800.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	25.200.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	1.500.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	253.350.000	287.080.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.980.000	10.180.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22.800.000	14.700.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	51.840.000	12.600.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.950.000	12.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	154.500.000	118.050.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	1.200.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	394.075.399	455.325.156	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	900.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	15.000.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.600.000	5.700.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.600.000	5.700.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.600.000	5.700.000	
1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Sungai Tabuk 1	2.272.311.285	2.441.620.994	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.265.511.285	2.434.820.994	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	26.014.000	26.014.000	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	18.610.000	18.610.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.404.000	7.404.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.239.497.285	2.408.806.994	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.160.000	37.520.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	44.640.000	112.080.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.960.000	69.840.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	3.840.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	10.920.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.720.000	14.080.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	4.320.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	6.160.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	2.880.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	283.534.000	319.614.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18.660.000	960.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.200.000	13.200.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	49.550.000	56.330.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.850.000	10.740.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	4.640.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	277.740.000	141.180.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	5.850.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.419.743.285	1.589.052.994	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	1.200.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	4.400.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.800.000	6.800.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.800.000	6.800.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.800.000	6.800.000	
1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Sungai Tabuk 2	1.301.276.300	1.379.462.400	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.292.526.300	1.370.712.400	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.620.000	22.730.000	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.330.000	8.330.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.650.000	8.760.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.640.000	5.640.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.274.906.300	1.347.982.400	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.200.000	98.820.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	11.520.000	450.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	60.080.000	60.080.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	5.760.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	26.860.000	26.860.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	17.280.000	17.280.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	13.440.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	271.860.000	236.730.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	960.000	960.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	29.102.500	29.102.500	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	27.314.000	27.314.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	4.080.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	2.880.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	143.960.000	104.320.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	7.500.000	7.500.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	615.379.800	688.605.900	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	480.000	480.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	4.800.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	18.520.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.750.000	8.750.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.750.000	8.750.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.750.000	8.750.000	
1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Sungai Tabuk 3	1.209.274.172	1.355.458.407	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.209.274.172	1.344.698.407	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	16.635.000	39.652.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.169.000	34.186.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.466.000	5.466.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.192.639.172	1.305.046.407	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	54.560.000	69.900.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	18.560.000	36.350.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.000.000	20.800.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	14.560.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.520.000	11.520.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.360.000	15.360.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	1.560.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	11.520.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	253.950.000	251.280.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.270.000	3.270.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22.560.000	22.560.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	21.060.000	13.740.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.240.000	11.520.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	3.840.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	149.260.000	100.380.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	1.200.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	584.199.172	707.366.407	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	640.000	640.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	7.680.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	10.760.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	10.760.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	10.760.000	
1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Gambut	2.750.090.705	2.852.450.446	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.722.275.705	2.812.035.446	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.861.505	8.861.505	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.861.505	8.861.505	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.713.414.200	2.803.173.941	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	67.670.000	75.630.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	23.150.000	12.390.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13.440.000	2.800.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	35.280.000	35.280.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.960.000	29.400.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	12.600.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	433.479.500	433.479.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	2.100.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.060.000	25.060.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	39.030.000	24.330.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	85.970.000	49.190.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	9.030.000	9.030.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	188.090.000	211.610.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	1.500.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.753.734.700	1.856.094.441	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	1.680.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	21.000.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	27.815.000	40.415.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.815.000	40.415.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	27.815.000	40.415.000	
1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Kertak Hanyar	2.307.101.558	2.367.162.399	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.286.731.558	2.346.792.399	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	53.399.060	59.199.060	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	45.999.060	51.799.060	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.400.000	7.400.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.233.332.498	2.287.593.339	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51.500.000	49.750.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	85.575.000	83.825.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	89.040.000	17.220.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	53.760.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	32.760.000	32.760.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	1.400.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	7.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	310.993.828	312.813.828	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.820.000	1.820.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.600.000	19.600.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	14.350.000	38.640.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.330.000	15.330.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	23.150.000	23.150.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	169.180.000	125.780.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.408.483.670	1.462.744.511	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	8.960.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	33.040.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	20.370.000	20.370.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.370.000	20.370.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20.370.000	20.370.000	
1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Tatah Makmur	1.166.151.188	1.481.533.087	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.164.471.188	1.465.048.087	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.764.000	4.764.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.764.000	4.764.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.159.707.188	1.460.284.087	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	133.040.000	41.930.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	154.060.000	59.180.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.580.000	18.970.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.820.000	1.820.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.180.000	9.240.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	5.740.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.100.000	191.450.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.390.000	13.390.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.350.000	7.350.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	28.458.500	13.653.500	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.920.000	2.100.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	2.940.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	98.840.000	137.620.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	2.950.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	631.388.688	946.770.587	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	15.820.000	1.820.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	2.100.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	1.260.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.680.000	16.485.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.680.000	16.485.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.680.000	16.485.000	
1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Aluh Aluh	3.078.278.699	2.811.580.948	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.078.278.699	2.779.120.948	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	196.572.265	160.057.865	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	87.585.000	61.553.000	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	98.693.196	88.210.796	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.294.069	10.294.069	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.881.706.434	2.619.063.083	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	87.550.000	195.150.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	54.100.000	9.800.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.700.000	43.700.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	26.400.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	4.800.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	67.200.000	53.100.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	464.527.472	390.327.472	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	32.980.000	32.980.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	40.514.900	14.914.900	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.000.000	11.900.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	3.800.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	253.760.000	223.500.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	1.500.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.825.374.062	1.595.190.711	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	1.200.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	10.800.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	32.460.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	32.460.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	32.460.000	
1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Beruntung Baru	1.504.654.800	1.652.556.757	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.482.574.800	1.639.056.757	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	76.369.000	108.386.000	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	70.957.000	102.974.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.412.000	5.412.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.406.205.800	1.530.670.757	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	66.470.000	86.160.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14.620.000	27.580.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.080.000	14.080.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	31.680.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	36.480.000	13.440.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	11.840.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	4.800.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	2.880.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	219.330.000	227.640.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16.930.000	16.930.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.770.000	26.720.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.400.000	2.160.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	11.840.000	3.840.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122.330.000	112.800.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	3.120.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	825.115.800	941.000.757	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	800.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	3.200.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	22.080.000	13.500.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.080.000	13.500.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	22.080.000	13.500.000	
1.02.0.00.0.00.01.0021	Puskesmas Karang Intan 1	1.343.158.100	1.519.580.306	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.343.158.100	1.510.885.306	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.190.000	13.190.000	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.840.000	7.840.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	5.350.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.329.968.100	1.497.695.306	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	50.885.000	51.425.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	74.950.000	36.980.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51.200.000	48.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	6.560.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	27.885.000	7.085.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	6.960.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	5.200.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	8.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	212.135.000	276.525.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	14.145.000	12.780.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.015.000	6.600.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4.125.000	5.490.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.030.000	2.560.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	8.400.000	1.440.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	85.360.000	110.400.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	2.550.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	731.598.100	908.020.306	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	1.040.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	80.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	8.695.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	8.695.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	8.695.000	
1.02.0.00.0.00.01.0022	Puskesmas Karang Intan 2	1.486.917.600	1.793.882.578	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.486.917.600	1.769.602.578	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	31.688.000	31.688.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25.790.000	25.790.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.898.000	5.898.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.455.229.600	1.737.914.578	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.010.000	81.760.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.360.000	1.500.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.400.000	22.800.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.920.000	6.560.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15.770.000	15.770.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	4.800.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	41.600.000	14.400.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	8.320.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	2.880.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	221.620.000	230.290.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.512.000	1.440.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.220.000	17.220.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	25.070.000	28.862.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	99.920.000	5.840.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	2.080.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	94.360.000	167.520.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	7.500.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	794.527.600	1.101.492.578	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	400.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	14.400.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	2.080.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	24.280.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	24.280.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	24.280.000	
1.02.0.00.0.00.01.0023	Puskesmas Aranio	1.946.120.761	2.054.993.317	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.931.695.761	2.040.568.317	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.033.700	26.863.921	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	16.670.000	15.500.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	11.363.921	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.903.662.061	2.013.704.396	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	89.400.000	87.100.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	182.340.121	50.800.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	87.300.000	87.300.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	53.000.000	2.400.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	56.880.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	26.100.000	16.800.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24.000.000	21.600.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.200.000	7.200.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	456.360.300	632.400.200	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24.900.000	8.000.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	35.135.000	35.135.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	56.880.000	28.900.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	83.300.000	11.400.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	9.300.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	79.600.000	150.900.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	6.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	670.146.640	780.189.196	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	1.000.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	2.400.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	18.000.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.425.000	14.425.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	14.425.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	14.425.000	
1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Telaga Bauntung	984.417.750	1.175.540.680	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	976.617.750	1.162.040.680	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	178.778.750	215.514.750	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	121.219.500	157.955.500	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	53.217.250	53.217.250	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.342.000	4.342.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	797.839.000	946.525.930	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	39.000.000	50.850.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	33.600.000	55.300.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.600.000	6.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	21.600.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	2.750.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	4.000.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	12.400.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	3.200.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	166.790.000	192.990.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	8.050.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.600.000	3.600.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	62.628.000	40.028.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	59.450.000	4.800.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	1.100.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	96.650.000	69.400.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	1.050.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	300.921.000	455.307.930	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	2.000.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	2.200.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	9.900.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.800.000	13.500.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.800.000	13.500.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.800.000	13.500.000	
1.02.0.00.0.00.01.0025	Laboratorium Kesehatan Daerah	600.999.898	600.999.898	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	600.999.898	600.999.898	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600.999.898	600.999.898	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	600.999.898	600.999.898	
1.02.0.00.0.00.01.0026	Instalasi Farmasi Kabupaten	628.375.000	628.375.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	628.375.000	628.375.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	628.375.000	628.375.000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	628.375.000	628.375.000	
1.02.0.00.0.00.01.0027	Puskesmas Cintapuri Darussalam	1.219.449.542	1.252.124.942	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.211.209.542	1.214.484.942	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41.724.000	41.724.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	36.030.000	36.030.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.694.000	5.694.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.169.485.542	1.172.760.942	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	52.160.000	56.040.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	20.160.000	3.260.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.040.000	13.040.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	8.320.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	63.360.000	38.160.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.840.000	3.840.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	9.040.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	275.295.000	292.805.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.865.000	9.865.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	33.070.000	31.250.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.890.000	3.360.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	1.760.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	125.000.000	126.430.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke	0	3.400.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Laboratorium Rujukan/Nasional			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	538.315.542	570.990.942	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000	1.200.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.240.000	37.640.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.240.000	37.640.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.240.000	37.640.000	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	162.690.113.443	176.923.311.989	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	162.690.113.443	176.923.311.989	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	149.270.642.719	164.423.031.694	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.886.000	60.886.000	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.886.000	27.886.000	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000	9.000.000	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000	24.000.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.028.488.969	58.776.562.694	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57.865.950.969	58.599.674.694	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	153.798.000	168.148.000	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.740.000	8.740.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	932.624.000	1.072.624.000	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.000.000	12.000.000	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	920.624.000	1.060.624.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.530.243.750	2.158.359.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.530.243.750	2.158.359.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.718.400.000	3.910.900.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.718.400.000	3.910.900.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	85.000.000.000	98.443.700.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	85.000.000.000	98.443.700.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12.419.470.724	11.500.280.295	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.718.493.424	11.060.832.995	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	400.000.000	400.000.000	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	37.550.000	62.550.000	
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	4.320.705.000	3.034.136.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.960.238.424	7.564.146.995	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	524.977.500	263.447.500	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	40.859.500	40.859.500	
1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	91.574.000	91.574.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	392.544.000	131.014.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.999.800	175.999.800	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	175.999.800	175.999.800	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	256.035.115.042	298.371.252.037	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	256.035.115.042	298.371.252.037	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	256.035.115.042	298.371.252.037	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.723.391.369	18.882.992.614	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.287.400	26.287.400	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.719.100	6.719.100	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.784.800	8.784.800	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.783.500	10.783.500	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.145.216.258	8.338.947.893	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.960.279.758	8.172.251.393	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	168.420.000	150.180.000	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.538.500	9.538.500	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.280.000	3.280.000	
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.698.000	3.698.000	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	40.000.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.059.827.046	5.742.522.800	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.966.700	21.275.500	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	920.448.750	4.149.708.000	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.470.500	165.270.500	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.564.800	31.564.800	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	25.000.000	
1.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	5.000.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	903.376.296	1.344.704.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.332.439.000	3.326.875.200	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.675.000	3.675.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.614.000	237.900.200	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.128.150.000	3.085.300.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.119.621.665	1.408.359.321	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.997.424	34.997.424	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	620.951.209	732.827.656	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	74.220.000	74.220.000	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.296.482	120.927.763	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	275.156.550	445.386.478	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.949.268.163	11.890.018.163	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.493.678.163	6.218.548.163	
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	209.100.000	211.000.000	
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	258.794.663	259.594.663	
1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	210.240.000	211.040.000	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.256.061.000	2.258.011.000	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.247.026.500	2.116.436.500	
1.03.02.2.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	312.456.000	1.162.466.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.455.590.000	5.671.470.000	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	205.400.000	205.400.000	
1.03.02.2.02.03	Pembangunan Bendung Irigasi	837.790.000	1.496.880.000	
1.03.02.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	3.412.400.000	3.969.190.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	21.987.236.801	24.463.431.581	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	21.987.236.801	24.463.431.581	
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	14.429.764.195	16.905.958.975	
1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.012.000.000	2.012.000.000	
1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	443.867.711	443.867.711	
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.101.604.895	5.101.604.895	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.510.013.981	12.828.317.381	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.510.013.981	12.828.317.381	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	11.196.513.981	11.507.717.381	
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	705.550.000	712.650.000	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	251.500.000	251.500.000	
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	356.450.000	356.450.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	11.340.977.200	12.936.944.564	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.340.977.200	12.936.944.564	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	8.528.089.100	9.101.176.464	
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	0	791.750.000	
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1.228.930.000	1.460.060.000	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.583.958.100	1.583.958.100	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	14.603.719.216	14.431.877.221	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	14.603.719.216	14.431.877.221	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.205.097.436	6.361.826.838	
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	9.398.621.780	8.070.050.383	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	764.707.266	956.707.266	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	764.707.266	956.707.266	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	724.707.266	916.707.266	
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	23.833.414.768	23.289.078.188	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	23.833.414.768	23.289.078.188	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	492.650.000	904.450.000	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	6.072.085.488	8.152.305.240	
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	17.268.679.280	14.232.322.948	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	145.550.268.878	177.848.177.759	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	145.550.268.878	177.848.177.759	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.929.640.000	9.925.375.000	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	922.800.000	922.800.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	2.984.813.959	5.426.915.920	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	36.881.006.600	46.796.386.600	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	39.297.274.668	52.318.935.828	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	3.672.915.700	7.836.965.700	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	9.370.228.643	9.125.521.403	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	19.734.190.000	19.734.190.000	
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	2.440.300.000	858.050.000	
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	6.718.200.000	7.472.692.500	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.907.192.290	1.687.192.290	
1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	9.367.007.018	9.367.007.018	
1.03.10.2.01.27	Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung	8.324.700.000	6.376.145.500	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	269.696.000	341.286.000	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	168.625.000	168.625.000	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	103.989.000	103.989.000	
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	64.636.000	64.636.000	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.224.100	9.224.100	
1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	3.580.000	3.580.000	
1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	5.644.100	5.644.100	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	91.846.900	163.436.900	
1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	86.284.600	157.874.600	
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	5.562.300	5.562.300	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	502.421.400	502.421.300	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	406.449.800	406.449.800	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	264.800.000	264.800.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	106.649.800	106.649.800	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	35.000.000	35.000.000	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	95.971.600	95.971.500	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	58.699.100	58.699.100	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	37.272.500	37.272.400	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.113.805.051	33.286.462.087	
1.04.2.11.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	23.113.805.051	33.286.462.087	
1.04.2.11.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	23.113.805.051	33.286.462.087	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	488.974.160	509.524.160	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	67.447.200	67.447.200	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	67.447.200	67.447.200	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	326.996.700	326.996.700	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	326.996.700	326.996.700	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	94.530.260	115.080.260	
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	33.912.800	33.912.800	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	60.617.460	81.167.460	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.644.572.292	3.971.054.622	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	377.443.000	377.443.000	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	186.833.000	186.833.000	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	160.610.000	160.610.000	
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	30.000.000	30.000.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.267.129.292	3.593.611.622	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Peremajaan Permukiman Kumuh	336.880.000	106.880.000	
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	6.650.000	6.650.000	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	1.923.599.292	3.480.081.622	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	557.854.500	510.253.050	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	557.854.500	510.253.050	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	456.054.500	456.054.500	
1.04.04.2.01.03	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	101.800.000	54.198.550	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	19.422.404.099	28.295.630.255	
1.04.05.2.01	Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan	19.422.404.099	28.295.630.255	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.501.673.999	8.338.624.355	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12.131.600	12.131.600	
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	55.000.000	55.000.000	
1.04.05.2.01.05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	15.853.598.500	19.889.874.300	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	25.008.293.563	29.235.974.193	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	11.347.035.191	12.823.696.358	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	11.347.035.191	12.823.696.358	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.590.509.791	11.524.430.358	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.293.300	24.293.300	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.659.800	6.659.800	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.634.100	4.634.100	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.521.700	3.521.700	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.477.700	9.477.700	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.487.056.899	5.536.132.066	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.391.518.299	5.440.593.466	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90.480.000	90.480.000	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.058.600	5.058.600	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	672.269.000	888.307.400	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.186.000	3.186.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.190.000	75.848.400	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.984.800	35.984.800	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.903.200	20.903.200	
1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.250.000	2.250.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	555.755.000	750.135.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.721.238.428	3.699.158.428	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.038.428	127.038.428	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.594.200.000	3.572.120.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.652.164	1.376.539.164	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	525.296.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	419.800.000	524.181.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.190.000	47.190.000	
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	179.672.164	279.872.164	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	756.525.400	1.299.266.000	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	632.899.100	1.175.643.700	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	392.768.500	626.448.500	
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	5.562.000	5.562.000	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	194.467.700	413.047.700	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	33.150.000	123.634.600	
1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	450.900	450.900	
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	6.500.000	6.500.000	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	123.626.300	123.622.300	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	25.105.900	60.861.900	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	546.900	5.946.900	
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	97.973.500	56.813.500	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	6.839.547.086	7.128.990.754	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	6.839.547.086	7.128.990.754	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.280.661.586	6.570.105.254	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.379.000	17.029.000	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.970.200	11.870.200	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.408.800	5.158.800	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.494.005.821	2.679.963.239	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.439.766.021	2.602.743.439	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.239.800	77.219.800	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	338.610.000	338.610.000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	264.610.000	264.610.000	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74.000.000	74.000.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	405.781.742	398.781.742	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.778.500	13.778.500	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.680.442	39.680.442	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.347.800	14.347.800	
1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.500.000	4.500.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.475.000	326.475.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	327.037.773	330.832.773	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	117.526.000	117.526.000	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209.511.773	213.306.773	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.138.952.750	2.181.994.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.352.750	140.694.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.033.600.000	2.041.300.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	549.894.500	622.894.500	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.370.000	73.370.000	
1.05.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	270.912.500	270.912.500	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.740.000	14.740.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.872.000	263.872.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	558.885.500	558.885.500	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	174.166.500	174.166.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.094.500	15.094.500	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	49.072.000	49.072.000	
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	85.000.000	85.000.000	
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	25.000.000	25.000.000	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	71.750.000	71.750.000	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	34.625.000	34.625.000	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	37.125.000	37.125.000	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	301.900.000	301.900.000	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	242.900.000	242.900.000	
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	59.000.000	59.000.000	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	11.069.000	11.069.000	
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	11.069.000	11.069.000	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.821.711.286	9.283.287.081	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.821.711.286	9.283.287.081	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.178.831.185	5.856.477.180	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.786.600	16.147.500	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.429.000	2.429.000	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.557.000	2.557.000	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.671.000	1.671.000	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.448.000	3.448.000	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.139.000	1.139.000	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.542.600	4.903.500	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.778.727.543	3.196.338.538	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.696.256.543	3.107.067.538	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71.400.000	78.200.000	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.071.000	3.071.000	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.000.000	8.000.000	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.403.000	5.403.000	
1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.053.000	2.053.000	
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.510.000	1.510.000	
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.840.000	1.840.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	50.000.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.606.242	451.904.342	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.013.000	67.079.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.101.242	44.101.242	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.992.000	14.992.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.500.000	3.250.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.000.000	322.482.100	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.639.000	34.875.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	23.639.000	34.875.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.488.234.800	1.459.644.800	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.734.800	98.544.800	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.378.500.000	1.361.100.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.434.000	642.164.000	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	38.990.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	406.445.000	456.695.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	65.000.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.999.000	81.479.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.642.880.101	3.426.809.901	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	135.902.500	135.902.500	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	135.902.500	135.902.500	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	403.327.900	623.882.700	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	78.679.500	78.679.500	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	94.956.400	240.215.200	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	229.692.000	229.692.000	
1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	75.296.000	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	985.480.101	2.562.605.101	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	485.560.100	2.062.685.100	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	499.920.001	499.920.001	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	118.169.600	104.419.600	
1.05.03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	67.177.600	67.177.600	
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	50.992.000	37.242.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15.141.101.701	15.765.290.560	
1.06.2.08.2.14.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.141.101.701	15.765.290.560	
1.06.2.08.2.14.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.141.101.701	15.765.290.560	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.568.432.501	11.204.593.860	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.000.000	22.000.000	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.500.000	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	7.000.000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.682.112.967	5.774.598.826	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.551.311.667	5.643.797.526	
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	124.140.000	124.140.000	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.661.300	1.661.300	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	5.000.000	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	30.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	30.000.000	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.632.967.015	2.014.852.515	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.965.000	5.965.000	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	271.898.000	503.183.500	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.552.015	69.552.015	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.752.000	3.752.000	
1.06.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000	12.000.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.269.800.000	1.420.400.000	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217.560.000	217.560.000	
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	217.560.000	217.560.000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.618.406.600	2.676.606.600	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.239.600	1.239.600	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.207.000	140.207.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.476.960.000	2.535.160.000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.385.919	468.975.919	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	38.990.000	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.120.000	183.120.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.460.000	18.460.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.865.919	223.455.919	
1.06.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	4.950.000	4.950.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	938.310.900	948.310.900	
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	18.320.000	18.320.000	
1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	18.320.000	18.320.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	919.990.900	929.990.900	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	650.962.300	650.962.300	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	198.000.000	198.000.000	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	71.028.600	81.028.600	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	586.107.300	563.639.300	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	321.746.400	321.746.400	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	158.990.000	158.990.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	20.012.000	20.012.000	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	35.895.000	35.895.000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	19.161.400	19.161.400	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	12.516.000	12.516.000	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	45.172.000	45.172.000	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	30.000.000	30.000.000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	264.360.900	241.892.900	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	83.612.500	61.144.500	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	18.000.000	18.000.000	
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	5.078.700	5.078.700	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	139.589.700	139.589.700	
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	18.080.000	18.080.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.709.851.000	2.713.351.000	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.290.275.000	1.290.275.000	
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	1.290.275.000	1.290.275.000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.419.576.000	1.423.076.000	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	189.780.000	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	246.500.000	210.220.000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	737.193.000	737.193.000	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	285.883.000	285.883.000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	338.400.000	335.395.500	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	300.000.000	296.995.500	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	300.000.000	296.995.500	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	38.400.000	38.400.000	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	19.040.000	19.040.000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	19.360.000	19.360.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.548.988.825	7.260.399.976	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.548.988.825	7.260.399.976	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.548.988.825	7.260.399.976	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.067.262.625	5.864.983.776	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.834.500	47.337.800	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.359.200	8.862.500	
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.913.800	3.913.800	
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.913.800	3.913.800	
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.028.000	3.528.000	
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.028.000	3.528.000	
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.696.800	12.696.800	
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.894.900	10.894.900	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.503.028.300	3.557.171.651	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.389.168.400	3.443.311.751	
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85.260.000	85.260.000	
2.07.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.899.800	18.899.800	
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.700.100	9.700.100	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	
2.07.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	50.000.000	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	464.650.975	520.071.475	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.940.000	10.825.500	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.358.750	134.963.750	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.956.125	30.886.125	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.196.100	25.196.100	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	307.000.000	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	486.606.000	
2.07.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	486.606.000	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	759.534.850	722.034.850	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.999.850	59.999.850	
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.700.000	30.700.000	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	663.835.000	631.335.000	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.214.000	481.762.000	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	38.990.000	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.140.000	103.140.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.084.000	339.632.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	35.820.000	35.820.000	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	35.820.000	35.820.000	
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	35.820.000	35.820.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.126.520.500	1.044.110.500	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.100.000.000	1.017.590.000	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.100.000.000	1.017.590.000	
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	26.520.500	26.520.500	
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	26.520.500	26.520.500	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	165.788.800	161.888.800	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	37.240.800	37.240.800	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	11.693.000	11.693.000	
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	25.547.800	25.547.800	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	102.540.000	98.640.000	
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	5.890.000	5.890.000	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	12.719.000	8.819.000	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	83.931.000	83.931.000	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	26.008.000	26.008.000	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	26.008.000	26.008.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	153.596.900	153.596.900	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.597.900	49.597.900	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	42.597.900	42.597.900	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	7.000.000	7.000.000	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	103.999.000	103.999.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.000.000	66.000.000	
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	37.999.000	37.999.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.268.950.700	2.268.950.700	
1.06.2.08.2.14.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.268.950.700	2.268.950.700	
1.06.2.08.2.14.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.268.950.700	2.268.950.700	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.912.852.800	1.912.852.800	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	25.260.800	25.260.800	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	25.260.800	25.260.800	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.963.200	10.963.200	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10.963.200	10.963.200	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.876.628.800	1.876.628.800	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.876.628.800	1.876.628.800	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	32.489.000	32.489.000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15.689.000	15.689.000	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15.689.000	15.689.000	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	16.800.000	16.800.000	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	16.800.000	16.800.000	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	140.101.100	140.101.100	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.418.100	69.418.100	
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	69.418.100	69.418.100	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.683.000	70.683.000	
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.683.000	70.683.000	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	11.999.800	11.999.800	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.999.800	11.999.800	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	11.999.800	11.999.800	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	141.014.000	141.014.000	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	141.014.000	141.014.000	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	12.800.000	12.800.000	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	128.214.000	128.214.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kabupaten/Kota			
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	30.494.000	30.494.000	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12.644.000	12.644.000	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12.644.000	12.644.000	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.850.000	17.850.000	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	17.850.000	17.850.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	9.678.490.472	9.928.071.756	
2.09.3.25.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9.678.490.472	9.928.071.756	
2.09.3.25.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9.678.490.472	9.928.071.756	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.451.086.032	8.826.508.307	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.536.300	39.397.500	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.536.300	39.397.500	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.968.385.263	6.068.219.337	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.850.293.963	5.945.128.237	
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.420.000	108.420.000	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.703.300	4.703.300	
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.968.000	9.967.800	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	50.000.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.486.485	599.243.470	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.222.485	25.222.485	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.514.000	30.514.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.750.000	543.506.985	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.418.937.984	1.381.088.000	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.190.000	6.190.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.648.984	128.649.000	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.294.099.000	1.246.249.000	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.740.000	688.560.000	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	38.990.000	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	414.610.000	410.970.000	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.660.000	32.660.000	
2.09.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.760.000	9.760.000	
2.09.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.720.000	196.180.000	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	254.875.800	250.182.800	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	254.875.800	250.182.800	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	30.209.000	27.010.000	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	224.666.800	223.172.800	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	814.592.300	718.592.300	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	266.255.800	170.255.800	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12.110.000	8.518.000	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	59.834.000	49.634.000	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	141.547.000	95.089.000	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	52.764.800	17.014.800	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	314.251.000	314.251.000	
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	13.951.000	13.951.000	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	300.300.000	300.300.000	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	234.085.500	234.085.500	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	177.119.500	177.119.500	
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	56.966.000	56.966.000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	75.352.400	52.284.400	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	27.659.500	11.579.500	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	27.659.500	11.579.500	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	47.692.900	40.704.900	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.692.900	40.704.900	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	82.583.940	80.503.949	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	82.583.940	80.503.949	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	34.799.940	34.799.940	
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.850.000	20.224.900	
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12.999.500	12.009.500	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	13.934.500	13.469.609	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	733.281.300	976.929.300	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	733.281.300	976.929.300	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	733.281.300	976.929.300	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	135.371.100	135.371.100	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	135.371.100	135.371.100	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.513.100	13.513.100	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	121.858.000	121.858.000	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	10.000.000	10.000.000	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	565.000.000	808.648.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	565.000.000	808.648.000	
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	565.000.000	808.648.000	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	22.910.200	22.910.200	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	22.910.200	22.910.200	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	12.910.200	12.910.200	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	41.522.122.078	51.569.672.462	
1.04.2.11.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	36.241.124.578	43.203.374.792	
1.04.2.11.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	36.241.124.578	43.203.374.792	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.350.471.039	15.311.556.144	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.058.100	32.251.200	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	4.600.500	
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.999.900	1.999.900	
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.100	1.744.500	
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.100	2.000.100	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.999.800	1.848.000	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.058.200	18.058.200	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.967.043.151	9.063.824.273	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.785.343.151	8.882.124.473	
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156.360.000	151.410.000	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.001.000	8.887.000	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.356.000	10.356.000	
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.983.000	11.046.800	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	70.000.000	
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	70.000.000	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.279.705.068	1.581.648.611	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.997.000	4.997.000	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	313.411.385	345.109.385	
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.550	4.999.550	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.995.000	16.995.000	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.499.800	19.108.200	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	
2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.010.000	12.275.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	921.792.333	1.173.164.476	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	482.522.940	
2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	482.522.940	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.238.158.700	3.328.343.100	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266.708.700	316.693.100	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.969.450.000	3.009.650.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	805.506.020	752.966.020	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.719.300	41.719.300	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	491.192.000	491.192.000	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.570.000	60.570.000	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	212.024.720	159.484.720	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	315.499.900	515.499.900	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	115.499.900	115.499.900	
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	115.499.900	115.499.900	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	200.000.000	400.000.000	
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	0	200.000.000	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	200.000.000	200.000.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	857.423.280	779.022.879	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	781.796.480	703.396.379	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	326.994.560	234.594.479	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	64.906.140	64.906.140	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	389.895.780	403.895.760	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	44.252.800	46.016.500	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	44.252.800	46.016.500	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	31.374.000	29.610.000	
2.11.03.2.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	31.374.000	29.610.000	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.474.387.672	4.474.543.172	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.474.387.672	4.474.543.172	
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	39.998.672	39.998.672	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.304.401.000	4.363.856.000	
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	99.999.000	40.699.500	
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	29.989.000	29.989.000	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	142.353.730	142.353.730	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	142.353.730	142.353.730	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	77.503.730	77.503.730	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	64.850.000	64.850.000	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	78.406.820	78.406.820	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	78.406.820	78.406.820	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	12.759.900	12.759.900	
2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	40.000.000	40.000.000	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.527.000	9.527.000	
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	16.119.920	16.119.920	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	33.865.000	33.865.000	
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	33.865.000	33.865.000	
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	33.865.000	33.865.000	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	130.000.000	117.500.000	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	117.500.000	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	130.000.000	117.500.000	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	31.430.000	18.929.800	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	31.430.000	18.929.800	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	10.000.000	9.999.800	
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	21.430.000	8.930.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	16.827.287.137	21.731.697.347	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	16.827.287.137	21.731.697.347	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	15.342.597.100	14.322.325.900	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	67.845.000	468.116.500	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.416.845.037	6.941.254.947	
2.11.0.00.0.00.01.0000	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	5.280.997.500	8.366.297.670	
1.04.2.11.0.00.01.0001	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	5.280.997.500	8.366.297.670	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.280.997.500	8.366.297.670	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	5.280.997.500	8.366.297.670	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	981.000.000	981.000.000	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.875.876.500	4.596.176.670	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	424.121.000	2.789.121.000	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.508.770.911	8.844.374.992	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.508.770.911	8.844.374.992	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.508.770.911	8.844.374.992	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.015.528.811	8.323.632.892	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.464.200	50.464.200	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.364.200	37.364.200	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.100.000	13.100.000	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.707.563.661	3.774.322.742	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.591.376.661	3.657.035.742	
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	107.862.000	108.962.000	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.330.200	3.330.200	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.994.800	4.994.800	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	40.000.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.562.583.950	1.731.538.950	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.783.000	5.783.000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	826.982.550	850.032.550	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.114.900	48.114.900	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.603.500	65.603.500	
2.12.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.900.000	5.900.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	610.200.000	756.105.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.173.345.000	2.172.735.000	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.565.000	8.565.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.300.000	149.790.000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.965.480.000	2.014.380.000	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	481.572.000	554.572.000	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	38.990.000	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297.660.000	297.660.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.062.000	128.062.000	
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.860.000	89.860.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	66.410.000	66.410.000	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	66.410.000	66.410.000	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	56.410.000	56.410.000	
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10.000.000	10.000.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	119.092.700	129.092.700	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	119.092.700	129.092.700	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	10.809.800	10.809.800	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	108.282.900	118.282.900	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	307.739.400	325.239.400	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	48.212.000	48.212.000	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	48.212.000	48.212.000	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	52.491.500	52.491.500	
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	52.491.500	52.491.500	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	207.035.900	224.535.900	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.04.2.03.03	Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	193.665.900	211.165.900	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	13.370.000	13.370.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	154.072.040.141	166.516.185.913	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	154.072.040.141	166.516.185.913	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	154.072.040.141	166.516.185.913	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.141.653.563	6.553.811.663	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.707.000	37.707.000	
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.707.000	17.707.000	
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.876.369.897	3.901.369.897	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.696.021.197	3.721.021.197	
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	152.400.000	152.400.000	
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.810.500	9.810.500	
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.138.200	18.138.200	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	933.642.286	1.381.622.266	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.454.000	10.454.000	
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.085.386	10.085.386	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.559.500	23.559.500	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.722.400	25.722.400	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	863.821.000	1.311.800.980	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	80.377.000	
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	80.377.000	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	960.457.480	838.634.500	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.507.480	194.204.500	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	695.950.000	644.430.000	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.476.900	314.101.000	
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	240.670.900	221.295.000	
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.430.000	24.430.000	
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.376.000	68.376.000	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	299.436.000	246.991.000	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	299.436.000	246.991.000	
2.13.02.2.01.02	Fasilitas Tata Wilayah Desa	299.436.000	246.991.000	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	229.112.000	241.239.000	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	229.112.000	241.239.000	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	37.112.500	46.112.500	
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	36.791.000	36.791.000	
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	155.208.500	158.335.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	145.036.995.178	156.704.086.850	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	145.036.995.178	156.704.086.850	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	642.424.600	609.962.500	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	142.889.274.578	154.080.180.850	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	410.388.300	993.164.800	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	199.103.400	174.930.400	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	88.000.000	88.000.000	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	112.544.600	69.344.600	
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	252.499.800	252.499.800	
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	209.287.400	211.457.400	
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	27.500.000	40.500.000	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	205.972.500	184.046.500	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.364.843.400	2.770.057.400	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.364.843.400	2.770.057.400	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.160.963.500	2.569.373.500	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	90.664.000	87.468.000	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	58.215.900	58.215.900	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	55.000.000	55.000.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.848.760.700	12.012.000.200	
1.06.2.08.2.14.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.848.760.700	12.012.000.200	
1.06.2.08.2.14.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.848.760.700	12.012.000.200	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	58.353.200	131.592.700	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	8.681.200	81.920.700	
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	8.681.200	81.920.700	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	49.672.000	49.672.000	
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	9.672.000	9.672.000	
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	40.000.000	40.000.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.576.089.700	6.666.089.700	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	376.307.800	466.307.800	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	9.570.800	9.570.800	
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	322.200.000	322.200.000	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	44.537.000	134.537.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	4.039.492.600	4.039.492.600	
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	2.517.492.600	2.517.492.600	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.522.000.000	1.522.000.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	491.789.300	491.789.300	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	487.289.300	487.289.300	
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	4.500.000	4.500.000	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.668.500.000	1.668.500.000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	1.668.500.000	1.668.500.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.214.317.800	5.214.317.800	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.214.317.800	5.214.317.800	
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	272.717.800	272.717.800	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.941.600.000	4.941.600.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	9.365.444.571	13.516.468.532	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	9.365.444.571	13.516.468.532	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	9.365.444.571	13.516.468.532	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.920.489.282	6.794.833.928	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.569.000	33.569.000	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.549.000	7.549.000	
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.146.000	11.146.000	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.870.000	4.870.000	
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.004.000	10.004.000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.696.304.984	4.758.713.323	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.594.845.984	4.657.254.323	
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	95.060.000	95.060.000	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.399.000	6.399.000	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	30.000.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.301.950	224.301.950	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.875.500	3.875.500	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.233.450	19.233.450	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.418.000	9.418.000	
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.800.000	3.800.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.975.000	187.975.000	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.781.440	729.087.440	
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	657.306.000	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.781.440	71.781.440	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	580.727.000	580.727.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.927.000	104.927.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	475.800.000	475.800.000	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.804.908	438.435.215	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	38.990.000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251.298.908	271.298.885	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.620.000	28.620.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.896.000	99.526.330	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.741.451.189	5.991.317.704	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	239.870.200	399.436.715	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	71.000.000	71.000.000	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	99.374.500	253.289.015	
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	49.999.900	49.999.900	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	19.495.800	25.147.800	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	258.833.025	258.833.025	
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	206.107.900	206.107.900	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	52.725.125	52.725.125	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	9.268.000	41.268.000	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	9.268.000	41.268.000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	845.470.664	885.470.664	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	198.500.000	198.500.000	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	566.610.664	606.610.664	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	80.360.000	80.360.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	598.993.500	3.344.293.500	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	504.321.000	510.321.000	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	59.675.000	2.798.975.000	
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	4.997.500	4.997.500	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5.000.000	5.000.000	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	15.000.000	15.000.000	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	561.922.500	829.922.500	
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	561.922.500	829.922.500	
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	192.093.300	152.093.300	
2.15.02.2.14.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	140.399.300	140.399.300	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	51.694.000	11.694.000	
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	60.000.000	
2.15.02.2.16.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	60.000.000	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	703.504.100	730.316.900	
2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	16.516.400	40.329.200	
2.15.03.2.03.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.996.400	28.809.200	
2.15.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	11.520.000	11.520.000	
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	686.987.700	689.987.700	
2.15.03.2.13.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	32.499.900	32.499.900	
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	627.487.800	627.487.800	
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	27.000.000	30.000.000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.031.382.525	17.306.305.980	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	14.031.382.525	17.306.305.980	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	14.031.382.525	17.306.305.980	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.427.298.422	8.389.519.233	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.271.800	60.283.700	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.421.900	13.620.000	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.556.200	11.182.000	
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.800.000	1.325.000	
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.816.600	4.259.600	
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.677.200	3.397.200	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.872.600	15.372.600	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.127.300	11.127.300	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.007.531.446	4.032.028.101	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.868.903.946	3.921.068.601	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	114.120.000	96.120.000	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.037.500	12.625.500	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.470.000	2.214.000	
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000	3.000.000	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	40.000.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	621.873.474	1.288.790.450	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.011.000	10.011.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.448.000	137.811.580	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.942.024	34.176.024	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.872.450	24.872.450	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000	13.000.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	493.600.000	1.068.919.396	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.203.451.702	2.203.451.702	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.107.202	190.107.202	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.012.344.500	2.012.344.500	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.170.000	761.965.280	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	38.990.000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240.480.000	211.463.280	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.820.000	39.752.000	
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.880.000	471.760.000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.891.434.500	5.406.706.500	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.891.434.500	5.406.706.500	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	37.976.500	10.506.500	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	54.050.000	220.465.000	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	214.300.000	326.447.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	27.920.000	27.720.000	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	3.478.688.000	4.811.568.000	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	78.500.000	10.000.000	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.712.649.603	3.510.080.247	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.479.113.603	3.267.494.247	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75.007.500	75.007.500	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.404.106.103	3.192.486.747	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	233.536.000	242.586.000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	8.000.000	10.000.000	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	8.000.000	10.050.000	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	209.536.000	212.036.000	
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	8.000.000	10.500.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10.706.819.369	11.469.450.810	
2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	10.706.819.369	11.469.450.810	
2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	10.706.819.369	11.469.450.810	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.581.679.549	10.356.365.590	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.134.200	90.134.200	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.232.000	9.232.000	
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.920.000	8.920.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.784.000	15.784.000	
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.198.200	56.198.200	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.842.574.217	6.269.010.658	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.697.874.217	6.111.710.658	
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	128.700.000	141.300.000	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.000.000	16.000.000	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	60.000.000	
2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	60.000.000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	780.652.755	859.522.755	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.988.000	24.988.000	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.200.000	126.070.000	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.810.275	53.810.275	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.379.900	32.379.900	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	622.274.580	622.274.580	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.126.866.877	2.169.866.877	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.800.000	306.800.000	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.900.066.877	1.863.066.877	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	701.451.500	907.831.100	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	38.990.000	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	332.361.500	332.361.500	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.100.000	56.100.000	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	274.000.000	480.379.600	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	11.449.600	11.449.600	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.728.600	7.728.600	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.728.600	7.728.600	
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.721.000	3.721.000	
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.721.000	3.721.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	53.858.200	53.858.200	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	53.858.200	53.858.200	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	24.145.800	24.145.800	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	29.712.400	29.712.400	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	103.215.800	103.215.800	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	103.215.800	103.215.800	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	27.250.000	27.250.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kabupaten/Kota			
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	75.965.800	75.965.800	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	155.833.360	155.833.360	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	155.833.360	155.833.360	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	155.833.360	155.833.360	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	123.308.000	123.308.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	123.308.000	123.308.000	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	123.308.000	123.308.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	380.841.360	368.786.760	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	380.841.360	368.786.760	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	27.260.000	27.260.000	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	25.190.000	25.190.000	
2.17.07.2.01.03	Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	89.505.000	77.450.400	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	104.724.000	104.724.000	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	34.060.000	34.060.000	
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100.102.360	100.102.360	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	296.633.500	296.633.500	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	296.633.500	296.633.500	
2.17.08.2.01.01	Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	296.633.500	296.633.500	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.089.830.171	12.157.861.372	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.089.830.171	12.157.861.372	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.089.830.171	12.157.861.372	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.406.430.611	11.415.461.812	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.898.100	43.898.100	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.250.000	7.250.000	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.894.000	7.894.000	
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.098.000	6.098.000	
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.717.800	6.717.800	
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.717.800	6.717.800	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.220.500	9.220.500	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.999.405.905	4.561.963.349	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.874.356.305	4.436.913.749	
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	107.100.000	107.100.000	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.999.000	9.999.000	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.950.600	7.950.600	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.105.900	15.105.900	
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.684.000	4.684.000	
2.18.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.537.900	7.537.900	
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.884.000	2.884.000	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.552.000	126.552.000	
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.300.000	51.300.000	
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.252.000	75.252.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	582.489.897	658.463.149	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.750.000	34.750.000	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.407.697	28.407.697	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.533.000	42.533.000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.870.000	55.458.252	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.750.000	15.450.000	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.719.200	40.719.200	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	377.900.000	423.585.000	
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17.560.000	17.560.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	577.717.000	2.746.727.370	
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	577.717.000	2.746.727.370	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.127.301.699	1.990.952.823	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.918	6.000.918	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	227.482.680	176.104.505	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.893.818.101	1.808.847.400	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	933.960.110	1.271.799.121	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	38.990.000	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.185.040	190.813.040	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	650.799.070	961.960.081	
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.986.000	80.036.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	65.988.500	65.988.500	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	65.988.500	65.988.500	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	65.988.500	65.988.500	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	26.011.300	85.011.300	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	26.011.300	85.011.300	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	26.011.300	85.011.300	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	79.299.900	79.299.900	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	79.299.900	79.299.900	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	36.591.900	36.591.900	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	26.202.000	26.202.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	7.000.000	7.000.000	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	9.506.000	9.506.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	483.099.900	483.099.900	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	483.099.900	483.099.900	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	23.999.900	23.999.900	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	333.324.000	333.324.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	125.776.000	125.776.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	28.999.960	28.999.960	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.999.960	28.999.960	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	28.999.960	28.999.960	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.897.358.336	19.121.817.089	
2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	12.897.358.336	19.121.817.089	
2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	12.897.358.336	19.121.817.089	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.429.405.836	9.428.921.539	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.798.000	24.798.000	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.999.000	13.999.000	
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.500	4.999.500	
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.799.500	5.799.500	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.445.822.142	5.552.314.486	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.325.012.142	5.419.324.486	
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.660.000	128.840.000	
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.150.000	4.150.000	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.600.000	6.500.000	
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.600.000	6.500.000	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	970.754.450	1.229.810.750	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.904.000	24.459.000	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.080.450	64.378.950	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.790.000	16.790.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	869.980.000	1.124.182.800	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.983.672	586.979.875	
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.983.672	586.979.875	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.508.306.572	1.498.977.428	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.106.572	240.477.428	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.267.200.000	1.252.500.000	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.141.000	529.541.000	
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	38.990.000	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.839.000	181.039.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.320.000	19.320.000	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	219.992.000	290.192.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	916.487.400	916.594.200	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	265.255.400	265.362.200	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	135.260.400	135.367.200	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	129.995.000	129.995.000	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	651.232.000	651.232.000	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	651.232.000	651.232.000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.551.465.100	8.776.301.350	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	249.651.600	290.770.850	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	249.651.600	290.770.850	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	243.420.000	203.012.000	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	243.420.000	203.012.000	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	120.739.900	278.239.900	
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	120.739.900	278.239.900	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.856.053.600	7.932.678.600	
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	2.856.053.600	7.932.678.600	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	81.600.000	71.600.000	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	81.600.000	71.600.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	142.799.520	142.799.520	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	142.799.520	142.799.520	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	142.799.520	142.799.520	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	142.799.520	142.799.520	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	142.799.520	142.799.520	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	47.378.060	47.378.060	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	35.421.480	35.421.480	
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	44.999.980	44.999.980	
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	15.000.000	15.000.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	78.526.420	78.526.420	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	78.526.420	78.526.420	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	78.526.420	78.526.420	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	78.526.420	78.526.420	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	63.526.420	63.526.420	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.999.980	21.999.980	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.393.180	10.393.180	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	15.541.660	15.541.660	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.591.600	15.591.600	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.700.156.800	1.700.156.800	
2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.700.156.800	1.700.156.800	
2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.700.156.800	1.700.156.800	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.374.875.300	1.374.875.300	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.020.000	10.020.000	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	10.020.000	10.020.000	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.350.361.000	1.350.361.000	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.303.720.000	1.303.720.000	
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	46.641.000	46.641.000	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.494.300	14.494.300	
2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	14.494.300	14.494.300	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	25.402.500	25.402.500	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.402.500	25.402.500	
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	20.402.500	20.402.500	
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	5.000.000	5.000.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	299.879.000	299.879.000	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	58.056.500	58.056.500	
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	58.056.500	58.056.500	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	241.822.500	241.822.500	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	241.822.500	241.822.500	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.809.442.757	5.023.841.170	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.809.442.757	5.023.841.170	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.809.442.757	5.023.841.170	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.475.051.257	4.683.249.670	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.941.500	2.941.500	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	900.000	900.000	
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.098.000	1.098.000	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	943.500	943.500	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.186.743.297	3.248.897.224	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.093.093.297	3.145.467.224	
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90.460.000	99.710.000	
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.190.000	3.720.000	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.500.000	43.500.000	
2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.500.000	43.500.000	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.763.780	365.507.030	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.844.500	8.018.000	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.135.850	22.103.300	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.286.530	34.515.530	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.596.900	27.023.800	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	241.900.000	273.846.400	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.550.000	45.730.000	
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.889.000	3.889.000	
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.005.000	22.315.000	
2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.656.000	19.526.000	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	651.003.680	685.104.916	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.853.680	136.454.916	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	573.150.000	548.650.000	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.549.000	291.569.000	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	38.990.000	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.600.000	104.600.000	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.960.000	25.680.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.999.000	122.299.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	317.791.500	323.991.500	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	162.511.000	173.066.000	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	19.999.500	19.999.500	
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	60.736.500	73.686.500	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	81.775.000	79.380.000	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	155.280.500	150.925.500	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	108.770.500	125.465.500	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	25.460.000	25.460.000	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	16.600.000	16.600.000	
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.600.000	16.600.000	
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	15.000.000	15.000.000	
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	1.600.000	1.600.000	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	337.738.250	316.565.000	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	337.738.250	316.565.000	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	337.738.250	316.565.000	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	265.829.500	241.797.500	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	140.410.000	140.410.000	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	63.377.000	63.377.000	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	40.028.000	40.028.000	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	37.005.000	37.005.000	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	14.252.500	14.252.500	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	14.252.500	14.252.500	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	111.167.000	87.135.000	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	71.612.000	47.580.000	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	39.555.000	39.555.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kabupaten/Kota			
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	71.908.750	74.767.500	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	19.233.500	12.281.000	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	6.900.000	6.900.000	
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	12.333.500	5.381.000	
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	18.529.000	25.029.000	
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	4.675.000	4.675.000	
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	13.854.000	20.354.000	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	34.146.250	37.457.500	
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	34.146.250	37.457.500	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	847.263.300	823.351.010	
2.09.3.25.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	847.263.300	823.351.010	
2.09.3.25.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	847.263.300	823.351.010	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	160.298.600	160.298.600	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	8.200.000	8.200.000	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	8.200.000	8.200.000	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	115.970.800	115.970.800	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	25.919.900	25.919.900	
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	65.152.300	65.152.300	
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	24.898.600	24.898.600	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5.264.000	5.264.000	
3.25.03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5.264.000	5.264.000	
3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.199.800	30.732.800	
3.25.03.2.04.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.000.000	5.000.000	
3.25.03.2.04.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	22.199.800	25.732.800	
3.25.03.2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.664.000	131.000	
3.25.03.2.05.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	3.664.000	131.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	378.569.100	386.597.910	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	75.000.000	63.444.000	
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	25.000.000	20.783.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000	42.661.000	
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	15.455.000	
3.25.04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	15.455.000	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	278.569.100	307.698.910	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	161.773.400	219.628.210	
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.795.700	47.840.700	
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	51.000.000	40.230.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	105.595.600	73.654.500	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	105.595.600	73.654.500	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	51.731.400	36.890.400	
3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	53.864.200	36.764.100	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	202.800.000	202.800.000	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	14.000.000	14.000.000	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.000.000	14.000.000	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	91.600.000	91.600.000	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	91.600.000	91.600.000	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	97.200.000	97.200.000	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	76.175.000	76.175.000	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.025.000	21.025.000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.437.082.700	3.944.842.500	
2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.437.082.700	3.944.842.500	
2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.437.082.700	3.944.842.500	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.927.343.700	1.874.343.700	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	235.000.000	182.000.000	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	90.000.000	90.000.000	
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	145.000.000	92.000.000	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.640.743.700	1.640.743.700	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.598.763.700	1.598.763.700	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	41.980.000	41.980.000	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	51.600.000	51.600.000	
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	51.600.000	51.600.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	989.321.000	1.350.300.800	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	989.321.000	1.350.300.800	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	194.400.000	255.380.000	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	794.921.000	1.094.920.800	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	520.418.000	720.198.000	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	520.418.000	720.198.000	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	476.498.000	676.278.000	
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	43.920.000	43.920.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	38.329.554.136	39.369.248.339	
3.27.0.00.0.00.04.0000	Dinas Pertanian	38.329.554.136	39.369.248.339	
3.27.0.00.0.00.04.0000	Dinas Pertanian	38.329.554.136	39.369.248.339	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.344.389.288	30.218.747.741	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.998.900	100.216.400	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.054.400	67.271.900	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.944.500	32.944.500	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.094.220.705	25.401.428.328	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.089.220.705	25.387.128.328	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	14.300.000	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	20.000.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.687.700	622.271.830	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.687.700	63.953.200	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.000.000	548.318.630	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.822.000	437.889.000	
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	342.000.000	
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.822.000	95.889.000	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.208.428.082	3.139.380.282	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.918.082	258.970.282	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.975.510.000	2.880.410.000	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	485.231.901	497.561.901	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	442.078.301	442.078.301	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.189.600	30.519.600	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.964.000	24.964.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.224.982.006	1.669.909.756	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	554.737.683	925.125.683	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	291.446.703	698.946.703	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	263.290.980	226.178.980	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	520.244.323	612.644.073	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	312.878.649	312.878.399	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	123.098.000	215.498.000	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	84.267.674	84.267.674	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	73.500.000	68.305.000	
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	73.500.000	68.305.000	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	76.500.000	63.835.000	
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	76.500.000	63.835.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.578.588.800	3.193.588.800	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	455.000.000	80.000.000	
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	80.000.000	80.000.000	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.049.788.800	3.039.788.800	
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	50.836.400	50.836.400	
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	209.536.000	209.536.000	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.789.416.400	2.779.416.400	
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	73.800.000	73.800.000	
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	73.800.000	73.800.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.088.680.392	1.253.167.592	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	169.277.180	169.277.180	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	169.277.180	169.277.180	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	522.278.632	537.452.632	
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	522.278.632	537.452.632	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	248.086.500	248.086.500	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	248.086.500	248.086.500	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	114.258.080	263.571.280	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	33.697.680	183.010.880	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	53.545.400	53.545.400	
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	27.015.000	27.015.000	
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	34.780.000	34.780.000	
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	34.780.000	34.780.000	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	852.718.250	836.171.250	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	852.718.250	836.171.250	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	127.924.500	127.924.500	
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	38.822.500	28.528.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	70.636.250	64.383.750	
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	615.335.000	615.335.000	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	81.991.000	78.528.800	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.294.400	33.832.400	
3.27.06.2.01.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	6.776.000	6.776.000	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	5.497.400	3.997.400	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	25.021.000	23.059.000	
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	19.691.100	19.691.100	
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	19.691.100	19.691.100	
3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	25.005.500	25.005.300	
3.27.06.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	19.354.000	17.254.000	
3.27.06.2.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	5.651.500	7.751.300	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.158.204.400	2.119.134.400	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.158.204.400	2.119.134.400	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	505.433.000	505.433.000	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.374.403.700	1.335.333.700	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	278.367.700	278.367.700	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.761.693.648	1.657.749.648	
2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.761.693.648	1.657.749.648	
2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.761.693.648	1.657.749.648	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1.450.000	1.450.000	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	1.270.000	920.000	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.270.000	920.000	
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	150.000	150.000	
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	150.000	150.000	
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	30.000	380.000	
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	30.000	380.000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.124.620.000	974.620.000	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.124.620.000	974.620.000	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.120.997.000	970.997.000	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.623.000	3.623.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	95.247.900	95.247.900	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.183.000	1.183.000	
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.183.000	1.183.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	93.382.900	93.382.900	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	7.781.000	7.781.000	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	765.000	765.000	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	84.836.900	84.836.900	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	682.000	682.000	
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	682.000	682.000	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	365.226.400	365.226.400	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	365.226.400	365.226.400	
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	226.400	226.400	
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	256.000.000	256.000.000	
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	100.000.000	100.000.000	
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	188.000	188.000	
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	8.812.000	8.812.000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	166.358.348	207.414.348	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	166.358.348	207.414.348	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	127.990.848	167.190.848	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	35.572.500	37.428.500	
3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	2.795.000	2.795.000	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	8.791.000	13.791.000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	8.791.000	13.791.000	
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	8.300.000	13.300.000	
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	264.000	264.000	
3.30.07.2.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	227.000	227.000	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.646.761.524	1.770.908.024	
2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.646.761.524	1.770.908.024	
2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.646.761.524	1.770.908.024	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.590.107.524	1.714.254.024	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.590.107.524	1.714.254.024	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.288.283.024	1.422.637.524	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	243.328.000	243.328.000	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	58.496.500	48.288.500	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	18.716.000	18.716.000	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	18.716.000	18.716.000	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang	9.358.000	9.358.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	9.358.000	9.358.000	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	37.938.000	37.938.000	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	37.938.000	37.938.000	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	778.000	778.000	
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	27.588.500	27.588.500	
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	9.571.500	9.571.500	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	50.000.000	145.336.000	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	50.000.000	145.336.000	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	50.000.000	145.336.000	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	50.000.000	145.336.000	
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	50.000.000	145.336.000	
3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	26.000.500	121.336.500	
3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	23.999.500	23.999.500	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	49.668.885.445	58.018.819.037	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	49.668.885.445	58.018.819.037	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	49.668.885.445	58.018.819.037	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.870.998.065	44.961.354.757	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.235.800	112.910.400	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.255.800	51.847.800	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.055.000	21.501.100	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.925.000	39.561.500	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.660.920.224	17.400.385.338	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.232.856.224	16.970.281.338	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	428.064.000	430.104.000	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.760.800	122.760.800	
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45.760.800	72.760.800	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	50.000.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.158.445.064	4.831.575.838	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.100.500	48.100.500	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	720.191.122	1.396.020.372	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	30.000.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.360.153.442	3.357.454.966	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.987.000	5.866.057.000	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	2.461.380.000	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	2.679.660.000	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	103.987.000	725.017.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.906.967.396	4.988.603.600	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.250.000	36.250.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.202.897.396	1.317.533.600	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	260.250.000	260.250.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.407.570.000	3.374.570.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.315.728.725	5.864.048.725	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	784.330.000	784.330.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.240.240.000	1.510.900.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	66.000.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.358.308.725	2.595.668.725	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	454.000.000	454.000.000	
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	438.850.000	453.150.000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	963.174.556	1.023.174.556	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	170.474.556	170.474.556	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	102.700.000	102.700.000	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	90.000.000	150.000.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.279.188.800	2.232.988.800	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	843.522.500	751.862.500	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	504.122.500	406.462.500	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	931.543.800	1.074.663.800	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	443.414.200	492.674.200	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	207.940.000	227.680.000	
4.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	136.641.200	166.161.200	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	98.833.000	98.833.000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.811.175.500	2.026.175.500	
4.01.01.2.14.01	Fasilitas Keprotokolan	1.583.555.000	1.798.555.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	98.246.500	98.246.500	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	129.374.000	129.374.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.819.592.280	11.840.708.680	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	358.199.000	386.500.000	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	51.425.500	65.651.500	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	161.852.500	161.852.500	
4.01.02.2.01.03	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	144.921.000	158.996.000	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11.994.666.180	11.025.166.180	
4.01.02.2.02.01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.277.159.400	6.218.659.400	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2.100.785.000	2.039.785.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.616.721.780	2.766.721.780	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	441.168.300	398.418.500	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	116.469.800	116.470.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	296.904.900	254.154.900	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	27.793.600	27.793.600	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	25.558.800	30.624.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25.558.800	30.624.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	978.295.100	1.216.755.600	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	418.564.500	678.119.500	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	384.170.800	428.170.800	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	34.393.700	249.948.700	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	91.505.900	79.719.900	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	43.654.300	43.616.300	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	33.145.200	21.397.200	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	14.706.400	14.706.400	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	432.832.700	423.524.200	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	71.130.000	71.130.000	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	238.897.700	229.589.200	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	122.805.000	122.805.000	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	35.392.000	35.392.000	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	10.733.000	10.733.000	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	24.659.000	24.659.000	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	68.918.419.745	80.092.041.032	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	68.918.419.745	80.092.041.032	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	68.918.419.745	80.092.041.032	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	66.661.049.945	77.834.671.232	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.999.800	35.049.800	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.999.800	35.049.800	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.257.240.352	6.272.361.740	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.053.974.552	4.109.595.940	
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.186.426.000	2.145.926.000	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.962.000	6.962.000	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.877.800	9.877.800	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	589.322.500	639.322.500	
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	220.000.000	270.000.000	
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	369.322.500	369.322.500	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.873.554.000	6.381.638.900	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.727.500	106.272.170	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.360.490.000	1.819.765.050	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.724.500	270.479.780	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.582.000	110.091.900	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.280.000	43.280.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.191.750.000	4.031.750.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	452.370.000	451.200.000	
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	452.370.000	451.200.000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.251.788	392.251.788	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	392.251.788	392.251.788	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.125.563.000	2.726.417.999	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	245.790.000	245.790.000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	416.180.000	381.800.000	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.305.000	96.305.000	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.367.288.000	2.002.522.999	
4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.045.055.000	1.045.055.000	
4.02.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	1.045.055.000	1.045.055.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	29.474.793.505	29.475.473.505	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	29.089.798.505	29.089.798.505	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	384.995.000	385.675.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	20.415.900.000	30.415.900.000	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20.415.900.000	30.415.900.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	2.257.369.800	2.257.369.800	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	837.865.800	837.865.800	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	574.965.800	574.965.800	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	262.900.000	262.900.000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.162.305.000	1.162.305.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	3.630.000	3.630.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.158.675.000	1.158.675.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	257.199.000	257.199.000	
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	4.530.000	4.530.000	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	669.000	669.000	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	252.000.000	252.000.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.01	PERENCANAAN	11.459.658.282	12.578.785.430	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	11.459.658.282	12.578.785.430	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	11.459.658.282	12.578.785.430	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.692.757.042	9.798.669.276	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000	55.000.000	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000	3.500.000	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000	3.500.000	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000	3.500.000	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.500.000	3.500.000	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	16.000.000	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.936.012.502	6.022.015.911	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.801.012.502	5.887.015.911	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125.000.000	125.000.000	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	5.000.000	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.000.000	7.000.000	
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.000.000	7.000.000	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135.000.000	135.000.000	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	135.000.000	135.000.000	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	596.332.390	1.079.968.415	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.983.500	11.983.500	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.446.890	11.491.515	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.903.000	17.963.500	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.000	16.179.900	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540.000.000	1.022.350.000	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.879.500	576.916.600	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.004.500	560.041.600	
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.875.000	16.875.000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.349.244.650	1.334.272.350	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.123.300	188.151.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.142.121.350	1.142.121.350	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	497.288.000	588.496.000	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	38.990.000	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	305.260.000	305.260.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.868.000	176.076.000	
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.170.000	68.170.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.885.515.640	1.945.866.154	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	876.826.200	1.152.443.300	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	37.054.000	116.520.000	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	28.856.000	28.856.000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	177.186.000	177.169.100	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	633.730.200	829.898.200	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	605.026.640	415.964.554	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	379.930.640	236.810.154	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	124.596.000	80.654.400	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100.500.000	98.500.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	403.662.800	377.458.300	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	403.662.800	377.458.300	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	881.385.600	834.250.000	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	453.840.900	406.705.300	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32.790.400	32.790.400	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	60.427.000	60.427.000	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40.247.000	40.247.000	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.930.500	75.930.500	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15.000.000	15.000.000	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	229.446.000	182.310.400	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	150.293.000	150.293.000	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	33.864.000	33.864.000	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16.340.000	16.340.000	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29.716.000	29.716.000	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34.286.500	34.286.500	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15.905.000	15.905.000	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20.181.500	20.181.500	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	277.251.700	277.251.700	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.059.200	69.059.200	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	19.246.600	19.246.600	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20.798.000	20.798.000	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	138.992.900	138.992.900	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	13.164.000	13.164.000	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15.991.000	15.991.000	
5.02	KEUANGAN	270.194.205.549	278.198.628.633	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	270.194.205.549	278.198.628.633	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	270.194.205.549	278.198.628.633	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.221.580.762	50.211.633.766	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.839.100	56.098.100	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.869.600	6.657.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.466.100	3.330.000	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.417.600	5.194.500	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.304.000	9.250.500	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	12.304.000	7.111.500	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.937.600	15.643.600	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.540.200	8.910.500	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.521.905.591	44.171.270.614	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.058.185.791	43.727.244.814	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	438.992.000	419.298.000	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.780.000	15.780.000	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.947.800	8.947.800	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.606.800	20.606.800	
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.507.900	2.507.900	
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.024.600	3.024.600	
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.074.300	15.074.300	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	957.331.959	1.532.617.840	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.641.500	27.601.500	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.316.500	33.316.500	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.263.859	87.271.740	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.110.100	57.110.100	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	757.000.000	1.327.318.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	447.990.000	1.156.462.000	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	37.798.000	37.798.000	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	410.192.000	1.118.664.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.072.207.562	2.038.806.662	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	395.156.662	395.156.662	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.677.050.900	1.643.650.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.110.699.750	1.235.771.750	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	38.990.000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	620.860.000	587.580.000	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.177.750	106.177.750	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	179.928.000	310.280.000	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.064.000	135.064.000	
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.680.000	57.680.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	225.423.702.900	225.410.302.900	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.347.793.000	1.334.393.000	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	70.000.000	70.000.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	70.000.000	70.000.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	205.494.500	205.494.500	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan	323.139.200	323.139.200	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	229.100.000	229.100.000	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	65.900.000	65.900.000	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	384.159.300	370.759.300	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	215.489.910.500	215.489.910.500	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	140.595.500	140.595.500	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	215.194.736.500	215.194.736.500	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemoangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	27.657.800	27.657.800	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	126.920.700	126.920.700	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	515.999.600	515.999.600	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	75.359.700	72.759.700	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	163.949.600	178.422.100	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	198.055.000	194.155.000	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	72.960.800	70.662.800	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.000.000.000	8.000.000.000	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8.000.000.000	8.000.000.000	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	69.999.800	69.999.800	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	69.999.800	69.999.800	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	501.221.750	540.730.450	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	501.221.750	540.730.450	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	76.208.000	75.693.000	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	58.346.000	58.314.500	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	144.429.000	150.377.000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	42.817.000	54.867.000	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	136.868.000	106.868.000	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	24.002.750	65.259.950	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	18.551.000	29.351.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.047.700.137	2.035.961.517	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.047.700.137	2.035.961.517	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	201.902.000	201.902.000	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	33.732.000	110.482.000	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	21.896.500	15.146.500	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0	50.690.000	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	950.248.500	618.048.500	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	16.097.500	16.097.500	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta	49.980.500	22.530.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	45.207.000	6.657.000	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	38.645.100	73.645.100	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	28.098.900	28.098.900	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	503.338.000	718.438.000	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	7.950.500	6.750.500	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	140.467.637	157.339.017	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	10.136.000	10.136.000	
5.03	KEPEGAWAIAN	10.363.236.734	13.024.725.463	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.363.236.734	13.024.725.463	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.363.236.734	13.024.725.463	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.680.697.034	9.613.052.863	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.801.000	77.801.000	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.301.000	10.301.000	
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.918.000	8.918.000	
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.622.000	9.622.000	
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.338.000	9.338.000	
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.622.000	9.622.000	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.131.663.134	5.206.065.863	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.021.243.134	5.074.085.863	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.420.000	121.980.000	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	5.000.000	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.061.600	125.992.100	
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16.061.600	125.992.100	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	889.285.300	1.432.569.400	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.427.000	32.934.800	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.655.700	492.767.500	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.857.600	28.857.600	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.245.000	21.909.500	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.100.000	11.100.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	745.000.000	845.000.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.116.399.500	1.096.043.500	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	354.669.500	325.313.500	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	761.730.000	770.730.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.486.500	1.674.581.000	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	525.296.000	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.700.000	194.700.000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.300.000	48.530.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.740.000	817.215.000	
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	102.756.500	88.840.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.682.539.700	3.411.672.600	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	909.363.800	756.021.700	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	21.908.200	21.908.200	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	562.999.800	453.860.800	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	9.271.300	9.271.300	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	180.000.000	180.000.000	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	84.814.300	64.043.900	
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	50.370.200	26.937.500	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	839.992.000	949.042.000	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	80.797.600	142.597.600	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	117.746.300	143.996.300	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	641.448.100	662.448.100	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	686.609.200	1.460.034.200	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	111.892.900	117.642.900	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	100.000.000	902.375.000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	280.999.800	280.999.800	
5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	25.000.000	33.400.000	
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	118.716.500	84.016.500	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	25.000.000	20.800.000	
5.03.02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	25.000.000	20.800.000	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	246.574.700	246.574.700	
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	77.192.900	77.192.900	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	39.093.100	39.093.100	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	72.626.800	72.626.800	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	22.564.700	22.564.700	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15.413.900	15.413.900	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	19.683.300	19.683.300	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.103.138.400	3.451.597.400	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.103.138.400	3.451.597.400	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.103.138.400	3.451.597.400	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.103.138.400	3.451.597.400	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	519.998.000	529.997.000	
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	40.751.000	40.751.000	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	471.856.000	481.855.000	
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	7.391.000	7.391.000	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.583.140.400	2.921.600.400	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.04.02.2.02.05	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	190.973.000	177.970.000	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.384.266.400	2.735.729.400	
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7.901.000	7.901.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.355.869.200	1.332.412.200	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.355.869.200	1.332.412.200	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.355.869.200	1.332.412.200	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.355.869.200	1.332.412.200	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	217.607.100	216.287.100	
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	112.359.000	110.359.000	
5.05.02.2.01.07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	105.248.100	105.928.100	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	783.782.000	785.071.000	
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	783.782.000	785.071.000	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	354.480.100	331.054.100	
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	354.480.100	331.054.100	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	11.584.860.032	13.292.825.148	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	11.584.860.032	13.292.825.148	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	11.584.860.032	13.292.825.148	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.532.380.032	11.397.122.148	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.354.500	3.354.500	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.454.500	1.454.500	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.900.000	1.900.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.839.763.569	8.733.828.698	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.753.973.569	8.648.638.698	
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	82.580.000	81.980.000	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.400.000	1.400.000	
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.810.000	1.810.000	
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	2.700.000	
6.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.450.000	1.450.000	
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.250.000	1.250.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	527.048.200	712.048.200	
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.548.200	1.548.200	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	525.500.000	710.500.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	413.493.763	426.697.511	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.955.100	13.548.100	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.798.463	14.019.211	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.524.500	71.051.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.335.700	39.199.200	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.880.000	19.880.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.000.000	259.000.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.478.000	661.537.047	
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	8.614.000	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.478.000	652.923.047	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.816.000	490.820.192	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.050.000	15.050.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.616.000	161.620.192	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.150.000	314.150.000	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.726.000	366.136.000	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	38.990.000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.864.000	90.112.000	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.420.000	47.420.000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.452.000	189.614.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.006.530.000	946.480.000	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	890.980.000	838.130.000	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	231.980.000	231.980.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	151.500.000	101.500.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	26.250.000	24.900.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	22.950.000	26.250.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	401.800.000	401.800.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	56.500.000	51.700.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	115.550.000	108.350.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	115.550.000	108.350.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.045.950.000	949.223.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1.045.950.000	949.223.000	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	91.200.000	91.200.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23.150.000	32.150.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	645.200.000	779.473.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	286.400.000	46.400.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN	62.240.375.037	70.502.591.855	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Kertak Hanyar	5.407.227.255	6.327.735.921	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Kertak Hanyar	4.457.757.055	4.778.265.721	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.213.147.055	4.534.730.721	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.560.000	2.560.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.590.000	1.590.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	970.000	970.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.609.622.210	3.675.181.492	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.554.837.210	3.620.396.492	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.300.000	54.300.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	485.000	485.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000	30.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.804.325	188.715.665	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.279.600	3.279.600	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.032.100	31.825.600	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.239.925	5.239.925	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.202.700	5.320.540	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.000.000	4.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.050.000	139.050.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.405.000	44.750.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.405.000	44.750.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.325.600	286.596.564	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.145.600	26.096.564	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285.180.000	258.500.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.429.920	306.927.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.379.920	48.180.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.050.000	10.991.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	247.756.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.250.000	11.250.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	11.250.000	11.250.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.250.000	11.250.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	61.700.000	61.700.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	61.700.000	61.700.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.100.000	11.100.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.600.000	50.600.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.100.000	4.200.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.200.000	4.200.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.100.000	2.100.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.100.000	2.100.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	142.560.000	146.385.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	142.560.000	146.385.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	25.550.000	29.375.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	117.010.000	117.010.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000	20.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000	20.000.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.000.000	18.000.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.000.000	1.000.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.000.000	1.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Manarap Lama	312.921.600	512.921.600	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	312.921.600	512.921.600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	312.921.600	512.921.600	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	312.921.600	312.921.600	
7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Kertak Hanyar I	325.330.050	525.330.050	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	325.330.050	525.330.050	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	325.330.050	525.330.050	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	325.330.050	325.330.050	
7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Mandar Sari	311.218.550	511.218.550	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	311.218.550	511.218.550	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	311.218.550	511.218.550	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	311.218.550	311.218.550	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Astambul	2.474.470.851	2.582.470.851	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Astambul	2.474.470.851	2.582.470.851	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.282.840.851	2.390.840.851	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.777.200	1.777.200	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	242.000	242.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.535.200	1.535.200	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.890.410.851	1.890.760.851	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.848.770.851	1.848.770.851	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.640.000	41.990.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	690.000	690.000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	690.000	690.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.653.900	108.663.900	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	597.000	597.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.102.000	1.102.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.240.900	13.250.900	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.714.000	2.714.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.000.000	91.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.247.000	27.687.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.247.000	27.687.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.974.000	226.974.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.224.000	41.224.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.750.000	184.750.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.087.900	134.287.900	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.733.900	53.733.900	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	8.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.354.000	72.554.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.170.000	18.170.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	18.170.000	18.170.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	18.170.000	18.170.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	57.874.000	57.874.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	57.874.000	57.874.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.294.000	17.294.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.580.000	40.580.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.484.000	12.484.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.884.000	9.884.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.269.000	8.269.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.615.000	1.615.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.600.000	2.600.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.600.000	2.600.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	92.752.000	92.752.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	92.752.000	92.752.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.575.000	23.575.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	40.800.000	40.800.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28.377.000	28.377.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.350.000	10.350.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.350.000	10.350.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.750.000	1.750.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000	3.000.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.250.000	1.250.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.200.000	2.200.000	
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.100.000	1.100.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta	1.050.000	1.050.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Gambut	6.325.503.758	6.878.307.434	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Gambut	5.575.503.758	5.728.307.434	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.072.467.758	4.225.271.434	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.299.600	1.299.600	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	499.800	499.800	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	349.800	349.800	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	450.000	450.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.602.387.928	3.647.191.860	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.553.247.928	3.598.051.860	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.140.000	49.140.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.000.000	27.000.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.000.000	27.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.600.000	7.200.000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.600.000	7.200.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.836.750	147.593.250	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.495.000	1.495.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.495.500	1.495.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.317.250	25.073.750	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.124.000	2.124.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.995.000	1.995.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.410.000	115.410.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.193.000	31.536.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.193.000	31.536.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.432.480	205.442.724	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.440.000	4.440.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.492.480	53.502.724	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.500.000	147.500.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.718.000	158.008.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.780.000	55.770.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.950.000	17.950.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.988.000	84.288.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.080.000	70.080.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.840.000	29.840.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.840.000	29.840.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40.240.000	40.240.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	40.240.000	40.240.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	79.050.000	79.050.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	79.050.000	79.050.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.266.000	9.266.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69.784.000	69.784.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.450.000	2.450.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.450.000	2.450.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.450.000	2.450.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.336.580.000	1.336.580.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.336.580.000	1.336.580.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	36.740.000	36.740.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.275.000.000	1.275.000.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.840.000	24.840.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.876.000	14.876.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.876.000	14.876.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.231.000	2.231.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.281.000	3.281.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.706.000	1.706.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.126.000	2.126.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.196.000	2.196.000	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3.336.000	3.336.000	
7.01.0.00.0.00.03.0001	Kelurahan Gambut	400.000.000	600.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000	600.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	600.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	400.000.000	400.000.000	
7.01.0.00.0.00.03.0002	Kelurahan Gambut Barat	350.000.000	550.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	350.000.000	550.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350.000.000	550.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	350.000.000	350.000.000	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Karang Intan	2.830.595.747	3.035.554.557	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Karang Intan	2.830.595.747	3.035.554.557	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.505.522.247	2.718.681.057	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.210.000	7.110.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.350.000	1.950.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	840.000	840.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	630.000	630.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.350.000	1.350.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	840.000	840.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	450.000	450.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000	1.050.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.035.715.757	2.132.674.567	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.020.115.757	2.117.074.567	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.240.000	15.240.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	360.000	360.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.150.000	9.150.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	150.000	150.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000	9.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000	150.000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	150.000	150.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.874.530	123.874.530	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.062.000	1.062.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	598.000	598.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.350.030	3.350.030	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.124.100	10.124.100	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.080.400	3.080.400	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.660.000	105.660.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.650.000	43.450.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.650.000	43.450.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.472.860	210.116.132	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.697.860	21.841.132	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.775.000	187.275.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.299.100	192.155.828	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.717.100	102.521.828	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.270.000	7.270.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.312.000	82.364.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.977.500	10.977.500	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	577.500	577.500	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	577.500	577.500	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.400.000	10.400.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10.400.000	10.400.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	70.589.000	67.689.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	70.589.000	67.689.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.000.000	12.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	58.589.000	55.689.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.000.000	25.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	20.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16.000.000	16.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.000.000	4.000.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000	5.000.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000	5.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	179.273.000	173.973.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	179.273.000	173.973.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	24.165.000	24.165.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	132.708.000	127.408.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22.400.000	22.400.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	39.234.000	39.234.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.234.000	39.234.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.477.000	13.477.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.500.000	3.500.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.400.000	10.400.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6.000.000	6.000.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5.857.000	5.857.000	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Martapura	11.128.589.106	13.112.454.212	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Martapura	8.521.448.453	9.105.313.559	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.316.595.453	8.900.460.559	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.292.000	8.292.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.039.000	4.039.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.253.000	4.253.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.654.434.453	8.135.779.559	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.523.725.453	7.999.590.559	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	129.960.000	135.300.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	749.000	889.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.896.500	9.939.500	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.443.500	1.443.500	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.453.000	8.496.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.153.000	2.153.000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.153.000	2.153.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.876.500	143.973.500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.369.000	2.369.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.680.000	1.680.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.192.000	3.192.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.035.500	30.132.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.400.000	6.400.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	9.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.200.000	91.200.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.131.000	27.435.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	9.453.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.131.000	17.982.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.010.000	429.510.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.660.000	71.660.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	349.850.000	356.350.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.802.000	143.378.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.762.000	42.018.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.060.000	9.380.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.980.000	91.980.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.414.000	5.414.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.707.000	2.707.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.707.000	2.707.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.707.000	2.707.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.707.000	2.707.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	56.789.000	56.789.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	56.789.000	56.789.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.931.000	9.931.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46.858.000	46.858.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.414.000	5.414.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.707.000	2.707.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.707.000	2.707.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.707.000	2.707.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.707.000	2.707.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	122.936.000	122.936.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	122.936.000	122.936.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.023.000	16.023.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	83.359.000	83.359.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23.554.000	23.554.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.300.000	14.300.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.300.000	14.300.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.707.000	2.707.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.713.000	2.713.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.777.000	7.777.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.103.000	1.103.000	
7.01.0.00.0.00.05.0001	Kelurahan Sungai Paring	346.547.000	546.547.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	346.547.000	546.547.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	346.547.000	546.547.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.541.900	2.541.900	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	341.905.100	341.905.100	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	2.100.000	2.100.000	
7.01.0.00.0.00.05.0002	Kelurahan Murung Keraton	346.405.000	546.405.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	346.405.000	546.405.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	346.405.000	546.405.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.409.200	3.409.200	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	339.995.800	339.995.800	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	3.000.000	3.000.000	
7.01.0.00.0.00.05.0003	Kelurahan Jawa	350.833.000	550.833.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	350.833.000	550.833.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.400.000	1.400.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.400.000	1.400.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	349.433.000	549.433.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	348.453.000	348.453.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	980.000	980.000	
7.01.0.00.0.00.05.0004	Kelurahan Keraton	497.345.740	697.345.740	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	497.345.740	697.345.740	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	497.345.740	697.345.740	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.500.000	3.500.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	483.345.740	483.345.740	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	10.500.000	10.500.000	
7.01.0.00.0.00.05.0005	Kelurahan Sekumpul	372.766.000	572.766.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	372.766.000	572.766.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	372.766.000	572.766.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.713.000	3.713.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	366.453.000	366.453.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	2.600.000	2.600.000	
7.01.0.00.0.00.05.0006	Kelurahan Tanjung Rema Darat	346.864.913	546.864.913	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	346.864.913	546.864.913	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	346.864.913	546.864.913	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.008.000	3.008.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	341.856.913	341.856.913	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	2.000.000	2.000.000	
7.01.0.00.0.00.05.0007	Kelurahan Pasayangan	346.379.000	546.379.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	346.379.000	546.379.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	346.379.000	546.379.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.483.000	4.483.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	340.496.000	340.496.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	1.400.000	1.400.000	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Aranio	2.137.835.983	2.576.560.063	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Aranio	2.137.835.983	2.576.560.063	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.935.828.083	2.330.048.163	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.075.000	3.075.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.965.000	1.965.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.110.000	1.110.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.531.156.080	1.808.940.160	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.490.722.080	1.768.506.160	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.624.000	39.624.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	810.000	810.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	600.000	1.000.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	600.000	1.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	700.000	700.000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	700.000	700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.869.004	117.224.004	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	992.000	1.346.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.689.004	1.754.004	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.866.500	5.066.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.644.500	1.950.500	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.500.000	2.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.177.000	104.607.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.245.999	51.626.999	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.245.999	51.626.999	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.322.000	153.322.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.342.000	13.342.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.480.000	137.480.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.860.000	194.160.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.820.000	98.820.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.240.000	8.240.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.800.000	87.100.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.468.300	60.408.300	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	666.000	666.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	666.000	666.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.802.300	59.742.300	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.802.300	59.742.300	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	64.486.600	64.486.600	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	64.486.600	64.486.600	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.513.400	8.513.400	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.973.200	55.973.200	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.298.000	6.298.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.624.000	2.624.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.624.000	2.624.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.674.000	3.674.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.674.000	3.674.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	99.079.000	99.079.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	99.079.000	99.079.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.250.000	16.250.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	55.852.000	55.852.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	26.977.000	26.977.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.676.000	16.240.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.676.000	16.240.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.986.000	2.986.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.986.000	2.986.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.986.000	2.986.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.986.000	2.986.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.296.000	4.296.000	
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Sungai Tabuk	3.412.066.658	4.131.911.836	
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Sungai Tabuk	2.992.493.558	3.512.338.736	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.783.569.558	3.318.464.736	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.932.900	4.357.900	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.997.100	2.322.100	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.935.800	2.035.800	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.339.140.938	2.750.985.786	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.299.705.938	2.711.550.786	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.640.000	38.640.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	795.000	795.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.225.000	12.225.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	225.000	225.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.000.000	12.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.093.712	147.794.042	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.789.000	3.789.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.495.212	4.495.212	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.909.500	18.909.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	900.000	900.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.000.000	116.700.330	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.858.000	27.658.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	8.393.000	8.393.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.465.000	19.265.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.779.008	239.604.008	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.279.008	66.279.008	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.500.000	171.325.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.540.000	135.840.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.180.000	48.180.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.360.000	82.660.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.000.000	3.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.000.000	3.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.000.000	3.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	56.655.000	50.355.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	56.655.000	50.355.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.250.000	6.250.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.405.000	44.105.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.674.000	5.924.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.924.000	5.924.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.924.000	3.924.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.000.000	2.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	129.595.000	126.595.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	129.595.000	126.595.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	26.790.000	26.790.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	102.805.000	99.805.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.000.000	8.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.000.000	8.000.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000	2.000.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000	6.000.000	
7.01.0.00.0.00.07.0001	Kelurahan Sungai Lutut	419.573.100	619.573.100	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	419.573.100	619.573.100	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	419.573.100	619.573.100	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	419.573.100	419.573.100	
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Aluh-Aluh	1.748.004.926	2.387.675.021	
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Aluh-Aluh	1.748.004.926	2.387.675.021	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.499.837.526	2.173.234.371	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.396.500	3.396.500	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.666.500	2.666.500	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	730.000	730.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.083.588.166	1.610.965.196	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.054.338.166	1.586.010.396	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.440.000	24.240.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	810.000	714.800	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.600.000	9.600.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	600.000	600.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000	9.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	700.000	700.000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	700.000	700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.872.080	123.392.760	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.463.200	1.463.200	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.614.280	11.959.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.825.800	1.825.800	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.950.000	4.675.960	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.868.800	1.118.800	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.150.000	102.350.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.487.480	80.508.620	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.259.000	38.280.140	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.228.480	42.228.480	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.058.800	174.370.800	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000	2.700.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.138.800	8.530.800	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.220.000	163.140.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.134.500	170.300.495	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.990.500	89.856.495	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.915.000	5.915.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.229.000	74.529.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	74.200.000	70.037.500	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.000.000	5.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000	5.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	69.200.000	65.037.500	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	69.200.000	65.037.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60.076.400	59.076.400	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60.076.400	59.076.400	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.513.400	6.513.400	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52.563.000	52.563.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.622.800	14.961.200	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.372.800	9.961.200	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.721.200	6.721.200	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.651.600	3.240.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.250.000	5.000.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.250.000	5.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	82.032.500	58.129.850	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	82.032.500	58.129.850	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50.105.500	30.352.850	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	31.927.000	27.777.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.235.700	12.235.700	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.235.700	12.235.700	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.956.000	2.956.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.911.200	1.911.200	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.406.000	2.406.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.962.500	4.962.500	
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Mataraman	2.486.583.377	2.616.792.746	
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Mataraman	2.486.583.377	2.616.792.746	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.310.303.377	2.442.552.746	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.706.000	5.706.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.706.000	5.706.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.859.110.577	1.881.319.946	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.859.110.577	1.881.319.946	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.291.260	128.347.760	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.321.000	3.321.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.570.260	16.126.760	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.700.000	6.200.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.700.000	2.700.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.000.000	100.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.685.540	276.769.040	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.658.500	13.335.500	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.187.040	46.497.540	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.840.000	216.936.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.510.000	150.410.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.180.000	67.180.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000	5.440.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.490.000	77.790.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.500.000	50.500.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.500.000	50.500.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50.500.000	50.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	62.700.000	60.060.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	62.700.000	60.060.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.500.000	13.860.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46.200.000	46.200.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.000.000	6.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.000.000	6.000.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.000.000	6.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	51.080.000	51.680.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	51.080.000	51.680.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	27.200.000	27.800.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23.880.000	23.880.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.000.000	6.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.000.000	6.000.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000	6.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Simpang Empat	2.057.768.666	2.204.830.422	
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Simpang Empat	2.057.768.666	2.204.830.422	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.887.089.166	2.027.984.922	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.115.800	4.115.800	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	330.000	330.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	499.800	499.800	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	500.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	350.000	350.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	315.000	315.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.400.000	1.400.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	721.000	721.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.474.399.162	1.515.561.482	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.443.871.162	1.482.933.482	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.240.000	32.340.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	288.000	288.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.108.000	12.108.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	108.000	108.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.000.000	12.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.000.000	2.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.191.404	134.191.404	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.001.500	3.001.500	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.208.100	17.208.100	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.781.804	2.781.804	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.600.000	12.600.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.400.000	2.400.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.200.000	1.200.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000	95.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.656.000	9.462.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.656.000	9.462.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.284.800	174.541.236	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.644.800	43.681.236	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148.640.000	129.860.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.334.000	176.005.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.580.000	84.051.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.170.000	13.170.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.584.000	78.784.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.405.000	9.405.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.051.000	3.051.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.051.000	3.051.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.354.000	6.354.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.354.000	6.354.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.804.500	41.804.500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	41.804.500	41.804.500	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.463.000	4.463.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.341.500	37.341.500	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.806.800	10.806.800	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.085.800	7.085.800	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.364.800	3.364.800	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.721.000	3.721.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.721.000	3.721.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.721.000	3.721.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	91.065.600	97.231.600	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	91.065.600	97.231.600	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	31.188.600	19.504.600	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	59.877.000	77.727.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.597.600	17.597.600	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.597.600	17.597.600	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.212.000	4.212.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.080.400	3.080.400	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.240.200	4.240.200	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.698.000	2.698.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.367.000	3.367.000	
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pengaron	2.456.442.906	2.605.292.906	
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pengaron	2.456.442.906	2.605.292.906	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.268.010.406	2.429.410.406	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.902.500	5.902.500	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.495.000	3.495.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.407.500	2.407.500	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.861.353.606	1.864.004.120	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.829.468.706	1.832.719.220	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.840.000	30.840.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.044.900	444.900	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.642.500	9.592.500	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.642.500	592.500	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000	9.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.500.000	1.500.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.453.800	124.403.286	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.518.000	3.518.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.544.500	6.544.500	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.239.275	1.239.275	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.950.000	4.950.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.202.025	2.202.025	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	105.949.486	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.408.000	63.218.900	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	54.408.000	63.218.900	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.780.000	200.635.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.000.000	35.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.780.000	163.635.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.970.000	160.154.100	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.000.000	57.184.100	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.970.000	17.970.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	85.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.048.000	18.048.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.538.000	8.538.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.538.000	8.538.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.510.000	9.510.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9.510.000	9.510.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.613.500	41.663.500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48.613.500	41.663.500	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.224.000	11.224.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.389.500	30.439.500	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.304.000	4.804.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.752.000	1.652.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.752.000	1.652.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.552.000	3.152.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.552.000	3.152.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	105.813.000	105.813.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	105.813.000	105.813.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.819.000	23.819.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	81.994.000	81.994.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.654.000	5.554.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.654.000	5.554.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.102.000	2.402.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.552.000	3.152.000	
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Sungai Pinang	1.906.499.033	2.227.724.650	
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Sungai Pinang	1.906.499.033	2.227.724.650	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.662.435.533	1.983.661.150	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.543.500	3.543.500	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	335.500	335.500	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	330.000	330.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	90.000	90.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	450.000	450.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	744.000	744.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	744.000	744.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	850.000	850.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.254.507.928	1.467.733.545	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.225.767.928	1.438.993.545	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.740.000	28.740.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.600.000	9.600.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	600.000	600.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000	9.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	700.000	700.000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	700.000	700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.735.105	107.635.105	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	559.500	559.500	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.420.000	11.420.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.991.605	1.991.605	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.200.000	3.200.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.564.000	2.564.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000	87.900.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.565.000	49.365.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.565.000	49.365.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.616.000	184.616.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.880.000	1.880.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.836.000	24.836.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.900.000	157.900.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.168.000	160.468.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.980.000	70.980.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.200.000	5.200.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.988.000	84.288.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.230.000	10.230.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.630.000	3.630.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.630.000	3.630.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.600.000	6.600.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.600.000	6.600.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	56.317.000	56.317.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	56.317.000	56.317.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.499.000	7.499.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.818.000	48.818.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.233.000	20.233.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.941.000	15.941.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.637.000	12.637.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.304.000	3.304.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.292.000	4.292.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.292.000	4.292.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	147.607.000	147.607.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	147.607.000	147.607.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55.396.000	55.396.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	92.211.000	92.211.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.676.500	9.676.500	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.676.500	9.676.500	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.540.000	1.540.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.700.000	1.700.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.698.000	1.698.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.698.500	1.698.500	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegakan Batas Desa	3.040.000	3.040.000	
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Beruntung Baru	2.304.664.242	2.462.434.091	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Beruntung Baru	2.304.664.242	2.462.434.091	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.068.374.742	2.220.398.591	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.594.000	5.594.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.619.000	3.619.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.975.000	1.975.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.722.014.642	1.769.738.491	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.678.964.242	1.728.734.091	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.640.000	40.240.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	410.400	764.400	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	360.000	360.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	360.000	360.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	700.000	700.000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	700.000	700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.223.100	117.726.700	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.910.000	4.910.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.303.000	10.724.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.210.100	3.210.100	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.800.000	98.882.100	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.031.000	33.527.400	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.031.000	33.527.400	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.222.000	138.222.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.022.000	14.022.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.200.000	124.200.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.230.000	154.530.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.980.000	70.980.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.590.000	4.590.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.660.000	78.960.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.433.000	16.433.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	16.433.000	16.433.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.433.000	16.433.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	58.145.500	64.245.500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	58.145.500	64.245.500	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.354.000	6.354.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.791.500	57.891.500	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.334.000	5.334.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.127.000	3.127.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.127.000	3.127.000	
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.207.000	2.207.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.207.000	2.207.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	138.198.000	137.844.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	138.198.000	137.844.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32.009.000	32.009.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	75.012.000	74.658.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	31.177.000	31.177.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.179.000	18.179.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.179.000	18.179.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.977.000	2.977.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.634.000	4.634.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.777.000	2.777.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.734.000	4.734.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.057.000	3.057.000	
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Martapura Barat	2.290.794.271	2.511.824.579	
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Martapura Barat	2.290.794.271	2.511.824.579	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.012.187.271	2.233.317.579	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.800	2.800.800	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.800	1.000.800	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	1.800.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.593.552.371	1.674.171.429	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.552.812.371	1.633.431.429	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.240.000	39.240.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.500	1.000.500	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.500	1.000.500	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.200.000	4.200.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.821.600	100.142.950	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.820.000	3.820.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.560.000	9.560.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.525.000	1.525.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.376.600	17.376.600	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.040.000	3.040.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	4.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.000.000	60.321.350	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.600.000	71.490.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.600.000	71.490.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.560.000	200.560.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.660.000	20.660.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.900.000	4.900.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.000.000	175.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.952.000	178.951.900	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.828.000	45.827.900	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.124.000	133.124.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.400.000	25.300.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.200.000	4.200.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.100.000	2.100.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.100.000	2.100.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.300.000	4.200.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.100.000	2.100.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.100.000	2.100.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14.900.000	16.900.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	14.900.000	16.900.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	63.128.000	63.128.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.497.000	39.497.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.054.000	9.054.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.443.000	30.443.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	19.431.000	19.431.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	13.254.000	13.254.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.177.000	6.177.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4.200.000	4.200.000	
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.100.000	2.100.000	
7.01.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	2.100.000	2.100.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.300.000	6.300.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.200.000	4.200.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.100.000	2.100.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.100.000	2.100.000	
7.01.04.7.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	2.100.000	2.100.000	
7.01.04.7.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.100.000	2.100.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	167.279.000	167.279.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	167.279.000	167.279.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	57.605.000	57.605.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	109.674.000	109.674.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.500.000	16.500.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.500.000	16.500.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.400.000	5.400.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.800.000	4.800.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.100.000	2.100.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.100.000	2.100.000	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.100.000	2.100.000	
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Sambung Makmur	2.033.128.299	2.163.298.443	
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Sambung Makmur	2.033.128.299	2.163.298.443	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.758.003.199	1.921.950.343	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.368.000	3.078.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.730.000	1.440.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.638.000	1.638.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.385.394.524	1.402.564.668	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.357.392.924	1.379.563.068	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.440.000	22.440.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	561.600	561.600	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.578.400	9.000.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.578.400	9.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.886.000	20.936.000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	936.000	936.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.950.000	20.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.228.675	116.727.075	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.503.775	15.516.775	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.089.900	4.092.300	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.200.000	10.118.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.435.000	87.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.533.000	93.087.000	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	38.901.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	9.048.000	15.340.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.485.000	38.846.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.895.600	113.755.600	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.895.600	113.755.600	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.119.000	162.802.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.307.000	74.780.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000	3.290.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.432.000	84.732.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.880.000	11.100.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.630.000	2.850.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.630.000	2.850.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.250.000	8.250.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8.250.000	8.250.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	64.338.000	58.138.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	64.338.000	58.138.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.238.000	10.038.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.100.000	48.100.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.605.000	15.505.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.870.000	14.770.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.350.000	13.250.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.520.000	1.520.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	735.000	735.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	735.000	735.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	106.291.100	105.256.100	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	106.291.100	105.256.100	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	29.010.000	29.010.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	76.246.100	76.246.100	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	83.011.000	51.349.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83.011.000	51.349.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.235.000	6.235.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.235.000	12.100.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6.200.000	6.200.000	
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	9.115.000	5.885.000	
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	13.104.000	1.500.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	36.122.000	19.429.000	
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Martapura Timur	2.677.243.743	3.044.092.937	
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Martapura Timur	2.677.243.743	3.044.092.937	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.477.926.043	2.846.335.037	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	1.200.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	800.000	800.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000	400.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.920.038.785	2.178.887.979	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.873.098.785	2.131.947.979	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.640.000	46.640.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	300.000	300.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	477.200	477.200	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	200.000	200.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	277.200	277.200	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	480.000	480.000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	480.000	480.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.839.600	103.944.400	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.989.800	12.287.100	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	500.000	500.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.500.000	1.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.349.800	88.157.300	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	182.404.886	259.961.886	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.093.000	44.350.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	143.311.886	215.611.886	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.298.072	229.206.072	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.448.072	32.448.072	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	197.850.000	196.758.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.187.500	72.177.500	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.719.500	54.709.500	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.480.000	5.480.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.988.000	11.988.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.480.000	12.480.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12.480.000	12.480.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.480.000	12.480.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.407.000	45.407.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.407.000	45.407.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000	10.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.407.000	35.407.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.320.000	8.320.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.200.000	5.200.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.120.000	3.120.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.080.000	2.080.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.120.000	3.120.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.120.000	3.120.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	110.891.000	110.891.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	110.891.000	110.891.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.120.000	16.120.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	94.771.000	94.771.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.219.700	20.659.900	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.219.700	20.659.900	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.340.000	2.340.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.200.000	5.200.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.360.000	9.360.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.559.900	1.559.900	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.200.000	2.200.000	
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Paramasan	2.017.107.276	2.654.522.507	
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Paramasan	2.017.107.276	2.654.522.507	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.802.527.776	2.447.443.007	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.725.000	4.725.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.150.000	3.150.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.575.000	1.575.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.401.726.099	1.431.141.330	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.371.136.099	1.400.551.330	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.240.000	30.240.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	350.000	350.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.180.000	11.180.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.180.000	2.180.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000	9.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.400.000	6.400.000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.400.000	1.400.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.939.677	132.927.377	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.713.750	2.713.750	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.474.427	5.204.427	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.479.800	801.800	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.222.000	6.197.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.049.700	6.010.400	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.000.000	112.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.683.000	560.585.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.683.000	560.585.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.080.000	119.390.300	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.040.000	2.040.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.690.000	7.350.300	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.350.000	110.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.794.000	181.094.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.360.000	86.360.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.450.000	6.450.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.984.000	88.284.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.400.000	8.400.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.400.000	8.400.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.400.000	8.400.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.000.000	44.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	49.000.000	44.000.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.000.000	9.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000	35.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.500.000	17.500.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.000.000	13.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.500.000	8.500.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.500.000	4.500.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.500.000	4.500.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.500.000	4.500.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100.177.000	100.177.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.177.000	100.177.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21.000.000	21.000.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	48.000.000	48.000.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	31.177.000	31.177.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	39.502.500	37.002.500	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.502.500	37.002.500	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.500.000	6.500.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000	6.000.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.971.300	7.971.300	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.891.200	2.891.200	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	13.640.000	13.640.000	
7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Tatah Makmur	2.256.493.182	2.436.728.532	
7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Tatah Makmur	2.256.493.182	2.436.728.532	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.071.034.382	2.251.269.732	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.222.200	4.222.200	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.522.300	2.522.300	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.699.900	1.699.900	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.670.783.276	1.699.118.626	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.630.793.276	1.659.128.626	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.240.000	39.240.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750.000	750.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	225.000	225.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	225.000	225.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	700.000	700.000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	700.000	700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.993.502	147.206.502	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.366.500	1.366.500	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.965.000	12.965.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.896.162	1.896.162	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.399.840	15.399.840	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.446.000	2.446.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	500.000	500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.420.000	112.633.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.165.000	72.080.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.543.000	1.543.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.622.000	70.537.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.549.404	161.049.404	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.949.404	16.949.404	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.600.000	143.100.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.396.000	166.668.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.116.000	78.098.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.300.000	5.970.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.980.000	82.600.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.369.300	6.369.300	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	869.300	869.300	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	869.300	869.300	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.500.000	5.500.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.500.000	5.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.286.500	48.286.500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48.286.500	48.286.500	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.665.000	7.665.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.621.500	40.621.500	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.700.000	9.700.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.943.000	6.943.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.160.000	4.160.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.783.000	2.783.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.757.000	2.757.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.757.000	2.757.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	110.703.000	110.703.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	110.703.000	110.703.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.345.000	20.345.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	90.358.000	90.358.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.400.000	10.400.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.400.000	10.400.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	900.000	900.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.080.000	1.080.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.080.000	2.080.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.180.000	2.180.000	
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.080.000	1.080.000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.080.000	2.080.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.000.000	1.000.000	
7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Telaga Bauntung	2.132.808.378	2.257.098.986	
7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Telaga Bauntung	2.132.808.378	2.257.098.986	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.976.908.378	2.090.148.986	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.815.000	1.977.420	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	270.000	270.420	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	75.000	75.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	75.000	75.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	450.000	450.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	450.000	612.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	450.000	450.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000	45.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.537.558.378	1.553.848.986	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.507.108.378	1.523.398.986	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.240.000	30.240.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	210.000	210.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.300.000	9.300.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	300.000	300.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000	9.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.070.000	2.070.000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.070.000	2.070.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.037.052	144.516.552	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000	4.500.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.881.052	3.155.552	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.776.000	13.879.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.120.000	4.472.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.000.000	3.750.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.760.000	114.760.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.439.000	110.315.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.439.000	110.315.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.042.148	147.169.028	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.342.148	14.944.028	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.700.000	130.225.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.646.800	120.952.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.826.800	97.547.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.820.000	11.405.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000	12.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.200.000	27.300.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	16.800.000	18.300.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.800.000	18.300.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.400.000	9.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8.400.000	9.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.550.000	43.550.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	43.550.000	43.550.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.000.000	9.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.550.000	34.550.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.600.000	9.600.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.900.000	6.900.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.400.000	3.400.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.500.000	3.500.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.700.000	2.700.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.700.000	2.700.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	72.550.000	82.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	72.550.000	82.000.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.000.000	23.820.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	32.150.000	28.200.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.400.000	29.980.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000	4.500.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000	4.500.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.000.000	1.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.000.000	1.500.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.000.000	1.000.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.000.000	1.000.000	
7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	2.156.547.380	2.285.281.161	
7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	2.156.547.380	2.285.281.161	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.950.325.580	2.078.159.361	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.150.000	3.150.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.575.000	1.575.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	175.000	175.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	175.000	175.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	175.000	175.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	175.000	175.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	875.000	875.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.552.110.730	1.572.844.511	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.520.920.730	1.541.654.511	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.840.000	30.840.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	350.000	350.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000	9.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.736.650	112.746.650	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.984.500	1.984.500	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.993.750	2.993.750	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.432.500	5.442.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.445.900	4.445.900	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.880.000	5.880.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000	92.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.454.000	33.254.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.454.000	33.254.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.414.200	194.414.200	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.964.200	40.964.200	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.950.000	151.950.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.460.000	152.750.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.780.000	74.770.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	5.680.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	72.300.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.114.000	9.114.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.114.000	9.114.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9.114.000	9.114.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	58.673.800	58.673.800	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	58.673.800	58.673.800	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.398.000	6.398.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52.275.800	52.275.800	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.375.000	3.375.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.375.000	3.375.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.500.000	2.500.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	875.000	875.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	111.507.000	112.407.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	111.507.000	112.407.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.276.000	21.176.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	91.231.000	91.231.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.552.000	23.552.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.552.000	23.552.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.964.000	1.964.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.588.000	21.588.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.440.075.769	44.746.884.630	
8.01.1.05.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	13.440.075.769	44.746.884.630	
8.01.1.05.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	13.440.075.769	44.746.884.630	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.732.633.169	5.850.978.030	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.497.500	12.118.500	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.496.000	2.836.000	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.118.000	1.665.000	
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.834.000	1.834.000	
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.597.500	1.597.500	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.978.500	1.964.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.473.500	2.221.500	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.458.446.954	3.521.328.115	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.351.869.054	3.407.110.215	
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.650.000	111.290.000	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.964.900	1.964.900	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	963.000	963.000	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	466.767.215	650.027.215	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.499.500	3.499.500	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.997.815	17.997.815	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.770.000	19.770.000	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.499.900	12.499.900	
8.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.000.000	3.000.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410.000.000	593.260.000	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.929.000	850.368.000	
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.929.000	850.368.000	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	451.812.500	451.812.500	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.380.000	1.380.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	447.932.500	447.932.500	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.180.000	365.323.700	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	38.990.000	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.920.000	167.920.000	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.000.000	140.143.700	
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.270.000	18.270.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	4.536.728.480	4.774.478.480	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.536.728.480	4.774.478.480	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4.531.732.800	4.769.482.800	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4.995.680	4.995.680	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.467.979.900	32.214.764.900	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.467.979.900	32.214.764.900	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.383.023.250	32.129.808.250	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	74.993.750	74.993.750	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9.962.900	9.962.900	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	158.280.000	146.080.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	158.280.000	146.080.000	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	153.280.000	145.080.000	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5.000.000	1.000.000	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	554.190.680	754.162.680	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	554.190.680	754.162.680	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	554.190.680	754.162.680	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	990.263.540	1.006.420.540	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	990.263.540	1.006.420.540	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	543.199.740	503.929.740	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50.049.800	50.049.800	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	397.014.000	452.441.000	

4.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Pada Struktur APBD Tahun 2023 berdasarkan belanja dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer Tahun 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Daerah	Target Tahun Anggaran APBD-Murni	Target Tahun Anggaran APBD-Perubahan	Tambah/Kurang	Persentase
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.772.715.598.337	1.689.097.874.002	(83.617.724.335)	-4,72%
5.1.01	Belanja Pegawai	920.429.859.575	953.033.037.610	32.603.178.035	3,54%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	788.641.802.218	640.390.039.298	(148.251.762.920)	-18,80%
5.1.05	Belanja Hibah	58.505.641.544	90.584.103.544	32.078.462.000	54,83%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.138.295.000	5.090.693.550	(47.601.450)	-0,93%
5.2	BELANJA MODAL	326.416.034.167	422.358.239.289	95.942.205.122	29,39%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.565.003.412	8.420.000.000	2.854.996.588	51,30%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.030.097.858	105.827.269.777	36.797.171.919	53,31%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.577.560.362	91.770.711.529	17.193.151.167	23,05%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.200.419.435	214.749.756.343	38.549.336.908	21,88%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.042.953.100	1.275.501.640	232.548.540	22,30%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	315.000.000	315.000.000	100,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.000.000.000	8.000.000.000	-	0,00%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000	8.000.000.000	-	0,00%
5.4	BELANJA TRANSFER	142.631.188.148	369.032.731.420	226.401.543.272	158,73%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.916.525.800	8.916.525.800	-	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	133.714.662.348	360.116.205.620	226.401.543.272	169,32%
	JUMLAH BELANJA	2.249.762.820.652	2.488.488.844.711	238.726.024.059	10,61%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.300.000.000	36.050.000.000	12.750.000.000	54,72%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	23.300.000.000	36.050.000.000	12.750.000.000	54,72%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.300.000.000	36.050.000.000	12.750.000.000	54,72%
	JUMLAH PENGELUARAN DAERAH	2.273.062.820.652	2.524.538.844.711	251.476.024.059	11,06%

Sumber : TAPD Kabupaten Banjar

Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut :

1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Operasi yang terdiri dari :
 - Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp953.033.037.610 yaitu untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, Belanja gaji dan tunjangan DPRD, Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan

- KDH/WKDH. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan adanya penerimaan ASN pada tahun 2023 untuk PPPK Daerah tenaga kesehatan dan tenaga Pendidikan.
- Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp640.390.039.298 terjadi penurunan sebesar Rp148.251.762.920 atau 18,80 persen yaitu untuk Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, dana Belanja Perjalanan Dinas.
 - Belanja hibah dialokasikan sebesar Rp90.584.103.544 terjadi peningkatan sebesar Rp32.078.462.000 atau 54,83 persen, digunakan untuk pemberian hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp5.090.693.550 terjadi penurunan sebesar – Rp47.601.450 atau 0,93 persen, digunakan untuk pemberian bantuan sosial yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp422.358.239.289 terjadi peningkatan sebesar Rp95.942.205.122 atau 29,39 persen yang terdiri dari Belanja modal tanah, Belanja modal peralatan dan mesin, Belanja modal Gedung dan bangunan, Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dan Belanja modal aset tetap lainnya.
 3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp8.000.000.000 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, digunakan untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 4. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp369.032.731.420 terjadi peningkatan sebesar Rp226.401.543.272 atau 158,73 persen yang terdiri dari: (1) Belanja bagi hasil yang mengalami peningkatan menyesuaikan peningkatan pendapatan target pajak dan distribusi Pendapatan asli daerah dimana Kabupaten berkewajiban mengalokasikan sebesar 10 persen dari pajak dan distribusi; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk Tahun Anggaran 2023 penerimaan berasal dari perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp363.419.641.283 Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan kebijakan pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal sebesar Rp36.050.000000 terdiri dari penyertaan modal kepada Bank Kalsel sebesar Rp.25.550.000.000 dan kepada PT. Air Minum sebesar Rp6.000.000.000 serta pemberian pinjaman kepada BPR sebesar Rp4.500.000.000 dalam rangka melaksanakan pemberian pinjaman dengan bunga nol persen kepada masyarakat.

Uraian tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

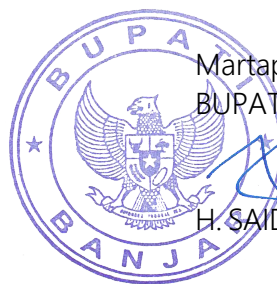
Tabel 5. 1. Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	Tahun Anggaran APBD-Murni	Tahun Anggaran APBD-Perubahan	Tambah/Kurang	Persentase
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	111.943.617.224	363.419.641.283	251.476.024.059	224,65%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	111.943.617.224	363.419.641.283	251.476.024.059	224,65%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	111.943.617.224	363.419.641.283	251.476.024.059	224,65%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.300.000.000	36.050.000.000	12.750.000.000	54,72%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	23.300.000.000	36.050.000.000	12.750.000.000	54,72%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	23.300.000.000	36.050.000.000	12.750.000.000	54,72%
	Pembiayaan Netto	88.643.617.224	327.369.641.283	238.726.024.059	269,31%

Sumber : TAPD Kab. Banjar

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 hasil pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Banjar bersama DPRD Kabupaten Banjar untuk menjadi pedoman menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2023.



Martapura, 7 Agustus 2023
BUPATI BANJAR,


H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Diberdayakan		
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tersalurkan		
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)		
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
			Berkembangnya Desa Mandiri Pangan		
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Ketersediaan Pangan Utama		
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
			Persentase Stabilitas Harga Pangan		
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
			Skor PPH Konsumsi		
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase Penurunan Desa rentan rawan Pangan		
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Skor Keamanan Pangan		
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
			persentase koperasi yang memiliki rekomendasi ijin usaha simpan pinjam		
			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan		
			Persentase Rekomendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas pembantu		
			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata		
			Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Produksi Perikanan Tangkap		
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Produksi Perikanan Budidaya		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Di Bidang Perikanan		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Angka Konsumsi Ikan		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Di Bidang Perikanan		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Persentase Pertumbuhan Ekspor Produksi Perikanan		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Prosentase destinasi wisata yang representatif		
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Prosentase destinasi wisata yang telah dipasarkan		
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif		
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja ltern (IKKI)		
				Dinas Pertanian	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang representatif		
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase Tertib Ukur		
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (berdasarkan permendagri 18 2020)		
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan		
				Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		
				Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
			Persentase implementasi penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum		
				Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kesehatan		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha		
				Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
				Dinas Kesehatan	
			0Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase puskesmas Terakreditasi Minimal Utama		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Puskesmas Terakreditasi minimal utama		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama		
				Dinas Kesehatan	
			Presentase puskesmas terakreditasi minimal utama		
				Dinas Kesehatan	
			Presentase Puskesmas Terakreditasi minimal utama		
				Dinas Kesehatan	
			Presentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama		
				Dinas Kesehatan	
			Presentase puskesmas terakreditasi minimal utama		
				Dinas Kesehatan	
			Presentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama		
				Dinas Kesehatan	
			Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama		
				Dinas Kesehatan	
			Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar		
				Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	
			Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit		
				Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Keadaan Tertentu oleh Tenaga Kesehatan RS		
				Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tersalurkan		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang Tersusun		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, PKWT, Struktur Skala Upah Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Indeks PUG		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (Per 100.000 Penduduk Perempuan)		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Persentase Keluarga Berkualitas		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Elemen Data Terpilah		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Tercapainya IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak)		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak)		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
		PROGRAM PENATAAN DESA			
			Persentase Penataan Administrasi Batas Wilayah Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
			Persentase Peningkatan Kerjasama Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase Desa yang Lembaga Kemasyarakatannya Diberdayakan		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Tingkat Prevelensi Kontrasepsi Modern (M CPR)		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata		
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase Pemuda Berdaya Saing		
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
			Persentase Pemuda yang berdaya saing		
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase atlet yang berdaya saing		
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
			Persentase Atlet yang berdaya saing		
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Prosentase destinasi wisata yang representatif		
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase Pengembangan Kawasan Ex.Transmigrasi		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sambung Makmur		
				Kecamatan Sambung Makmur	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan Sambung Makmur		
				Kecamatan Sambung Makmur	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Telaga Bauntung		
				Kecamatan Telaga Bauntung	
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan		
				Kecamatan Telaga Bauntung	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase warisan budaya tak benda kabupaten sebagai budaya tak benda nasional		
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Prosentase topik sejarah yang informasinya akan disebarluaskan		
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Prosentase warisan budaya benda yang telah ditetapkan dan dilestarikan sebagai cagar budaya		
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
			Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Persentase Bahan Pustaka yang dilestarikan		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
			Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Persentase Perumahan Yang Dibangun sesuai dengan dokumen teknis atau siteplan		
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani		
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU		
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai IKKI Perangkat Daerah		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)		
				Dinas Perhubungan	
			Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi		
				Dinas Perhubungan	
			V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak		
				Dinas Perhubungan	
			Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Kecamatan Aluh-Aluh	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Indeks Meningkatnya Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Indeks kekuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
				Persentase pelaksanaan fasilitasi sengketa tanah	
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan dan Permukiman	
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
				Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia	
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
				Tingkat Pencemaran Air	
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
				Persentase Lokasi Kawasan Keaneekaragaman Hayati Yang Ditangani	
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
				Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi	
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
				Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
				Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup	
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
				Persentase Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan	
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
				Persentase Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang terselesaikan	
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
				Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
				UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja	
				Satuan Polisi Pamong Praja	
				Nilai IKKI DPKP	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan Linmas		
			Satuan Polisi Pamong Praja		
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran		
			Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan		
			Persentase layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi		
			Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan		
			Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran		
			Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan		
			Persentase layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran		
			Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan		
			Persentase layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran		
			Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		
			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		
			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan		
			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian		
			Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		
			Persentase Perangkat Daerah yang telah mendapat layanan keamanan informasi		
			Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		
			Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		
			Presentase Aplikasi Informatika yang di Bangun / Kembangkan		
			Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas DKUMPP		
			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan		
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu		
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase penyelesaian regulasi kemudahan berinvestasi		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Investor Baru		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase LKPM		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			persentase data Statistik sektoral yang diolah		
				Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		
				Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Indeks KAMI		
				Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	
			Persentase Perangkat Daerah yang telah mendapat layanan keamanan informasi		
				Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kearsipan		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
			Tingkat Ketersediaan Arsip		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)		
				Sekretariat Daerah	
			Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Nilai LPPD		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		
				Sekretariat Daerah	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern		
				Sekretariat DPRD	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)		
				Sekretariat DPRD	
			Persentase fasilitasi pelaksanaan reses		
				Sekretariat DPRD	
			Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas		
				Sekretariat DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase fasilitasi pelaksanaan reses		
				Sekretariat DPRD	
			Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas		
				Sekretariat DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI)		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH YANG TEPAT WAKTU		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	
			PERSENTASE PERENCANAAN DAERAH YANG SELARAS		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	
			PERSENTASE PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	
			INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	
			INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEREKONOMIAN DAN SDA		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern		
				Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)		
				Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase capaian Dana Transfer		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
			Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik		
				Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
			Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik		
				Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
			Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik		
				Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
				Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Indeks Profesional ASN pada dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Indeks Profesional ASN pada dimensi Kompetensi		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			PERSENTASE INOVASI YANG DITERAPKAN		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	
			PERSENTASE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINDAKLANJUTI		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Inspektorat Daerah		
				Inspektorat Daerah	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Inspektorat Daerah		
				Inspektorat Daerah	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)		
				Inspektorat Daerah	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan APIP		
				Inspektorat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar		
				Kecamatan Kertak Hanyar	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar		
				Kecamatan Kertak Hanyar	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Astambul		
				Kecamatan Astambul	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Gambut	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Karang Intan		
				Kecamatan Karang Intan	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura		
				Kecamatan Martapura	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio		
				Kecamatan Aranio	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk		
				Kecamatan Sungai Tabuk	
			Bimbingan Teknis Implementase Peraturan Perundang Undangan		
				Kecamatan Aluh-Aluh	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
				Kecamatan Aluh-Aluh	
			Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor		
				Kecamatan Aluh-Aluh	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
				Kecamatan Aluh-Aluh	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Kecamatan Aluh-Aluh	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Mataraman		
				Kecamatan Mataraman	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat		
				Kecamatan Simpang Empat	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan		
				Kecamatan Pengaron	
			Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan Perangkat Daerah		
				Kecamatan Pengaron	
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan		
				Kecamatan Pengaron	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang		
				Kecamatan Sungai Pinang	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru		
				Kecamatan Beruntung Baru	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat		
				Kecamatan Martapura Barat	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan Sambung Makmur		
				Kecamatan Sambung Makmur	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Timur		
				Kecamatan Martapura Timur	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Paramasan		
				Kecamatan Paramasan	
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur		
				Kecamatan Tatah Makmur	
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan		
				Kecamatan Telaga Bauntung	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Cintapuri Darussalam		
				Kecamatan Cinta Puri Darussalam	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		
				Kecamatan Kertak Hanyar	
				Kecamatan Astambul	
			Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		
				Kecamatan Karang Intan	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
				Kecamatan Karang Intan	
			Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		
				Kecamatan Martapura	
				Kecamatan Aranio	
				Kecamatan Sungai Tabuk	
			Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		
				Kecamatan Simpang Empat	
			Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		
				Kecamatan Beruntung Baru	
			Persentase Fasilitasi kewenangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan yang terlaksana		
				Kecamatan Martapura Barat	
			Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		
				Kecamatan Martapura Barat	
		Persentase Fasilitasi Pelayanan Terhadap masyarakat di kecamatan			
				Kecamatan Martapura Barat	
			Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		
				Kecamatan Sambung Makmur	
				Kecamatan Martapura Timur	
				Kecamatan Tatah Makmur	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
				Kecamatan Kertak Hanyar	
			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		
				Kecamatan Kertak Hanyar	
			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
				Kecamatan Kertak Hanyar	
			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
				Kecamatan Kertak Hanyar	
			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		
				Kecamatan Astambul	
				Kecamatan Gambut	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Karang Intan	
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	
				Kecamatan Martapura	
				Kecamatan Aranio	
				Kecamatan Sungai Tabuk	
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	
				Kecamatan Aluh-Aluh	
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	
				Kecamatan Simpang Empat	
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	
				Kecamatan Beruntung Baru	
				Kecamatan Martapura Barat	
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	
				Kecamatan Sambung Makmur	
				Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Kecamatan Sambung Makmur	
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	
				Kecamatan Martapura Timur	
				Kecamatan Tatah Makmur	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	
				Kecamatan Kertak Hanyar	
				Kecamatan Astambul	
				Kecamatan Gambut	
				Kecamatan Karang Intan	
				Kecamatan Martapura	
				Kecamatan Aranio	
				Kecamatan Sungai Tabuk	
				Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	
				Kecamatan Aluh-Aluh	
				Persentase koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	
				Kecamatan Pengaron	
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	
				Kecamatan Sungai Pinang	
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	
				Kecamatan Beruntung Baru	
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	
				Kecamatan Martapura Barat	
				Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	
				Kecamatan Sambung Makmur	
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Martapura Timur	
				Kecamatan Tatah Makmur	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				Kecamatan Kertak Hanyar	
				Kecamatan Astambul	
				Kecamatan Karang Intan	
				Kecamatan Martapura	
				Kecamatan Aranio	
				Kecamatan Sungai Tabuk	
				Kecamatan Beruntung Baru	
				Kecamatan Sambung Makmur	
				Kecamatan Martapura Timur	
				Kecamatan Tatah Makmur	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Kecamatan Kertak Hanyar	
			Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Kecamatan Astambul	
				Kecamatan Karang Intan	
			Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan		
				Kecamatan Martapura	
			Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Kecamatan Aranio	
				Kecamatan Simpang Empat	
			Persentase Fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa		
				Kecamatan Pengaron	
			Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Beruntung Baru	
			Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Kecamatan Sambung Makmur	
			Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Kecamatan Martapura Timur	
			Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Kecamatan Tatah Makmur	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase penduduk yang mendapat pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran Kebangsaan		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase Ormas yang dibina		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase fasilitasi kegiatan P4GN dan FKUB yang terlaksana		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase Penanganan Konflik Sosial.		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
54	02. Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata						
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	70.198.300	70.198.300	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.600.792.069	2.881.380.070	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					
			Berkembangnya Desa Mandiri Pangan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	254.875.800	250.182.800	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Ketersediaan Pangan Utama				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	814.592.300	718.592.300	
			Persentase Stabilitas Harga Pangan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	814.592.300	718.592.300	
			Skor PPH Konsumsi				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	814.592.300	718.592.300	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Persentase Penurunan Desa rentan rawan Pangan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	75.352.400	52.284.400	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Skor Keamanan Pangan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	82.583.940	80.503.949	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
			persentase koperasi yang memiliki rekomendasi ijin usaha simpan pinjam				
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	7.728.600	7.728.600	
			Persentase Rekomendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas pembantu				
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	7.728.600	7.728.600	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Persentase pertumbuhan usaha mikro				
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	380.841.360	368.786.760	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase Jumlah Usaha Mikro yang meningkat Omzetnya				
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	296.633.500	296.633.500	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata				
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.976.983.694	3.870.107.053	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Produksi Perikanan Tangkap				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	160.298.600	160.298.600	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Produksi Perikanan Budidaya			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	378.569.100	386.597.910
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
			Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Di Bidang Perikanan			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	105.595.600	73.654.500
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
			Angka Konsumsi Ikan			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	202.800.000	202.800.000
			Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Di Bidang Perikanan			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	91.600.000	91.600.000
			Persentase Pertumbuhan Ekspor Produksi Perikanan			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	111.200.000	111.200.000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
			Prosentase destinasi wisata yang representatif			
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.927.343.700	1.874.343.700
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
			Prosentase destinasi wisata yang telah dipasarkan			
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	989.321.000	1.350.300.800
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
			Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif			
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	520.418.000	720.198.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
			Persentase luas lahan pertanian yang didukung sarana pertanian yang berkualitas			
				Dinas Pertanian	1.224.982.006	1.669.909.756
			Persentase pertumbuhan populasi ternak besar			
				Dinas Pertanian	1.224.982.006	1.669.909.756
			Persentase pertumbuhan produktivitas tanaman perkebunan unggulan			
				Dinas Pertanian	1.224.982.006	1.669.909.756
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
			Persentase luas lahan yang mendapatkan fasilitasi prasarana pertanian			
				Dinas Pertanian	3.578.588.800	3.193.588.800
			Persentase luas perkebunan yang mendapatkan fasilitasi prasarana perkebunan			
				Dinas Pertanian	3.578.588.800	3.193.588.800
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
			Persentase Jenis Produk Olahan yang dikembangkan			
				Dinas Pertanian	1.088.680.392	1.253.167.592
			Persentase Menurunnya Angka Mortalitas Ternak Besar			
				Dinas Pertanian	283.535.260	432.848.460
			Persentase Menurunnya Angka Mortalitas Ternak Besar			
				Dinas Pertanian	805.145.132	820.319.132
			Persentase produk asal hewan yang layak dikonsumsi			
				Dinas Pertanian	1.088.680.392	1.253.167.592
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
			Persentase kinerja pengendalian dan penanggulan bencana pertanian			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Pertanian	1.705.436.500	1.672.342.500
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
			Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi izin usaha			
				Dinas Pertanian	81.991.000	78.528.800
			Persentase usaha peternakan yang tertib administrasi			
				Dinas Pertanian	81.991.000	78.528.800
			Persentasi Usaha Perkebunan yang Tertib administrasi			
				Dinas Pertanian	81.991.000	78.528.800
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
			Persentase kelompok tani yang mandiri			
				Dinas Pertanian	2.158.204.400	2.119.134.400
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
			Persentase rekomendasi izin dan pendaftaran usaha yang dikeluarkan			
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	180.000	530.000
			PERSENTASE REKOMENDASI IZIN DAN PENDAFTARAN USAHA YANG DIKELUARKAN			
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.270.000	920.000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
			Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang representatif			
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	3.623.000	3.623.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
			Persentase koefisien variasi harga antar waktu			
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	95.247.900	95.247.900
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
			PERSENTASE PRODUK UNGGULAN DAERAH YANG DIKEMBANGKAN			
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	365.226.400	365.226.400
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
			Persentase Tertib Ukur			
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	166.358.348	207.414.348
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
			PERSENTASE PRODUK DAERAH YANG DIPROMOSIKAN			
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	8.791.000	13.791.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
			Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri (%)			
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.590.107.524	1.714.254.024
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
			Persentase IKM yang Memiliki Izin			
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	18.716.000	18.716.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
			Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (berdasarkan permendagri 18 2020)			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	37.938.000	37.938.000
55	03. Memperkuat Infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian					
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
			Persentasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik			
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9.949.268.163	11.890.018.163
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten			
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9.949.268.163	11.890.018.163
			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten			
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9.949.268.163	11.890.018.163
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
			Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman dan Layak			
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	21.987.236.801	24.463.431.581
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
			Persentase Akses Sanitasi Aman			
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	12.510.013.981	12.828.317.381
			Persentase Akses Sanitasi Layak			
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	12.510.013.981	12.828.317.381
			Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah			
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	12.510.013.981	12.828.317.381
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
			Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase			
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	11.340.977.200	12.936.944.564
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
			Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai			
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	14.603.719.216	14.431.877.221
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
			Persentase Pemanfaatan Bangunan yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang			
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	764.707.266	956.707.266
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
			Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan			
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	23.833.414.768	23.289.078.188
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
			Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap			
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	145.550.268.878	177.848.177.759
			Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap			
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	145.550.268.878	177.848.177.759
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi			
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	195.917.700	267.507.700
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
			Persentase Perumahan Yang Dibangun sesuai dengan dokumen teknis atau siteplan			
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	488.974.160	509.524.160

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani				
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	2.607.922.292	3.934.404.622	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
			Persentase pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	557.854.500	510.253.050	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
			Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU				
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	3.568.805.599	8.405.755.955	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Nilai IKKI Perangkat Daerah				
				Dinas Perhubungan	5.920.489.282	6.794.833.928	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)				
				Dinas Perhubungan	1.272.938.364	1.471.852.879	
			Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi				
				Dinas Perhubungan	479.207.425	633.121.940	
			V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar				
				Dinas Perhubungan	1.410.558.400	4.609.772.915	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
			Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak				
				Dinas Perhubungan	686.987.700	689.987.700	
			Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal				
				Dinas Perhubungan	16.516.400	40.329.200	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
			persentase koperasi yang memiliki rekomendasi ijin usaha simpan pinjam				
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	3.721.000	3.721.000	
			Persentase Rekomendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas pembantu				
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	3.721.000	3.721.000	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Persentase Koperasi yang mematuhi aturan perundangan				
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	53.858.200	53.858.200	
			Persentase KSP dan USP yang mematuhi aturan perundangan				
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	53.858.200	53.858.200	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
			Persentase KSP/ USP Sehat				
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	103.215.800	103.215.800	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
			Persentase SDM koperasi (pengawas dan pengurus) yang terlatih				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	155.833.360	155.833.360
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
			Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya			
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	123.308.000	123.308.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
		INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	20.798.000	20.798.000
56	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada pelayanan publik					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan			
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	14.723.391.369	18.882.992.614
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
			Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU			
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	15.853.598.500	19.889.874.300
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja			
				Satuan Polisi Pamong Praja	10.590.509.791	11.524.430.358
			Nilai IKKI DPKP			
				Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2.828.940.071	3.024.008.739
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan Linmas			
				Satuan Polisi Pamong Praja	756.525.400	1.299.266.000
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
			Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran			
				Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	558.885.500	558.885.500
			Persentase layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi			
				Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	558.885.500	558.885.500
			Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran			
				Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	558.885.500	558.885.500
			Persentase layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran			
				Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	558.885.500	558.885.500
			Persentase layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran			
				Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	558.885.500	558.885.500
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				
			Persentase pelaksanaan fasilitasi sengketa tanah			
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	135.371.100	135.371.100
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				
			Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria			
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	10.000.000	10.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				
			Persentase luasan aset tanah pemkab yang tersertifikasi			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	565.000.000	808.648.000
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
			Persentase aset tanah pemkab yang terinventarisir dan dipatenkan			
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	22.910.200	22.910.200
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.015.528.811	8.323.632.892
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
			Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk			
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	66.410.000	66.410.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
			Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil			
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	119.092.700	129.092.700
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
			Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan			
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	307.739.400	325.239.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian			
				Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	5.223.846.720	6.186.067.531
			Persentase Perangkat Daerah yang telah mendapat layanan keamanan informasi			
				Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	2.203.451.702	2.203.451.702
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
			Cakupan Pelaksanaan Diseminasi Dan Distribusi Informasi program prioritas			
				Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	3.891.434.500	5.406.706.500
			Persentase masyarakat yang menerima informasi publik			
				Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	3.891.434.500	5.406.706.500
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			
				Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	2.712.649.603	3.510.080.247
			Presentase Aplikasi Informatika yang di Bangun / Kembangkan			
				Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	2.712.649.603	3.510.080.247
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern (IKKI)			
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	701.451.500	907.831.100
			Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas DKUMPP			
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	9.581.679.549	10.356.365.590
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu			
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.363.897.611	11.372.928.812
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase penyelesaian regulasi kemudahan berinvestasi			
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	65.988.500	65.988.500
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
			Jumlah Investor Baru			
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26.011.300	85.011.300
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
			Indeks Kepuasan Masyarakat			
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	79.299.900	79.299.900
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
			Persentase LKPM			
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	483.099.900	483.099.900
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
			Persentase data dan sistem perizinan yang mudah diakses			
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.999.960	28.999.960
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
			persentase data Statistik sektoral yang diolah			
				Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	142.799.520	142.799.520
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
				Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	142.799.520	142.799.520
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
			Indeks KAMI			
				Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	78.526.420	78.526.420
			Persentase Perangkat Daerah yang telah mendapat layanan keamanan informasi			
				Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	78.526.420	78.526.420
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar			
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.475.051.257	4.683.249.670
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan			
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	317.791.500	323.991.500
			Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk			
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	317.791.500	323.991.500
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
			Persentase Bahan Pustaka yang dilestarikan			
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	16.600.000	16.600.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kearsipan			
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	265.829.500	241.797.500

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Tingkat Ketersediaan Arsip			
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	265.829.500	241.797.500
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
			Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip			
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	71.908.750	74.767.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)			
				Sekretariat Daerah	95.760.800	122.760.800
			Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)			
				Sekretariat Daerah	35.775.237.265	44.838.593.957
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
			Nilai LPPD			
				Sekretariat Daerah	358.199.000	386.500.000
			Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat			
				Sekretariat Daerah	12.461.393.280	11.454.208.680
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah			
				Sekretariat Daerah	432.832.700	423.524.200
			Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan			
				Sekretariat Daerah	545.462.400	793.231.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern			
				Sekretariat DPRD	452.370.000	451.200.000
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)			
				Sekretariat DPRD	46.245.149.945	47.418.771.232
			Persentase fasilitasi pelaksanaan reses			
				Sekretariat DPRD	20.415.900.000	30.415.900.000
			Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas			
				Sekretariat DPRD	20.415.900.000	30.415.900.000
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
			Persentase fasilitasi pelaksanaan reses			
				Sekretariat DPRD	1.162.305.000	1.162.305.000
			Persentase fasilitasi pelaksanaan reses			
				Sekretariat DPRD	1.095.064.800	1.095.064.800
			Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas			
				Sekretariat DPRD	2.257.369.800	2.257.369.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI)			
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	8.675.882.042	9.781.794.276
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
			PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH YANG TEPAT WAKTU			
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.481.852.840	1.568.407.854
			PERSENTASE PERENCANAAN DAERAH YANG SELARAS			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.885.515.640	1.945.866.154
				PERSENTASE PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	403.662.800	377.458.300
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
				INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	256.453.700	256.453.700
				INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	453.840.900	406.705.300
				INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEREKONOMIAN DAN SDA		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	150.293.000	150.293.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern		
				Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	957.331.959	1.532.617.840
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)		
				Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	41.264.248.803	48.679.015.926
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
				Persentase capaian Dana Transfer		
				Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	225.423.702.900	225.410.302.900
				Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik		
				Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	225.423.702.900	225.410.302.900
				Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik		
				Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	225.423.702.900	225.410.302.900
				Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik		
				Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	225.423.702.900	225.410.302.900
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
				Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib		
				Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	501.221.750	540.730.450
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
				Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
				Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.047.700.137	2.035.961.517
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.680.697.034	9.613.052.863
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
				Indeks Profesional ASN pada dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.605.346.800	3.334.479.700
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
			Indeks Profesional ASN pada dimensi Kompetensi			
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.103.138.400	3.451.597.400
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
			PERSENTASE INOVASI YANG DITERAPKAN			
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.355.869.200	1.332.412.200
			PERSENTASE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINDAKLANJUTI			
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.355.869.200	1.332.412.200
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Inspektorat Daerah			
				Inspektorat Daerah	9.529.025.532	11.393.767.648
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Inspektorat Daerah			
				Inspektorat Daerah	3.354.500	3.354.500
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)			
				Inspektorat Daerah	1.006.530.000	946.480.000
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan APIP			
				Inspektorat Daerah	1.045.950.000	949.223.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar			
				Kecamatan Kertak Hanyar	4.210.587.055	4.532.170.721
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar			
				Kecamatan Kertak Hanyar	2.560.000	2.560.000
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Astambul			
				Kecamatan Astambul	2.282.840.851	2.390.840.851
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut			
				Kecamatan Gambut	4.109.660.758	4.256.807.434
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Karang Intan			
				Kecamatan Karang Intan	2.505.522.247	2.718.681.057
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura			
				Kecamatan Martapura	8.316.595.453	8.900.460.559
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio			
				Kecamatan Aranio	1.935.828.083	2.330.048.163
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)			
				Kecamatan Sungai Tabuk	242.779.008	239.604.008
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk			
				Kecamatan Sungai Tabuk	2.540.790.550	3.078.860.728
			Bimbingan Teknis Implementase Peraturan Perundang Undangan			
				Kecamatan Aluh-Aluh	1.400.000	1.400.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Kecamatan Aluh-Aluh	45.487.480	80.508.620
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
				Kecamatan Aluh-Aluh	1.083.588.166	1.610.965.196
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
				Kecamatan Aluh-Aluh	79.134.500	170.300.495
				Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor		
				Kecamatan Aluh-Aluh	78.872.080	123.392.760
				Penyediaan Surat Menyurat		
				Kecamatan Aluh-Aluh	199.058.800	174.370.800
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
				Kecamatan Aluh-Aluh	3.396.500	3.396.500
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Kecamatan Aluh-Aluh	19.200.000	19.200.000
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Mataraman		
				Kecamatan Mataraman	2.253.123.377	2.375.372.746
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat		
				Kecamatan Simpang Empat	1.887.089.166	2.027.984.922
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Pengaron		
				Kecamatan Pengaron	2.262.107.906	2.423.507.906
				Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan Perangkat Daerah		
				Kecamatan Pengaron	1.867.256.106	1.869.906.620
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan		
				Kecamatan Pengaron	1.500.000	1.500.000
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan sungai Pinang		
				Kecamatan Sungai Pinang	1.254.507.928	1.467.733.545
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang		
				Kecamatan Sungai Pinang	322.652.500	407.752.500
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang		
				Kecamatan Sungai Pinang	84.735.105	107.635.105
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru		
				Kecamatan Beruntung Baru	2.068.374.742	2.220.398.591
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat		
				Kecamatan Martapura Barat	2.012.187.271	2.233.317.579
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sambung Makmur		
				Kecamatan Sambung Makmur	4.368.000	3.078.000
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan Sambung Makmur		
				Kecamatan Sambung Makmur	1.758.003.199	1.921.950.343
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Timur		
				Kecamatan Martapura Timur	2.477.926.043	2.846.335.037
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Paramasan		
				Kecamatan Paramasan	1.802.527.776	2.447.443.007
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur		
				Kecamatan Tatah Makmur	2.071.034.382	2.251.269.732
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Telaga Bauntung		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Kecamatan Telaga Bauntung	1.539.373.378	1.555.826.406
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan		
				Kecamatan Telaga Bauntung	437.535.000	534.322.580
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Cintapuri Darussalam		
				Kecamatan Cinta Puri Darussalam	1.950.325.580	2.078.159.361
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		
				Kecamatan Kertak Hanyar	11.250.000	11.250.000
				Kecamatan Astambul	18.170.000	18.170.000
				Kecamatan Gambut	70.080.000	70.080.000
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		
				Kecamatan Karang Intan	10.977.500	10.977.500
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Karang Intan	10.977.500	10.977.500
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		
				Kecamatan Martapura	5.414.000	5.414.000
				Kecamatan Aranio	13.468.300	60.408.300
				Kecamatan Sungai Tabuk	6.000.000	3.000.000
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		
				Kecamatan Aluh-Aluh	69.200.000	65.037.500
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
				Kecamatan Aluh-Aluh	5.000.000	5.000.000
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		
				Kecamatan Mataraman	50.500.000	50.500.000
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		
				Kecamatan Simpang Empat	9.405.000	9.405.000
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan		
				Kecamatan Pengaron	9.510.000	9.510.000
				Persentase fasilitasi kewenangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan yang terlaksana		
				Kecamatan Pengaron	8.538.000	8.538.000
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		
				Kecamatan Sungai Pinang	10.230.000	10.230.000
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		
				Kecamatan Beruntung Baru	16.433.000	16.433.000
				Persentase Fasilitasi kewenangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan yang terlaksana		
				Kecamatan Martapura Barat	14.900.000	16.900.000
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		
				Kecamatan Martapura Barat	4.200.000	4.200.000
				Persentase Fasilitasi Pelayanan Terhadap masyarakat di kecamatan		
				Kecamatan Martapura Barat	6.300.000	4.200.000
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		
				Kecamatan Sambung Makmur	9.880.000	11.100.000
				Kecamatan Martapura Timur	12.480.000	12.480.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		
				Kecamatan Paramasan	8.400.000	8.400.000
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		
				Kecamatan Tatah Makmur	6.369.300	6.369.300
				Kecamatan Telaga Bauntung	25.200.000	27.300.000
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		
				Kecamatan Cinta Puri Darussalam	9.114.000	9.114.000
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
				Kecamatan Kertak Hanyar	312.921.600	512.921.600
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		
				Kecamatan Kertak Hanyar	61.700.000	61.700.000
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
				Kecamatan Kertak Hanyar	311.218.550	511.218.550
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
				Kecamatan Kertak Hanyar	325.330.050	525.330.050
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		
				Kecamatan Astambul	57.874.000	57.874.000
				Kecamatan Gambut	829.050.000	1.229.050.000
				Kecamatan Karang Intan	70.589.000	67.689.000
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		
				Kecamatan Martapura	2.663.929.653	4.063.929.653
				Kecamatan Aranio	64.486.600	64.486.600
				Kecamatan Sungai Tabuk	476.228.100	669.928.100
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa		
				Kecamatan Aluh-Aluh	60.076.400	59.076.400
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		
				Kecamatan Mataraman	62.700.000	60.060.000
				Kecamatan Simpang Empat	41.804.500	41.804.500
				Persentase koordinasi danfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan		
				Kecamatan Pengaron	48.613.500	41.663.500
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		
				Kecamatan Sungai Pinang	56.317.000	56.317.000
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		
				Kecamatan Beruntung Baru	58.145.500	64.245.500
				Kecamatan Martapura Barat	63.128.000	63.128.000
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		
				Kecamatan Sambung Makmur	64.338.000	58.138.000
				Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				Kecamatan Sambung Makmur	64.338.000	58.138.000
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		
				Kecamatan Martapura Timur	45.407.000	45.407.000
				persentase koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan		
				Kecamatan Paramasan	49.000.000	44.000.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan			
				Kecamatan Tata Makmur	48.286.500	48.286.500
				Kecamatan Telaga Bauntung	43.550.000	43.550.000
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan			
				Kecamatan Cinta Puri Darussalam	58.673.800	58.673.800
			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan			
				Kecamatan Cinta Puri Darussalam	58.673.800	58.673.800
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan			
				Kecamatan Kertak Hanyar	9.100.000	4.200.000
				Kecamatan Astambul	12.484.000	12.484.000
				Kecamatan Gambut	2.450.000	2.450.000
				Kecamatan Karang Intan	25.000.000	25.000.000
				Kecamatan Martapura	5.414.000	5.414.000
				Kecamatan Aranio	6.298.000	6.298.000
				Kecamatan Sungai Tabuk	8.674.000	5.924.000
			Persentase Fasilitasi Penanganan Trantbumlinmas			
				Kecamatan Aluh-Aluh	9.250.000	5.000.000
			Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan			
				Kecamatan Aluh-Aluh	9.372.800	9.961.200
			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan			
				Kecamatan Mataraman	6.000.000	6.000.000
				Kecamatan Simpang Empat	10.806.800	10.806.800
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan			
				Kecamatan Pengaron	4.552.000	3.152.000
			Persentase koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan			
				Kecamatan Pengaron	3.752.000	1.652.000
			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan			
				Kecamatan Sungai Pinang	20.233.000	20.233.000
			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan			
				Kecamatan Beruntung Baru	5.334.000	5.334.000
			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan			
				Kecamatan Martapura Barat	6.300.000	6.300.000
			Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtbumlinmas			
				Kecamatan Sambung Makmur	11.605.000	15.505.000
			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan			
				Kecamatan Martapura Timur	8.320.000	8.320.000
			Persentase koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan			
				Kecamatan Paramasan	17.500.000	17.500.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan		
				Kecamatan Tatak Makmur	9.700.000	9.700.000
				Kecamatan Telaga Bauntung	9.600.000	9.600.000
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan		
				Kecamatan Cinta Puri Darussalam	3.375.000	3.375.000
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan		
				Kecamatan Cinta Puri Darussalam	3.375.000	3.375.000
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				Kecamatan Kertak Hanyar	142.560.000	146.385.000
				Kecamatan Astambul	92.752.000	92.752.000
				Kecamatan Gambut	1.336.580.000	1.336.580.000
				Kecamatan Karang Intan	179.273.000	173.973.000
				Kecamatan Martapura	122.936.000	122.936.000
				Kecamatan Aranio	99.079.000	99.079.000
				Kecamatan Sungai Tabuk	129.595.000	126.595.000
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah		
				Kecamatan Aluh-Aluh	82.032.500	58.129.850
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				Kecamatan Mataraman	51.080.000	51.680.000
				Kecamatan Simpang Empat	91.065.600	97.231.600
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan		
				Kecamatan Pengaron	105.813.000	105.813.000
				Persentase penyelenggaraan urusanpemerintah umum		
				Kecamatan Pengaron	105.813.000	105.813.000
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				Kecamatan Sungai Pinang	147.607.000	147.607.000
				Kecamatan Beruntung Baru	138.198.000	137.844.000
				Kecamatan Martapura Barat	167.279.000	167.279.000
				Kecamatan Sambung Makmur	106.291.100	105.256.100
				Kecamatan Martapura Timur	110.891.000	110.891.000
				Kecamatan Paramasan	100.177.000	100.177.000
				Kecamatan Tatak Makmur	110.703.000	110.703.000
				Kecamatan Telaga Bauntung	72.550.000	82.000.000
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan		
				Kecamatan Cinta Puri Darussalam	111.507.000	112.407.000
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				Kecamatan Cinta Puri Darussalam	111.507.000	112.407.000
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
				Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Kecamatan Kertak Hanyar	20.000.000	20.000.000
				Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Kecamatan Astambul	8.150.000	8.150.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Kecamatan Gambut	14.876.000	14.876.000
				Kecamatan Karang Intan	39.234.000	39.234.000
				Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan		
				Kecamatan Martapura	14.300.000	14.300.000
				Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Kecamatan Aranio	18.676.000	16.240.000
				Kecamatan Sungai Tabuk	8.000.000	8.000.000
				Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Aluh-Aluh	13.235.700	12.235.700
				Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Kecamatan Mataraman	6.000.000	6.000.000
				Kecamatan Simpang Empat	17.597.600	17.597.600
				Persentase Fasilitas pembinaan dan pengawasan desa		
				Kecamatan Pengaron	7.654.000	5.554.000
				Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Kecamatan Sungai Pinang	9.676.500	9.676.500
				Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Beruntung Baru	18.179.000	18.179.000
				Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Kecamatan Martapura Barat	16.500.000	16.500.000
				Kecamatan Sambung Makmur	83.011.000	51.349.000
				Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Kecamatan Martapura Timur	22.219.700	20.659.900
				Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Kecamatan Paramasan	39.502.500	37.002.500
				Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Kecamatan Tatah Makmur	10.400.000	10.400.000
				Kecamatan Telaga Bauntung	5.000.000	4.500.000
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan		
				Kecamatan Cinta Puri Darussalam	23.552.000	23.552.000
				Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Kecamatan Cinta Puri Darussalam	23.552.000	23.552.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.732.633.169	5.850.978.030
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
				Persentase penduduk yang mendapat pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran Kebangsaan		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.536.728.480	4.774.478.480
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
				Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.467.979.900	32.214.764.900
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
				Persentase Ormas yang dibina		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	158.280.000	146.080.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
			Persentase fasilitasi kegiatan P4GN dan FKUB yang terlaksana			
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	554.190.680	754.162.680
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
			Persentase Penanganan Konflik Sosial.			
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	990.263.540	1.006.420.540
57	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung ketahanan bencana					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang			
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	502.421.400	502.421.300
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
			Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani			
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	36.650.000	36.650.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.178.831.185	5.856.477.180
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
			Indeks meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana			
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	403.327.900	623.882.700
			Indeks Meningkatnya Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana			
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.239.552.201	2.802.927.201
			Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana			
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.761.049.701	3.531.229.501
			Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana			
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	539.230.400	759.785.200
			Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana			
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.103.649.701	2.667.024.701
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan dan Permukiman			
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	14.350.471.039	15.311.556.144
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
			Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia			
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	315.499.900	515.499.900
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
			Tingkat Pencemaran Air			
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	813.170.480	733.006.379
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
			Persentase Lokasi Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani			
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	3.474.387.672	4.474.543.172

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
			Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi			
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	77.503.730	77.503.730
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
			Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup			
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	78.406.820	78.406.820
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				
			Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup			
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	33.865.000	33.865.000
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
			Persentase Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan			
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	130.000.000	117.500.000
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
			Persentase Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang terselesaikan			
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	31.430.000	18.929.800
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
			Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga			
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	16.827.287.137	21.731.697.347
				UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	5.280.997.500	8.366.297.670
67	01. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan			
				Dinas Pendidikan	471.824.198.804	491.942.747.836
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
			0Angka partisipasi sekolah (APS) SD			
				Dinas Pendidikan	26.306.596.680	26.359.540.680
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD			
				Dinas Pendidikan	14.572.816.591	14.990.212.391
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			
				Dinas Pendidikan	104.704.189.743	107.145.875.759
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP			
				Dinas Pendidikan	50.734.974.359	59.640.786.277
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD			
				Dinas Pendidikan	104.704.189.743	107.145.875.759
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP			
				Dinas Pendidikan	50.734.974.359	59.640.786.277
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Pendidikan	78.397.593.063	80.786.335.079
			Angka partisipasi sekolah (APS) SMP			
				Dinas Pendidikan	26.306.596.680	26.359.540.680
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP			
				Dinas Pendidikan	24.428.377.679	33.281.245.597
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
			Persentase implementasi penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum			
				Dinas Pendidikan	34.695.000	34.695.000
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
			Rasio Guru - Siswa jenjang SD			
				Dinas Pendidikan	61.177.800	61.177.800
			Rasio Guru - Siswa jenjang SMP			
				Dinas Pendidikan	61.177.800	61.177.800
			Rasio Guru - Siswa PAUD			
				Dinas Pendidikan	61.177.800	61.177.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kesehatan			
				Dinas Kesehatan	146.318.029.085	146.118.210.634
			Presentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama			
				Dinas Kesehatan	545.612.400	0
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha			
				Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	149.270.642.719	164.423.031.694
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Dinas Kesehatan	1.209.274.172	1.344.698.407
			0Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama			
				Dinas Kesehatan	16.635.000	39.652.000
			Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama			
				Dinas Kesehatan	119.573.871.783	134.079.205.061
			Persentase puskesmas Terakreditasi Minimal Utama			
				Dinas Kesehatan	2.847.650.432	3.129.775.506
			Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama			
				Dinas Kesehatan	3.479.483.038	4.133.210.073
			Persentase Puskesmas Terakreditasi minimal utama			
				Dinas Kesehatan	1.169.485.542	1.172.760.942
			Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama			
				Dinas Kesehatan	10.163.400.958	10.810.808.509
			Persentase Puskesmas Terakredits Minimal Utama			
				Dinas Kesehatan	1.280.548.600	1.498.503.028
			Presentase puskesmas terakreditasi minimal utama			
				Dinas Kesehatan	4.238.884.000	5.072.681.782
			Presentase Puskesmas terakreditasi minimal utama			
				Dinas Kesehatan	1.486.917.600	1.769.602.578
			Presentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama			
				Dinas Kesehatan	1.514.908.000	1.662.550.958

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama		
				Dinas Kesehatan	71.134.000	81.134.000
				Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP		
				Dinas Kesehatan	20.140.000	20.140.000

				Dinas Kesehatan	41.246.000	41.246.000
				Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar		
				Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	12.419.470.724	11.500.280.295
				Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit		
				Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	12.419.470.724	11.500.280.295
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
				Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar		
				Dinas Kesehatan	800.531.200	2.204.731.200
				Persentase Pelayanan Kesehatan Keadaan Tertentu oleh Tenaga Kesehatan RS		
				Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	1.000.000.000	1.000.000.000
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan		
				Dinas Kesehatan	694.203.500	578.626.500
				Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar		
				Dinas Kesehatan	34.807.500	0
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	321.780.000	1.173.632.600

				Dinas Kesehatan	213.445.000	432.280.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.568.432.501	11.204.593.860
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Diberdayakan		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	938.310.900	948.310.900
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	586.107.300	563.639.300
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.419.576.000	1.423.076.000
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.290.275.000	1.290.275.000
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tersalurkan			
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	338.400.000	335.395.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5.028.787.325	5.339.902.476
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
			Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang Tersusun			
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	35.820.000	35.820.000
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.126.520.500	1.044.110.500
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
			Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, PKWT, Struktur Skala Upah Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan			
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	153.596.900	153.596.900
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
			Indeks PUG			
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36.224.000	36.224.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
			Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (Per 100.000 Penduduk Perempuan)			
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32.489.000	32.489.000
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
			Persentase Keluarga Berkualitas			
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	140.101.100	140.101.100
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
			Persentase Elemen Data Terpilah			
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.999.800	11.999.800
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
			Tercapainya IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak)			
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	141.014.000	141.014.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
			IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak)			
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30.494.000	30.494.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.850.293.963	5.945.128.237
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.141.653.563	6.553.811.663
		PROGRAM PENATAAN DESA				
			Persentase Penataan Administrasi Batas Wilayah Desa			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	299.436.000	246.991.000
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				
			Persentase Peningkatan Kerjasama Desa			
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	229.112.000	241.239.000
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
			Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib			
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	145.036.995.178	156.704.086.850
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
			Persentase Desa yang Lembaga Kemasyarakatannya Diberdayakan			
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.364.843.400	2.770.057.400
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
			Median Usia Perempuan Kawin Pertama			
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	58.353.200	131.592.700
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
			Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)			
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.044.807.800	2.134.807.800
			Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)			
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.531.281.900	4.531.281.900
			Tingkat Prevelensi Kontrasepsi Modern (MCPR)			
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.576.089.700	6.666.089.700
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
			Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)			
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.214.317.800	5.214.317.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata			
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.452.422.142	5.558.814.486
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
			Persentase Pemuda Berdaya Saing			
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	651.232.000	651.232.000
			Persentase Pemuda yang berdaya saing			
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	265.255.400	265.362.200
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
			Persentase atlet yang berdaya saing			
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.058.393.500	8.282.518.500
			Persentase Atlet yang berdaya saing			
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	493.071.600	493.782.850
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
			Persentase warisan budaya tak benda kabupaten sebagai budaya tak benda nasional			
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.374.875.300	1.374.875.300
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
			Prosentase topik sejarah yang informasinya akan disebarluaskan			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	25.402.500	25.402.500
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
			Prosentase warisan budaya benda yang telah ditetapkan dan dilestarikan sebagai cagar budaya			
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	299.879.000	299.879.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja ltern (IKKI)			
				Dinas Pertanian	29.344.389.288	29.876.747.741
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
			Persentase Pengembangan Kawasan Ex.Transmigrasi			
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	26.000.500	121.336.500

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Penguatan Ketahanan Ekonomi Yang Inklusif							
		1.1.3. Meningkatnya daya beli masyarakat						
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
				Persentase rekomendasi izin dan pendaftaran usaha yang dikeluarkan				
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	360.000	1.060.000		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang representatif				
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	2.249.240.000	1.949.240.000		
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Persentase koefisien variasi harga antar waktu				
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	190.495.800	190.495.800		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Persentase Tertib Ukur				
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	332.716.696	414.828.696		
		2.1.3 Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital						
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Prosentase destinasi wisata yang representatif				
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.854.687.400	3.748.687.400		
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Prosentase destinasi wisata yang telah dipasarkan				
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.978.642.000	2.700.601.600		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif				
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.040.836.000	1.440.396.000		
		5.1.3 Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata				
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.904.371.388	7.690.618.106		

			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	64.636.000	64.636.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)					
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.600.792.069	2.881.380.070		
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN						
			Berkembangnya Desa Mandiri Pangan						
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	254.875.800	250.182.800		
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
			Ketersediaan Pangan Utama						
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	814.592.300	718.592.300		
			Persentase Stabilitas Harga Pangan						
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	814.592.300	718.592.300		
			Skor PPH Konsumsi						
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	814.592.300	718.592.300		
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						
			Persentase Penurunan Desa rentan rawan Pangan						
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	75.352.400	52.284.400		
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						
			Skor Keamanan Pangan						
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	82.583.940	80.503.949		
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						
			persentase koperasi yang memiliki rekomendasi ijin usaha simpan pinjam						
					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	11.449.600	11.449.600		
			Persentase Rekomendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas pembantu						
					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	11.449.600	11.449.600		
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						
			Persentase Koperasi yang mematuhi aturan perundangan						
					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	53.858.200	53.858.200		
			Persentase KSP dan USP yang mematuhi aturan perundangan						
					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	53.858.200	53.858.200		
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						
			Persentase KSP/ USP Sehat						
					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	103.215.800	103.215.800		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						
			Persentase SDM koperasi (pengawas dan pengurus) yang terlatih						
					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan	155.833.360	155.833.360		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Perdagangan				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						
				Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya					
					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	123.308.000	123.308.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
				Persentase pertumbuhan usaha mikro					
					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	380.841.360	368.786.760		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						
				Persentase Jumlah Usaha Mikro yang meningkat Omzetnya					
					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	296.633.500	296.633.500		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						
				Produksi Perikanan Tangkap					
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	160.298.600	160.298.600		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
				Produksi Perikanan Budidaya					
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	378.569.100	386.597.910		
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						
				Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Di Bidang Perikanan					
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	105.595.600	73.654.500		
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						
				Angka Konsumsi Ikan					
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	202.800.000	202.800.000		
				Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Di Bidang Perikanan					
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	91.600.000	91.600.000		
				Persentase Pertumbuhan Ekspor Produksi Perikanan					
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	111.200.000	111.200.000		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
				Persentase luas lahan pertanian yang didukung sarana pertanian yang berkualitas					
					Dinas Pertanian	1.224.982.006	1.669.909.756		
				Persentase pertumbuhan populasi ternak besar					
					Dinas Pertanian	1.224.982.006	1.669.909.756		
				Persentase pertumbuhan produktivitas tanaman perkebunan unggulan					
					Dinas Pertanian	1.224.982.006	1.669.909.756		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
				Persentase luas lahan yang mendapatkan fasilitasi prasarana pertanian					
					Dinas Pertanian	3.578.588.800	3.193.588.800		
				Persentase luas perkebunan yang mendapatkan fasilitasi prasarana perkebunan					
					Dinas Pertanian	3.578.588.800	3.193.588.800		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
				Persentase Jenis Produk Olahan yang dikembangkan					
					Dinas Pertanian	1.088.680.392	1.253.167.592		
				Persentase Menurunnya Angka Mortalitas Ternak Besar					
					Dinas Pertanian	283.535.260	432.848.460		
				Persentase Menurunnya Angka Mortalitas Ternak Besar					
					Dinas Pertanian	805.145.132	820.319.132		
				Persentase produk asal hewan yang layak dikonsumsi					
					Dinas Pertanian	1.088.680.392	1.253.167.592		
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						
				Persentase kinerja pengendalian dan penanggulan bencana pertanian					
					Dinas Pertanian	1.705.436.500	1.672.342.500		
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						
				Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi izin usaha					
					Dinas Pertanian	81.991.000	78.528.800		
				Persentase usaha peternakan yang tertib administrasi					
					Dinas Pertanian	81.991.000	78.528.800		
				Persentase Usaha Perkebunan yang Tertib administrasi					
					Dinas Pertanian	81.991.000	78.528.800		
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
				Persentase kelompok tani yang mandiri					
					Dinas Pertanian	2.158.204.400	2.119.134.400		
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
				PERSENTASE REKOMENDASI IZIN DAN PENDAFTARAN USAHA YANG DIKELUARKAN					
					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.270.000	920.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						
				PERSENTASE PRODUK UNGGULAN DAERAH YANG DIKEMBANGKAN					
					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	365.226.400	365.226.400		
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
				PERSENTASE PRODUK DAERAH YANG DIPROMOSIKAN					
					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	8.791.000	13.791.000		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
				Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri (%)					
					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.590.107.524	1.714.254.024		
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						
				Persentase IKM yang Memiliki Izin					
					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	18.716.000	18.716.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						
				Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (berdasarkan permendagri 18 2020)					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	37.938.000	37.938.000	
2	2. Peningkatan Kualitas Sdm Yang Berdaya Saing Dan Berkarakter Agamis							
		1.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem kesehatan						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kesehatan				
				Dinas Kesehatan		292.636.058.170	292.236.421.268	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama				
				Dinas Kesehatan		12.898.546.966	15.474.578.392	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
				Dinas Kesehatan		123.910.000	105.970.000	
		1.1.2. Meningkatnya daya saing masyarakat melalui Pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan				
				Dinas Pendidikan		943.648.397.608	983.885.495.672	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				Persentase implementasi penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum				
				Dinas Pendidikan		69.390.000	69.390.000	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Rasio Guru - Siswa jenjang SD				
				Dinas Pendidikan		122.355.600	122.355.600	
				Rasio Guru - Siswa jenjang SMP				
				Dinas Pendidikan		122.355.600	122.355.600	
				Rasio Guru - Siswa PAUD				
				Dinas Pendidikan		122.355.600	122.355.600	
		4.1.2 Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio				
				Kecamatan Aranio		1.200.000	2.000.000	
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Cintapuri Darussalam				
				Kecamatan Cinta Puri Darussalam		3.041.841.460	3.083.309.022	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana				
				Kecamatan Aranio		1.332.000	1.332.000	
		5.1.1 Meningkatnya pengamalan nilai- nilai Pancasila dan nilai-nilai agama;						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		9.465.266.338	11.701.956.060	
		5.1.2 Berkembangnya seni budaya Banjar dan seni budaya religius yang mencerminkan karakter dan kepribadian luhur masyarakat Banjar						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Persentase warisan budaya tak benda kabupaten sebagai budaya tak benda nasional					
					Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.749.750.600	2.749.750.600		
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						
				Prosentase topik sejarah yang informasinya akan disebarluaskan					
					Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	50.805.000	50.805.000		
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						
				Prosentase warisan budaya benda yang telah ditetapkan dan dilestarikan sebagai cagar budaya					
					Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	599.758.000	599.758.000		
		5.1.3 Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata					
					Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	10.954.440.284	11.167.224.972		

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
				0Angka partisipasi sekolah (APS) SD					
					Dinas Pendidikan	26.306.596.680	26.359.540.680		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD					
					Dinas Pendidikan	14.572.816.591	14.990.212.391		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD					
					Dinas Pendidikan	104.704.189.743	107.145.875.759		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP					
					Dinas Pendidikan	50.734.974.359	59.640.786.277		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD					
					Dinas Pendidikan	104.704.189.743	107.145.875.759		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP					
					Dinas Pendidikan	50.734.974.359	59.640.786.277		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD					
					Dinas Pendidikan	78.397.593.063	80.786.335.079		
				Angka partisipasi sekolah (APS) SMP					
					Dinas Pendidikan	26.306.596.680	26.359.540.680		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP					
					Dinas Pendidikan	24.428.377.679	33.281.245.597		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Presentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama					
					Dinas Kesehatan	545.612.400	0		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha					
					Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	149.270.642.719	164.423.031.694		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Dinas Kesehatan	1.209.274.172	1.344.698.407		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				0Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama					
					Dinas Kesehatan	16.635.000	39.652.000		
				Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama					
					Dinas Kesehatan	113.122.678.300	126.341.915.865		
				Persentase puskesmas Terakreditasi Minimal Utama					
					Dinas Kesehatan	2.863.110.432	3.129.775.506		
				Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama					
					Dinas Kesehatan	3.479.483.038	4.133.210.073		
				Persentase Puskesmas Terakreditasi minimal utama					
					Dinas Kesehatan	1.169.485.542	1.172.760.942		
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama					
					Dinas Kesehatan	10.163.400.958	10.810.808.509		
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama					
					Dinas Kesehatan	1.280.548.600	1.498.503.028		
				Presentase puskesmas terakreditasi minimal utama					
					Dinas Kesehatan	4.238.884.000	5.072.681.782		
				Presentase Puskesmas terakreditasi minimal utama					
					Dinas Kesehatan	1.486.917.600	1.769.602.578		
				Presentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama					
					Dinas Kesehatan	1.514.908.000	1.662.550.958		
				Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama					
					Dinas Kesehatan	71.134.000	81.134.000		
				Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP					
					Dinas Kesehatan	20.140.000	20.140.000		

					Dinas Kesehatan	41.246.000	41.246.000		
				Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar					
					Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	12.419.470.724	11.500.280.295		
				Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit					
					Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	12.419.470.724	11.500.280.295		
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar					
					Dinas Kesehatan	800.531.200	2.204.731.200		
				Persentase Pelayanan Kesehatan Keadaan Tertentu oleh Tenaga Kesehatan RS					
					Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	1.000.000.000	1.000.000.000		
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan					
					Dinas Kesehatan	694.203.500	578.626.500		
				Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar					
					Dinas Kesehatan	34.807.500	0		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Dinas Kesehatan	259.825.000	1.120.647.600		

					Dinas Kesehatan	213.445.000	432.280.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.568.432.501	11.204.593.860		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Diberdayakan					
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	938.310.900	948.310.900		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial					
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	586.107.300	563.639.300		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial					
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.419.576.000	1.423.076.000		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial					
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.290.275.000	1.290.275.000		
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
				Persentase Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tersalurkan					
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	338.400.000	335.395.500		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5.067.262.625	5.378.377.776		
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						
				Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang Tersusun					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	35.820.000	35.820.000		
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja					
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.126.520.500	1.044.110.500		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
				Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota					
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	165.788.800	161.888.800		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
				Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, PKWT, Struktur Skala Upah Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan					
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	153.596.900	153.596.900		
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
				Indeks PUG					
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.912.852.800	1.912.852.800		
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
				Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (Per 100.000 Penduduk Perempuan)					
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32.489.000	32.489.000		
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
				Persentase Keluarga Berkualitas					
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	140.101.100	140.101.100		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
				Persentase Elemen Data Terpilah					
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.999.800	11.999.800		
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
				Tercapainya IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak)					
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	141.014.000	141.014.000		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak)					
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30.494.000	30.494.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)					
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.850.293.963	5.945.128.237		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.141.653.563	6.553.811.663		
			PROGRAM PENATAAN DESA						
				Persentase Penataan Administrasi Batas Wilayah Desa					
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	299.436.000	246.991.000		
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						
				Persentase Peningkatan Kerjasama Desa					
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	229.112.000	241.239.000		
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
				Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib					
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	145.036.995.178	156.704.086.850		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
				Persentase Desa yang Lembaga Kemasyarakatannya Diberdayakan					
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.364.843.400	2.770.057.400		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
				Median Usia Perempuan Kawin Pertama					
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	58.353.200	131.592.700		
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						
				Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)					
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.044.807.800	2.134.807.800		
				Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)					
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.531.281.900	4.531.281.900		
				Tingkat Prevelensi Kontrasepsi Modern (MCPR)					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.576.089.700	6.666.089.700		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
				Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)					
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.214.317.800	5.214.317.800		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
				Persentase Pemuda Berdaya Saing					
					Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	651.232.000	651.232.000		
				Persentase Pemuda yang berdaya saing					
					Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	265.255.400	265.362.200		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
				Persentase atlet yang berdaya saing					
					Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.058.393.500	8.282.518.500		
				Persentase Atlet yang berdaya saing					
					Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	493.071.600	493.782.850		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Itern (IKKI)					
					Dinas Pertanian	29.344.389.288	29.876.747.741		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI						
				Persentase Pengembangan Kawasan Ex.Transmigrasi					
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	50.000.000	145.336.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana					
					Kecamatan Cinta Puri Darussalam	9.114.000	9.114.000		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan					
					Kecamatan Pengaron	4.552.000	3.152.000		
				Peresentase koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman danketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan					
					Kecamatan Pengaron	3.752.000	1.652.000		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan					
					Kecamatan Cinta Puri Darussalam	3.375.000	3.375.000		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan					
					Kecamatan Cinta Puri Darussalam	3.375.000	3.375.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan					
					Kecamatan Pengaron	105.813.000	105.813.000		
				Persentase penyelenggaraan urusanpemerintah umum					
					Kecamatan Pengaron	105.813.000	105.813.000		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan					
					Kecamatan Cinta Puri Darussalam	111.507.000	112.407.000		
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
					Kecamatan Cinta Puri Darussalam	111.507.000	112.407.000		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
				Persentase Fasilitas pembinaan dan pengawasan desa					
					Kecamatan Pengaron	7.654.000	5.554.000		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan					
					Kecamatan Cinta Puri Darussalam	23.552.000	23.552.000		
				Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					
					Kecamatan Cinta Puri Darussalam	23.552.000	23.552.000		
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						
				Persentase penduduk yang mendapat pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran Kebangsaan					
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.536.728.480	4.774.478.480		
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
				Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik					
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.467.979.900	32.214.764.900		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						
				Persentase Ormas yang dibina					
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	158.280.000	146.080.000		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						
				Persentase fasilitas kegiatan P4GN dan FKUB yang terlaksana					
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	554.190.680	754.162.680		
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						
				Persentase Penanganan Konflik Sosial.					
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	990.263.540	1.006.420.540		
3	3. Penguatan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar								
		2.1.1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap					
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	145.550.268.878	177.848.177.759		
				Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap					
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	145.550.268.878	177.848.177.759		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
				Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)					
					Dinas Perhubungan	239.870.200	399.436.715		
				Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi					
					Dinas Perhubungan	239.870.200	399.436.715		
				V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar					
					Dinas Perhubungan	239.870.200	399.436.715		
		2.2.7 Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pematapan infrastruktur serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah							
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
				Persentasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik					
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9.949.268.163	11.890.018.163		
				Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten					
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9.949.268.163	11.890.018.163		
				Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten					
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9.949.268.163	11.890.018.163		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
				Persentase Akses Sanitasi Aman					
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	12.510.013.981	12.828.317.381		
				Persentase Akses Sanitasi Layak					
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	12.510.013.981	12.828.317.381		
				Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah					
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	12.510.013.981	12.828.317.381		
		3.1.1 Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah							
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						
				Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai					
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	29.207.438.432	28.863.754.442		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						
				Persentase Pemanfaatan Bangunan yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.529.414.532	1.913.414.532			
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							
				Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan						
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	47.666.829.536	46.578.156.376			
		3.1.2 Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni								
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							
				Persentase Perumahan Yang Dibangun sesuai dengan dokumen teknis atau siteplan						
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	653.993.400	653.993.400			

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
				Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama						
					Dinas Kesehatan	1.920.000	0			
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
				Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman dan Layak						
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	21.987.236.801	24.463.431.581			
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							
				Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase						
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	11.340.977.200	12.936.944.564			
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi						
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	201.480.000	273.070.000			
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							
				Persentase Perumahan Yang Dibangun sesuai dengan dokumen teknis atau siteplan						
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	161.977.460	182.527.460			
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							
				Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani						
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	2.421.089.292	3.747.571.622			
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH							
				Persentase pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh						
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	557.854.500	510.253.050			
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
				Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU						
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	3.568.805.599	8.405.755.955			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Nilai IKKI Perangkat Daerah					
					Dinas Perhubungan	5.920.489.282	6.794.833.928		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
				Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)					
					Dinas Perhubungan	1.052.563.964	1.097.563.964		
				Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi					
					Dinas Perhubungan	258.833.025	258.833.025		
				V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar					
					Dinas Perhubungan	1.190.184.000	4.235.484.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
				Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak					
					Dinas Perhubungan	686.987.700	689.987.700		
				Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal					
					Dinas Perhubungan	16.516.400	40.329.200		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
				INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN					
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	20.798.000	20.798.000		
4	4. Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Ketahanan Bencana								

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						
				Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang					
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	502.421.400	502.421.300		
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
				Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani					
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	223.483.000	223.483.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.178.831.185	5.856.477.180		
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
				Indeks meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana					
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	403.327.900	623.882.700		
				Indeks Meningkatnya Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana					
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.239.552.201	2.802.927.201		
				Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana					
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.761.049.701	3.531.229.501		
				Indeks kekuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana					
					Badan Penanggulangan	539.230.400	759.785.200		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Bencana Daerah			
					Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.103.649.701	2.667.024.701	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan dan Permukiman			
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	14.350.471.039	15.311.556.144	
					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
					Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia			
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	315.499.900	515.499.900	
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
					Tingkat Pencemaran Air			
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	748.264.340	668.100.239	
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
					Persentase Lokasi Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani			
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	3.474.387.672	4.474.543.172	
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
					Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi			
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	77.503.730	77.503.730	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
					Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup			
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	78.406.820	78.406.820	
					PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
					Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup			
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	33.865.000	33.865.000	
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
					Persentase Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang terselesaikan			
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	31.430.000	18.929.800	
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
					Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga			
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	16.827.287.137	21.731.697.347	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	5.280.997.500	8.366.297.670		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan					
				Kecamatan Pengaron		1.829.468.706	1.832.719.220		
				Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan Perangkat Daerah					
				Kecamatan Pengaron		1.829.468.706	1.832.719.220		
5	5. Transformasi Pelayanan Publik Yang Melayani								
		2.1.1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan					
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		14.723.391.369	18.882.992.614		
		3.1.1 Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah							
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						
				Persentase pelaksanaan fasilitasi sengketa tanah					
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		270.742.200	270.742.200		
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH						
				Persentase luasan aset tanah pemkab yang tersertifikasi					
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		1.130.000.000	1.617.296.000		
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						
				Persentase aset tanah pemkab yang terinventarisir dan dipatenkan					
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		45.820.400	45.820.400		
		4.1.2 Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		16.031.057.622	16.647.265.784		
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
				Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk					
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		132.820.000	132.820.000		
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL						
				Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil					
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		238.185.400	258.185.400		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu					
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		16.798.361.222	22.816.423.624		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Astambul					
				Kecamatan Astambul		4.565.681.702	4.781.681.702		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut					
					Kecamatan Gambut	8.070.549.516	8.387.470.868		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Karang Intan					
					Kecamatan Karang Intan	5.011.044.494	5.437.362.114		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio					
					Kecamatan Aranio	3.870.456.166	4.658.096.326		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk					
					Kecamatan Sungai Tabuk	5.081.581.100	6.157.721.456		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Mataraman					
					Kecamatan Mataraman	4.506.246.754	4.750.745.492		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat					
					Kecamatan Simpang Empat	3.774.178.332	4.055.969.844		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang					
					Kecamatan Sungai Pinang	482.962.000	488.562.000		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru					
					Kecamatan Beruntung Baru	4.136.749.484	4.440.797.182		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat					
					Kecamatan Martapura Barat	4.024.374.542	4.466.635.158		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Timur					
					Kecamatan Martapura Timur	4.955.852.086	5.692.670.074		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Paramasan					
					Kecamatan Paramasan	3.605.055.552	4.894.886.014		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur					
					Kecamatan Tatah Makmur	4.142.068.764	4.502.539.464		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Telaga Bauntung					
					Kecamatan Telaga Bauntung	3.078.746.756	3.111.652.812		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Cintapuri Darussalam					
					Kecamatan Cinta Puri Darussalam	858.809.700	1.073.009.700		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana					
					Kecamatan Astambul	36.340.000	36.340.000		
					Kecamatan Gambut	140.160.000	140.160.000		
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
					Kecamatan Karang Intan	21.955.000	21.955.000		
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana					
					Kecamatan Martapura	10.828.000	10.828.000		
					Kecamatan Aranio	26.936.600	120.816.600		
					Kecamatan Sungai Tabuk	12.000.000	6.000.000		
					Kecamatan Mataraman	101.000.000	101.000.000		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Kecamatan Martapura Barat	8.400.000	8.400.000		
					Kecamatan Sambung Makmur	19.760.000	22.200.000		
					Kecamatan Tatah Makmur	12.738.600	12.738.600		
					Kecamatan Telaga Bauntung	50.400.000	54.600.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan					
					Kecamatan Astambul	115.748.000	115.748.000		
					Kecamatan Gambut	1.658.100.000	2.458.100.000		
					Kecamatan Karang Intan	141.178.000	135.378.000		
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan					
					Kecamatan Martapura	5.327.859.306	8.127.859.306		
					Kecamatan Aranio	128.973.200	128.973.200		
					Kecamatan Sungai Tabuk	952.456.200	1.339.856.200		
					Kecamatan Mataraman	125.400.000	120.120.000		
					Kecamatan Simpang Empat	83.609.000	83.609.000		
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan					
					Kecamatan Martapura Barat	126.256.000	126.256.000		
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan					
					Kecamatan Martapura Timur	90.814.000	90.814.000		
					Kecamatan Tatah Makmur	96.573.000	96.573.000		
					Kecamatan Telaga Bauntung	87.100.000	87.100.000		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
				Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan					
					Kecamatan Astambul	24.968.000	24.968.000		
					Kecamatan Gambut	4.900.000	4.900.000		
					Kecamatan Karang Intan	50.000.000	50.000.000		
					Kecamatan Martapura	10.828.000	10.828.000		
					Kecamatan Aranio	12.596.000	12.596.000		
					Kecamatan Sungai Tabuk	17.348.000	11.848.000		
					Kecamatan Mataraman	12.000.000	12.000.000		
					Kecamatan Simpang Empat	21.613.600	21.613.600		
					Kecamatan Martapura Barat	12.600.000	12.600.000		
					Kecamatan Tatah Makmur	19.400.000	19.400.000		
					Kecamatan Telaga Bauntung	19.200.000	19.200.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
					Kecamatan Astambul	185.504.000	185.504.000		
					Kecamatan Gambut	2.673.160.000	2.673.160.000		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Kecamatan Karang Intan	358.546.000	347.946.000		
					Kecamatan Martapura	245.872.000	245.872.000		
					Kecamatan Aranio	198.158.000	198.158.000		
					Kecamatan Sungai Tabuk	259.190.000	253.190.000		
					Kecamatan Mataraman	102.160.000	103.360.000		
					Kecamatan Simpang Empat	182.131.200	194.463.200		
					Kecamatan Sungai Pinang	295.214.000	295.214.000		
					Kecamatan Martapura Barat	334.558.000	334.558.000		
					Kecamatan Sambung Makmur	212.582.200	210.512.200		
					Kecamatan Paramasan	200.354.000	200.354.000		
					Kecamatan Tatah Makmur	221.406.000	221.406.000		
					Kecamatan Telaga Bauntung	145.100.000	164.000.000		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
				Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					
					Kecamatan Astambul	20.700.000	20.700.000		
					Kecamatan Gambut	29.752.000	29.752.000		
					Kecamatan Karang Intan	78.468.000	78.468.000		
					Kecamatan Aranio	37.352.000	32.480.000		
					Kecamatan Sungai Tabuk	16.000.000	16.000.000		
					Kecamatan Mataraman	12.000.000	12.000.000		
					Kecamatan Simpang Empat	35.195.200	35.195.200		
					Kecamatan Martapura Barat	33.000.000	33.000.000		
					Kecamatan Sambung Makmur	166.022.000	102.698.000		
					Kecamatan Tatah Makmur	20.800.000	20.800.000		
					Kecamatan Telaga Bauntung	10.000.000	9.000.000		
			4.1.6 Berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian					
					Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	5.223.846.720	6.186.067.531		
			5.1.4 Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja					
					Satuan Polisi Pamong Praja	21.181.019.582	23.048.860.716		

			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
				Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU					
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	15.853.598.500	19.889.874.300		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Nilai IKKI DPKP					
					Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	6.280.661.586	6.570.105.254		
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
				Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan Linmas					
					Satuan Polisi Pamong Praja	756.525.400	1.299.266.000		
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						
				Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran					
					Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	558.885.500	558.885.500		
				Persentase layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi					
					Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	558.885.500	558.885.500		
				Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran					
					Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	558.885.500	558.885.500		
				Persentase layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran					
					Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	558.885.500	558.885.500		
				Persentase layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran					
					Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	558.885.500	558.885.500		
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						
				Persentase Koordinasi, Fasilitas dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria					
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	10.000.000	10.000.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						
				Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan					
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	307.739.400	325.239.400		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Perangkat Daerah yang telah mendapat layanan keamanan informasi					
					Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	2.203.451.702	2.203.451.702		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
				Cakupan Pelaksanaan Diseminasi Dan Distribusi Informasi program prioritas					
					Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	3.891.434.500	5.406.706.500		
				Persentase masyarakat yang menerima informasi publik					
					Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan	3.891.434.500	5.406.706.500		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Persandian				
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					
					Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	2.712.649.603	3.510.080.247		
				Presentase Aplikasi Informatika yang di Bangun / Kembangkan					
					Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	2.712.649.603	3.510.080.247		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern (IKKI)					
					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	701.451.500	907.831.100		
				Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas DKUMPP					
					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	9.581.679.549	10.356.365.590		
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
				Persentase penyelesaian regulasi kemudahan berinvestasi					
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	65.988.500	65.988.500		
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						
				Jumlah Investor Baru					
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26.011.300	85.011.300		
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						
				Indeks Kepuasan Masyarakat					
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	79.299.900	79.299.900		
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
				Persentase LKPM					
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	483.099.900	483.099.900		
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						
				Persentase data dan sistem perizinan yang mudah diakses					
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.999.960	28.999.960		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						
				persentase data Statistik sektoral yang diolah					
					Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	142.799.520	142.799.520		
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
					Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	142.799.520	142.799.520		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
				Indeks KAMI					
					Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	78.526.420	78.526.420		
				Persentase Perangkat Daerah yang telah mendapat layanan keamanan informasi					
					Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	78.526.420	78.526.420		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar					
					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.475.051.257	4.683.249.670		
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
				Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan					
					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	317.791.500	323.991.500		
				Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk					
					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	317.791.500	323.991.500		
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						
				Persentase Bahan Pustaka yang dilestarikan					
					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	16.600.000	16.600.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						
				Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kearsipan					
					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	265.829.500	241.797.500		
				Tingkat Ketersediaan Arsip					
					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	265.829.500	241.797.500		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						
				Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip					
					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	71.908.750	74.767.500		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)					
					Sekretariat Daerah	95.760.800	122.760.800		
				Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)					
					Sekretariat Daerah	35.775.237.265	44.838.593.957		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
				Nilai LPPD					
					Sekretariat Daerah	358.199.000	386.500.000		
				Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat					
					Sekretariat Daerah	12.461.393.280	11.454.208.680		
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
				Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah					
					Sekretariat Daerah	432.832.700	423.524.200		
				Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Sekretariat Daerah	545.462.400	793.231.400		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern					
					Sekretariat DPRD	452.370.000	451.200.000		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)					
					Sekretariat DPRD	46.245.149.945	47.418.771.232		
				Persentase fasilitasi pelaksanaan reses					
					Sekretariat DPRD	20.415.900.000	30.415.900.000		
				Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas					
					Sekretariat DPRD	20.415.900.000	30.415.900.000		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
				Persentase fasilitasi pelaksanaan reses					
					Sekretariat DPRD	1.162.305.000	1.162.305.000		
				Persentase fasilitasi pelaksanaan reses					
					Sekretariat DPRD	1.095.064.800	1.095.064.800		
				Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas					
					Sekretariat DPRD	2.257.369.800	2.257.369.800		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI)					
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	8.692.757.042	9.798.669.276		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
				PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH YANG TEPAT WAKTU					
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.481.852.840	1.568.407.854		
				PERSENTASE PERENCANAAN DAERAH YANG SELARAS					
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.885.515.640	1.945.866.154		
				PERSENTASE PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	403.662.800	377.458.300		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
				INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN					
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	256.453.700	256.453.700		
				INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA					
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	453.840.900	406.705.300		
				INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEREKONOMIAN DAN SDA					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	150.293.000	150.293.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern					
					Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	957.331.959	1.532.617.840		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)					
					Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	41.264.248.803	48.679.015.926		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
				Persentase capaian Dana Transfer					
					Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	225.423.702.900	225.410.302.900		
				Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik					
					Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	225.423.702.900	225.410.302.900		
				Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik					
					Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	225.423.702.900	225.410.302.900		
				Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik					
					Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	225.423.702.900	225.410.302.900		
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
				Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib					
					Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	501.221.750	540.730.450		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
				Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
					Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.047.700.137	2.035.961.517		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern					
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.680.697.034	9.613.052.863		
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
				Indeks Profesional ASN pada dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin					
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.682.539.700	3.411.672.600		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
				Indeks Profesional ASN pada dimensi Kompetensi					
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	3.103.138.400	3.451.597.400		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Daya Manusia				
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
				PERSENTASE INOVASI YANG DITERAPKAN					
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.355.869.200	1.332.412.200		
				PERSENTASE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINDAKLANJUTI					
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.355.869.200	1.332.412.200		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Inspektorat Daerah					
					Inspektorat Daerah	9.529.025.532	11.393.767.648		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Inspektorat Daerah					
					Inspektorat Daerah	3.354.500	3.354.500		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)					
					Inspektorat Daerah	1.006.530.000	946.480.000		
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
				Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan APiP					
					Inspektorat Daerah	1.045.950.000	949.223.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar					
					Kecamatan Kertak Hanyar	4.210.587.055	4.532.170.721		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar					
					Kecamatan Kertak Hanyar	2.560.000	2.560.000		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut					
					Kecamatan Gambut	74.386.000	63.072.000		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura					
					Kecamatan Martapura	8.316.595.453	8.900.460.559		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)					
					Kecamatan Sungai Tabuk	242.779.008	239.604.008		
				Bimbingan Teknis Implementase Peraturan Perundang Undangan					
					Kecamatan Aluh-Aluh	1.400.000	1.400.000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
					Kecamatan Aluh-Aluh	45.487.480	80.508.620		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
					Kecamatan Aluh-Aluh	1.083.588.166	1.610.965.196		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
					Kecamatan Aluh-Aluh	79.134.500	170.300.495		
				Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor					
					Kecamatan Aluh-Aluh	78.872.080	123.392.760		
				Penyediaan Surat Menyurat					
					Kecamatan Aluh-Aluh	199.058.800	174.370.800		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Kecamatan Aluh-Aluh	3.396.500	3.396.500		
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
					Kecamatan Aluh-Aluh	19.200.000	19.200.000		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan					
					Kecamatan Pengaron	2.262.107.906	2.423.507.906		
				Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan Perangkat Daerah					
					Kecamatan Pengaron	1.867.256.106	1.869.906.620		
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan					
					Kecamatan Pengaron	1.500.000	1.500.000		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan sungai Pinang					
					Kecamatan Sungai Pinang	1.254.507.928	1.467.733.545		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang					
					Kecamatan Sungai Pinang	81.621.500	163.921.500		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang					
					Kecamatan Sungai Pinang	84.735.105	107.635.105		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sambung Makmur					
					Kecamatan Sambung Makmur	4.368.000	3.078.000		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan Sambung Makmur					
					Kecamatan Sambung Makmur	1.758.003.199	1.921.950.343		
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan					
					Kecamatan Telaga Bauntung	437.535.000	534.322.580		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana					
					Kecamatan Kertak Hanyar	11.250.000	11.250.000		
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana					
					Kecamatan Karang Intan	10.977.500	10.977.500		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					
					Kecamatan Aluh-Aluh	69.200.000	65.037.500		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					
					Kecamatan Aluh-Aluh	5.000.000	5.000.000		
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana					
					Kecamatan Simpang Empat	9.405.000	9.405.000		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan					
					Kecamatan Pengaron	9.510.000	9.510.000		
				Persentase fasilitasi kewenangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan yang terlaksana					
					Kecamatan Pengaron	8.538.000	8.538.000		
				Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana					
					Kecamatan Sungai Pinang	10.230.000	10.230.000		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana					
					Kecamatan Beruntung Baru	16.433.000	16.433.000		
				Persentase Fasilitas kewenangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan yang terlaksana					
					Kecamatan Martapura Barat	14.900.000	16.900.000		
				Persentase Fasilitas Pelayanan Terhadap masyarakat di kecamatan					
					Kecamatan Martapura Barat	6.300.000	4.200.000		
				Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana					
					Kecamatan Martapura Timur	12.480.000	12.480.000		
				Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana					
					Kecamatan Paramasan	8.400.000	8.400.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
				Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
					Kecamatan Kertak Hanyar	312.921.600	512.921.600		
				Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan					
					Kecamatan Kertak Hanyar	61.700.000	61.700.000		
				Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
					Kecamatan Kertak Hanyar	311.218.550	511.218.550		
				Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
					Kecamatan Kertak Hanyar	325.330.050	525.330.050		
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa					
					Kecamatan Aluh-Aluh	60.076.400	59.076.400		
				Persentase koordinasi dan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan					
					Kecamatan Pengaron	48.613.500	41.663.500		
				Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan					
					Kecamatan Sungai Pinang	56.317.000	56.317.000		
				Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan					
					Kecamatan Beruntung Baru	58.145.500	64.245.500		
				Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan					
					Kecamatan Sambung Makmur	64.338.000	58.138.000		
				Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
					Kecamatan Sambung Makmur	64.338.000	58.138.000		
				persentase koordinasi dan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan					
					Kecamatan Paramasan	49.000.000	44.000.000		
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan					
					Kecamatan Cinta Puri Darussalam	58.673.800	58.673.800		
				Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan					
					Kecamatan Cinta Puri Darussalam	58.673.800	58.673.800		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
				Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan					
				Kecamatan Kertak Hanyar		9.100.000	4.200.000		
				Persentase Fasilitas Penanganan Trantbumlinmas					
				Kecamatan Aluh-Aluh		9.250.000	5.000.000		
				Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan					
				Kecamatan Aluh-Aluh		9.372.800	9.961.200		
				Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan					
				Kecamatan Sungai Pinang		20.233.000	20.233.000		
				Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan					
				Kecamatan Beruntung Baru		5.334.000	5.334.000		
				Persentase Fasilitas Penanganan Tramtibumlinmas					
				Kecamatan Sambung Makmur		11.605.000	15.505.000		
				Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan					
				Kecamatan Martapura Timur		8.320.000	8.320.000		
				Persentase koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan					
				Kecamatan Paramasan		17.500.000	17.500.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
				Kecamatan Kertak Hanyar		142.560.000	146.385.000		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah					
				Kecamatan Aluh-Aluh		82.032.500	58.129.850		
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
				Kecamatan Beruntung Baru		138.198.000	137.844.000		
				Kecamatan Martapura Timur		110.891.000	110.891.000		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
				Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					
				Kecamatan Kertak Hanyar		20.000.000	20.000.000		
				Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan					
				Kecamatan Martapura		14.300.000	14.300.000		
				Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				Kecamatan Aluh-Aluh		13.235.700	12.235.700		
				Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					
				Kecamatan Sungai Pinang		9.676.500	9.676.500		
				Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				Kecamatan Beruntung Baru		18.179.000	18.179.000		
				Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					
				Kecamatan Martapura		22.219.700	20.659.900		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Timur				
				Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					
					Kecamatan Paramasan	39.502.500	37.002.500		

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan	74.00	74.00	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan laporan kinerja SKPD tersusun dengan baik	100 %	100 %	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar		
								1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar		
								1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Banjar		
								1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	24 Laporan	Kab. Banjar		
					1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3661 Orang/bulan	3661 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Banjar		
								1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Banjar		
								1.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar		
								1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	Kab. Banjar		
					1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang terpenuhi	100 %	100 %	1.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar	
								1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
					1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	5 kegiatan	5 kegiatan	1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
						Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Banjar		
								1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Banjar		
								1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	30 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
					1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah Yang Terlaksana	5 buah/unit	5 buah/unit	1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	249 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
						Persentase pengadaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %						
					1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	Kab. Banjar	
								1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
					1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
									1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	Kab. Banjar	
									1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	Kab. Banjar	
									1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	Kab. Banjar	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100 %	100 %	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS SD)	100 %	100 %	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	6 Ruang	Kab. Banjar	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	99,12 %	99,12 %		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1,78 %	1,78 %						
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	99,84 %	99,84 %		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,8 %	1,8 %						
									1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	Kab. Banjar	
									1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	10 Ruang	Kab. Banjar	
									1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	5 Ruang	Kab. Banjar	
									1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	15 Unit	Kab. Banjar	
									1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	5 Unit		
									1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	38 Ruang	38 Ruang	Kab. Banjar	
									1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	10 Ruang	Kab. Banjar	
									1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	Kab. Banjar	
									1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	Kab. Banjar	
									1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	5 Unit		
									1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket		
									1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket		
									1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	372 Satuan Pendidikan	372 Satuan Pendidikan		
									1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Didik Akademik dan Non Akademik	990 Peserta Didik	990 Peserta Didik		
									1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	580 Orang	580 Orang		
									1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	372 Satuan Pendidikan	372 Satuan Pendidikan	Kab. Banjar	
									1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	Kab. Banjar	
									1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	730 Orang	730 Orang		
									1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	12 Ruang	12 Ruang	Kab. Banjar	
									1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	2 Ruang	Kab. Banjar	
									1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang		
									1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang		
									1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang		
									1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang		
									1.01.02.2.02.10 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	5 Unit	5 Unit		
									1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	7 Unit	Kab. Banjar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang			
								1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang			
								1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang				
								1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang	Kab. Banjar		
								1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	Kab. Banjar		
								1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit			
								1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit	Kab. Banjar		
								1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota		
								1.01.02.2.02.26 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	6 Paket	6 Paket			
								1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 Paket	1 Paket			
								1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	19215 Peserta Didik	19215 Peserta Didik			
								1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2373 Peserta Didik	1018 Peserta Didik			
								1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	735 Orang	901 Orang			
								1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	75 Satuan Pendidikan	75 Satuan Pendidikan			
								1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	Kab. Banjar		
								1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	150 Orang	160 Orang			
								1.01.02.2.02.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang				
								1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	11 Unit	11 Unit	Kab. Banjar		
								1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit	Kab. Banjar		
								1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit			
								1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	10 Paket	10 Paket			
								1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	250 Paket	8870 Paket			
								1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	18 Paket	18 Paket	Kab. Banjar		
								1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik 14300 Peserta Didik	0 Peserta Didik 14300 Peserta Didik			
								1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang 185 Orang	0 Orang 185 Orang			
								1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	443 Satuan Pendidikan	443 Satuan Pendidikan	Kab. Banjar		
								1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	Kab. Banjar		
								1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan	480 Orang	480 Orang			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan, keaksaraan dan kecakapan hidup Persentase peningkatan jumlah warga belajar Persentase pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket sesuai standar	60 % 60 % 20 % 20 % 90 % 90 %	1.01.02.2.04.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit 2 Unit			Kab. Banjar		
							1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4 Unit 4 Unit			Kab. Banjar		
							1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket 1 Paket					
							1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktis dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket 1 Paket			Kab. Banjar		
							1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik 8203 Peserta Didik	0 Peserta Didik 8203 Peserta Didik				
							1.01.02.2.04.16 Pembinaan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	26 Satuan Pendidikan	26 Satuan Pendidikan		Kab. Banjar		
							1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan		Kab. Banjar		
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase implementasi penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum	67 67	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah kegiatan penetapan kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	4 Dokumen 4 Dokumen	1.01.03.2.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen 4 Dokumen					
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru - Siswa jenjang SD Rasio Guru - Siswa jenjang SMP Rasio Guru - Siswa PAUD	12.87 12.87 10.41 10.41 18.1 18.1	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dokumen pemerataan kuantitas dan kualitas PTK Jenjang PAUD/Kesetaraan dan Pendidikan Dasar	2 Dokumen 2 Dokumen	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 Dokumen 7 Dokumen					
							1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9 Laporan 9 Laporan					
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (KKI) Dinas Kesehatan Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (KKI) Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	74 74 74 Indeks 74 Indeks	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100 Persen 100 Persen 12 Bulan 12 Bulan	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen 7 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen			Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
							1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen 6 Dokumen			Kab. Banjar		
							1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan 5 Laporan			Kab. Banjar		
							1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan 7 Laporan 16 Laporan 16 Laporan			Kab. Banjar		
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen 100 % 100 %	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1194 Orang/bulan 1194 Orang/bulan 6170 Orang 6170 Orang			Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
							1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen 12 Dokumen			Kab. Banjar		
							1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen 12 Dokumen 24 Dokumen 24 Dokumen			Kab. Banjar		
							1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan 12 Laporan 24 Laporan 24 Laporan			Kab. Banjar		
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian RS Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen 12 Bulan 12 Bulan	1.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen 6 Dokumen			Kab. Banjar		

No	Program			Kegiatan	Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Sebelum	Sesudah		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
								1.02.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
								1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	Kab. Banjar	
								1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	Kab. Banjar	
								1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Banjar	
								1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								1.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	19 Unit	Kab. Banjar	
								1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar	
								1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar	
								1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar	
								1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	Kab. Banjar	
								1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar	
								1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	Kab. Banjar	
								1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Pelayanan BLUD Rumah Sakit	100 Persen	100 Persen	Kab. Banjar	
								1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	0 0	0 0				1.02.02.2.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar	
		0	52 Persen	52 Persen					Jumlah Alat Kesehatan/Alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	26 Unit	26 Unit		
		0	80 Persen	80 Persen					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit		
		0	83 Persen	83 Persen					Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	8 unit	8 unit		
		0	52 %	52 %					Jumlah sarana dan fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	3 Unit	3 Unit		
		0	52 Persen	52 Persen					Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	310 Unit	310 Unit		
		0	52,00 %	52,00 %					Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang di Sediakan	12 Dokumen	12 Dokumen		
		0	52 Persen	52 Persen					Persentase capaian ASPAK Puskesmas minimal 70 %	65 Persen	65 Persen		
		0	52 Persen	52 Persen					Persentase capaian ASPAK Puskesmas minimal 70%	65 Persen	65 Persen		
		0	100 persen	100 persen					Persentase capaian ASPAK Puskesmas minimal 70%	65 persen	65 persen		
		0	52 %	52 %					Persentase capaian ASPAK Puskesmas minimal 70%	65 Persen	65 Persen		
		0	52 %	52 %					Persentase Capaian Aspak Puskesmas Minimal 70%	65 %	65 %		
		0	52 persen	52 persen					Persentase Capaian ASPAK Puskesmas minimal 70%	65 persen	65 persen		
		0	52 persen	52 persen					Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70 %	65 %	65 %		
		0	52 Persen	52 Persen					Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70%	65 Persen	65 Persen		
		0	52 Persen	52 Persen					Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70 %	65 Persen	65 Persen		

No	Program				Kegiatan	Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja				Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian				Sebelum	Setelah		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Setelah							Sebelum	Setelah			
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	52 Persen	52 Persen		Persentase capaian SPM Puskesmas 100%	65 Persen	65 Persen							
		Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	52 Persen	52 Persen		Persentase capaian SPM Puskesmas 100%	90 %	90 %							
		Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama	52 Persen	52 Persen		Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan / Kedokteran sesuai Kebutuhan	83 Persen	83 Persen							
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	52 %	52 %		Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen							
		Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	52 Persen	52 Persen		Persentase Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar	80 Persen	80 Persen							
		Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	90 Persen	90 Persen		Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70%	65 persen	65 persen							
						Persentase capaian SPM puskesmas 100%	90 persen	90 persen							
						Persentase capaian ASPAK Puskesmas minimal 70%	65 Persen	65 Persen							
						Terpeliharanya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Unit	1 Unit							
						Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	100 %							
									1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar	
									1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	Kab. Banjar	
									1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	4 Unit	4 Unit	Kab. Banjar	
									1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	2 Unit	2 Unit	Kab. Banjar	
									1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar	
									1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	3 Unit	Kab. Banjar	
									1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	Kab. Banjar	
											Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 unit	5 unit		
											Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen		
											Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	14 Unit	14 Unit		
											Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	15 Unit		
											Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	27 Unit	27 Unit		
											Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	46 Unit	46 Unit		
											Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	120 Unit	120 Unit		
									1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	31 Unit	31 Unit	Kab. Banjar	
											Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit		
											Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit		
									1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	Kab. Banjar	
											Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	20 Unit		
											Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	88 Unit	89 Unit		
									1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Banjar	
											Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	20 Unit	20 Unit		
											Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	27 Unit	27 Unit		
											Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	31 Unit	31 Unit		
											Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	34 Unit	34 Unit		
											Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	36 Unit	36 Unit		

No	Program				Kegiatan	Kegiatan				Sub Kegiatan	Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja				Kegiatan	Indikator Kinerja				Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian				Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65 %	65 %				
					Jumlah Dokumen Oprasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66 Orang	66 Orang				
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	200 Orang	200 Orang			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74 Orang	74 Orang				
					Persentase Capaian Akreditasi Kelompok Berfokus Pada Pelayanan	77.8 Persen	77.8 Persen			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	211 Orang	211 Orang				
					Persentase Capaian Akreditasi Kelompok Manajemen	71.4 Persen	71.4 Persen			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	218 Orang	218 Orang				
					Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70%	65 Persen	65 Persen			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	237 Orang	237 Orang				
					persentase capaian SPM Puskesmas 100%	90 Persen	90 Persen			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	238 Orang	238 Orang				
					Persentase capaian SPM Puskesmas 100%	90 %	90 %			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	252 Orang	252 Orang				
					Persentase capaian SPM Puskesmas 100%	90 Persen	90 Persen			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang	301 Orang				
					Persentase Capaian SPM Puskesmas 100%	90 %	90 %			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang	301 Orang				
					Persentase Capaian SPM Puskesmas 100%	90 Persen	90 Persen			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	329 Orang	329 Orang				
					Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	329 Orang	329 Orang				
					Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama	52 Persen	52 Persen			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	376 Orang	376 Orang				
					Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	52 %	52 %			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	376 Orang	376 Orang				
					Presentase capaian SPM puskesmas 100%	90 persen	90 persen			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	428 Orang	428 Orang				
					Presentasi capaian SPM Puskesmas 100%	90 Persen	90 Persen			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	428 Orang	428 Orang				
					Presetase distribusi obat dan perbekalan kesehatan 100%	95 %	95 %			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	489 Orang	489 Orang				
					tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	574 Orang	574 Orang				
										Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	582 Orang	582 Orang				
										Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	582 Orang	582 Orang				
										Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	637 Orang	637 Orang				
										Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	637 Orang	637 Orang				
										Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	686 Orang	686 Orang				
										Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	686 Orang	686 Orang				
										Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	690 Orang	690 Orang				
										Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	690 Orang	690 Orang				
										Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	914 Orang	914 Orang				
										Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	914 Orang	914 Orang				
										Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1111 Orang	1111 Orang				
										Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1111 Orang	1111 Orang				
										Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11314 Orang	11314 Orang				
										Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11314 Orang	11314 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5 Orang	5 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	12 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63 Orang	63 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63 Orang	63 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70 %	70 %				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	202 Orang	202 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	202 Orang	202 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	218 Orang	218 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	218 Orang	218 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	227 Orang	227 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	227 Orang	227 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	288 Orang	288 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	288 Orang	288 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	395 Orang	395 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	395 Orang	395 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	482 Orang	482 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	482 Orang	482 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	489 Orang	489 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	489 Orang	489 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	638 Orang	638 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	638 Orang	638 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	659 Orang	659 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	659 Orang	659 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10798 Orang	10798 Orang				
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10798 Orang	10798 Orang				
										Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5 Orang	5 Orang				
										Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5 Orang	5 Orang				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2721 Orang	2721 Orang	Kab. Banjar		
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang			
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20 Orang	20 Orang			
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	60 Orang			
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66 %	66 %			
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang			
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	185 Orang	185 Orang			
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	192 Orang	192 Orang			
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	198 Orang	198 Orang			
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	216 Orang	216 Orang			
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	229 Orang	229 Orang			
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	274 Orang	274 Orang			
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	299 Orang	299 Orang			
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	389 Orang	389 Orang			
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	466 Orang	466 Orang			
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	529 Orang	529 Orang			
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	614 Orang	614 Orang			
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	624 Orang	624 Orang			
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	627 Orang	627 Orang			
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	854 Orang	854 Orang			
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10285 Orang	10285 Orang			
								1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	Kab. Banjar		
									Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	12 Orang			
									Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 %	40 %			
									Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang			
									Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	261 Orang			
									Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	290 Orang	290 Orang			
									Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	359 Orang	359 Orang			
									Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	360 Orang	360 Orang			
									Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	504 Orang	504 Orang			
									Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	653 Orang	653 Orang			
									Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	861 Orang	861 Orang			
									Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	934 Orang	934 Orang			
									Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	936 Orang	936 Orang			
									Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	992 Orang	992 Orang			
									Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1100 Orang	1100 Orang			
									Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1299 Orang	1299 Orang			
									Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1688 Orang	1688 Orang			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1927 Orang	1927 Orang		
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2262 Orang	2262 Orang		
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2293 Orang	2293 Orang		
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2511 Orang	2511 Orang		
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2708 Orang	2708 Orang		
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2721 Orang	2721 Orang		
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3707 Orang	3707 Orang		
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44629 Orang	44629 Orang		
									1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5287 Orang	5287 Orang	Kab. Banjar	
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	12 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	176 %	176 %		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	228 Orang	228 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	412 Orang	412 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	432 Orang	432 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	607 Orang	607 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1050 Orang	1050 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1230 Orang	1230 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1240 Orang	1240 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1785 Orang	1785 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2037 Orang	2037 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2184 Orang	2184 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2212 Orang	2212 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2393 Orang	2393 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3559 Orang	3559 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3605 Orang	3605 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3680 Orang	3680 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4226 Orang	4226 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4324 Orang	4324 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4847 Orang	4847 Orang		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79524 Orang	79524 Orang			
									Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4613000 Orang	4613000 Orang			
								1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		8 Orang	Kab. Banjar		
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		82 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		250 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		768 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		800 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	2000 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2408 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2939 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		4000 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		4613 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7143 Orang	7143 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		7340 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		7767 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		9303 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		10200 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		11206 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		11512 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12320 Orang	12320 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14009 Orang	14009 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		18444 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		18769 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		152354 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	377702 Orang	377702 Orang			
								1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5032 Orang	5032 Orang	Kab. Banjar		
									Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	12 Orang			
									Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	82 %	82 %			

No	Program			Kegiatan	Kegiatan			Sub Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja			Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Target Capaian				Sebelum	Sesudah			
			Sebelum			Sesudah	Sebelum							Sesudah
								Kesehatan Sesuai Standar						
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	336 Orang	336 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		394 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		400 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		646 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	660 Orang	660 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1271 Orang	1271 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1343 Orang	1343 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1346 Orang	1346 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2015 Orang	2015 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2097 Orang	2097 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2292 Orang	2292 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2624 Orang	2624 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3101 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3115 Orang	3115 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3646 Orang	3646 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3694 Orang	3694 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4015 Orang	4015 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		4780 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60573 Orang	60573 Orang				
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						
								1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38160 Orang	38160 Orang	Kab. Banjar		
								1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5046 Orang	5046 Orang	Kab. Banjar		
								1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	Kab. Banjar		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6 Orang	6 Orang				
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		8 Orang				
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	10 Orang				
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	14 Orang	14 Orang				
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		15 Orang				
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		17 Orang				
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	18 Orang	18 Orang				
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	23 Orang	23 Orang				
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		23 Orang				
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	25 Orang				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 27 Orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 30 Orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 33 Orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 37 Orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 41 Orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 50 Orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 51 Orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 58 Orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 86 Orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 87 Orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 432 Orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 933 Orang						
						1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 10 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 12 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 36 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 39 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 65 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 133 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 180 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 231 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 236 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 251 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 254 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 257 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 282 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 303 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 328 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 389 Orang	Kab. Banjar						

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		477 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	545 Orang	545 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		559 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		631 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		1032 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10040 Orang	10040 Orang			
								1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		10 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		12 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		20 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		100 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	178 Orang	178 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		275 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		344 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		360 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		403 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		448 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		486 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		506 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		544 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		630 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		664 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		690 Orang			
									Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14358 Orang	14358 Orang			
								1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0 Dokumen		Kab. Banjar	
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	2 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	5 Dokumen	5 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	10 Dokumen	10 Dokumen			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 12 Dokumen 12 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 12 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 100 Dokumen 100 Dokumen					
								1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 2 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 4 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 12 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 100 Dokumen	Kab. Banjar				
								1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3 Dokumen 3 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4 Dokumen 4 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 7 Dokumen 7 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 10 Dokumen 10 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 15 Dokumen 15 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 25 Dokumen 25 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 100 Dokumen 100 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 180 Dokumen 180 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 261 Dokumen 261 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 26266 Dokumen 26266 Dokumen	Kab. Banjar				
								1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 26 Dokumen 26 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	Kab. Banjar				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									Berpotensi Bercana Sesuai Standar					
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	3 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	4 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	5 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	6 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		10 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		12 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15 Dokumen	15 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Dokumen	100 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		100 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Banjar	
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	3 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	6 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	69 Dokumen	69 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 Dokumen	100 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen		Kab. Banjar	
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 Dokumen	7 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		12 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	96 Dokumen	96 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen			
								1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Banjar		
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	10 Dokumen	10 Dokumen			
								1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Banjar		
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18 Dokumen	18 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40 Dokumen	40 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen			
								1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	800 Orang	800 Orang	Kab. Banjar		
								1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 Orang	6 Orang	Kab. Banjar		
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	10 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	12 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	13 Orang	13 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16 Orang	16 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	17 Orang	17 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	17 Orang	17 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	26 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30 Orang	30 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	34 Orang	34 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	36 Orang	36 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	37 Orang	37 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	50 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	53 Orang	53 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	58 Orang	58 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	69 Orang	69 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	70 Orang	70 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	100 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	100 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	129 Orang	129 Orang			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	200 Orang	200 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	552 Orang	552 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		3680 Orang			
								1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Banjar		
								1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Banjar		
									Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	3 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	19 Dokumen	19 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	25 Dokumen	25 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	51 %	51 %			
									Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	80 Dokumen	80 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	100 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	156 Dokumen	156 Dokumen			
								1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar		
								1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	Kab. Banjar		
									Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		1 Paket			
									Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		2 Paket			
									Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		5 Paket			
									Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		6 Paket			
									Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		10 Paket			
									Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	12 Paket			
									Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		12 Paket			
									Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		17 Paket			
									Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	18 Paket	18 Paket			
									Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		18 Paket			
									Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		20 Paket			
									Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		27 Paket			
									Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		39 Paket			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					
									Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	50 Paket				
								1.02.02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	1 Dokumen Penelitian	1 Dokumen Penelitian			Kab. Banjar
								1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Banjar
									Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan			
									Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	35 Dokumen	35 Dokumen			
								1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kab/Kota Kab. Banjar
								1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Banjar
									Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit			
								1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0 Laporan			Kab. Banjar
									Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan			
									Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		1 Laporan			
									Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	2 Laporan			
									Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		3 Laporan			
									Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		4 Laporan			
									Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		5 Laporan			
									Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan	6 Laporan			
									Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		10 Laporan			
									Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan			
									Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		12 Laporan			
									Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		18 Laporan			
									Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		100 Laporan			
									Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		128 Laporan			
								1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Banjar
								1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit				Kab. Banjar
								1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	15 Keluarga	15 Keluarga			Kab. Banjar
									Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	30 Keluarga	30 Keluarga			
									Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1000 Keluarga	1000 Keluarga			
									Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas					
								1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		10 Orang			Kab. Banjar
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		12 Orang			

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	24 Orang				
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang				
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40 Orang				
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	46 Orang				
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64 Orang				
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72 Orang				
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang				
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	106 Orang				
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	158 Orang				
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	231 Orang				
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	257 Orang				
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	300 Orang				
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	302 Orang				
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	389 Orang				
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	472 Orang				
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	477 Orang				
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	559 Orang				
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	580 Orang				
									Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	864 Orang				
								1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang		Kab. Banjar		
									Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang				
									Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang				
									Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	6 Orang				
									Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	8 Orang				
									Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang				
									Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	22 Orang				
									Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	24 Orang				
									Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	25 Orang				
									Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	57 Orang				
									Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang				
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	persentase puskesmas yang melaporkan melalui sistem informasi kesehatan terintegrasi	100 %	100 %	1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Banjar		
								1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	Kab. Banjar		
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Keperawatan Persentase Capaian SPM Pelayanan Medik Persentase Capaian SPM Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian Persentase Jumlah Rumah sakit yang dilakukan pembinaan 2 kali setahun	82.2 Persen	82.2 Persen	1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar		
						86 Persen	86 Persen		30 Unit	30 Unit				
						88 Persen	88 Persen							
						100 Persen	100 Persen							
								1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar		
								1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	70 Orang	70 Orang	Kab. Banjar		
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pelayanan Kesehatan Keadaan Tertentu oleh Tenaga Kesehatan RS	100 Persen	100 Persen	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Capaian Pemenuhan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen						
		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	80 Persen	80 Persen		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	75 Persen	75 Persen						

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	16 Dokumen	16 Dokumen	Kab. Banjar		
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UPT yang SDM mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	50 Persen	50 Persen	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	100 Orang	Kab. Banjar		
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	93,75 %	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek dan toko obat yang berizin	78 Persen	78 Persen	1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar		
		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	80 Persen			80 Persen		1.02.04.2.01.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	40 Sarana	40 Sarana	Kab. Banjar		
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100 Persen	100 Persen	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	20 Dokumen	20 Dokumen	Kab. Banjar		
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	86.80 Persen	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan yang dilakukan advokasi	100 Persen	100 Persen	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Banjar		
									Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu aktif	74 Persen	74 Persen	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar		
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar		
					Persentase Capaian SPM Puskesmas 100%	90 %	90 %		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen			
					Persentase puskesmas yang melaksanakan Bimbingan Teknis	100 Persen	100 Persen		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 Dokumen	10 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	42 Dokumen	42 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Dokumen	100 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Dokumen	100 Dokumen			
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKI) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	74.00	74.00	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100 %	100 %	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar		
								1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	Kab. Banjar		
					1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100 %	100 %	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Banjar		
								1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Banjar		
								1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar		
								1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	16 Laporan	Kab. Banjar		
								1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Banjar		
								1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar		
					1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	100 %	100 %	1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	4 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
					1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiannya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Banjar		
								1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Banjar		
								1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 Dokumen	48 Dokumen	Kab. Banjar		
								1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
					1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiannya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar	
								1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar		
								1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
					1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiannya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar	
								1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	Kab. Banjar		
								1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	Kab. Banjar		
								1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	Kab. Banjar		
								1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	Kab. Banjar		
								1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115 Unit	115 Unit	Kab. Banjar		
								1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar		

No	Program			Kegiatan			Sub-Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.				
	Indikator Kinerja	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Indikator Kinerja	Target Capaian							
		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Program	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	65,11 %	65,11 %	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Sungai yang Dikelola	4,16 %	4,16 %	1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen				
	Rasio luas kawasan permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman banjir di WS Kewenangan Kabupaten	62,96 %	62,96 %					1.03.02.2.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen				
								1.03.02.2.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				
								1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,15 KM	0,15 KM				
								1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	15 KM	15 KM				
								1.03.02.2.01.65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 KM	6 KM				
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilyani oleh Jaringan Irigasi	8,39 %	8,39 %	1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen				
								1.03.02.2.02.03 Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	6 Bendung	9 Bendung				
								1.03.02.2.02.23 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	14,2 KM	16,95 KM				
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman dan Layak	81,61 %	81,61 %	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penambahan jaringan SPAM Kabupaten	1,04 %	1,04 %	1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	0	0	2214 Unit	2214 Unit	
							1.03.03.2.01.08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang Sarana Air Minumnya akan dilakukan optimalisasi dan perluasan	0	0	8 Desa	8 Desa			
							1.03.03.2.01.12 Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	8 Unit	8 Unit					
							1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah Terpasang	350 SR	350 SR					
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Akses Sanitasi Aman	7,89 %	7,89 %	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Akses Sanitasi Aman	7,89 %	7,89 %	1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	209 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga				
	Persentase Akses Sanitasi Layak	79,68 %	79,68 %					1.03.05.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	12 Kelompok	12 Kelompok				
	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	79,68 %	79,68 %					1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				
								1.03.05.2.01.13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	2 Unit	2 Unit				
								1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	1000 M	9000 M				
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	46,20 %	46,20 %				1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	500 M						
							1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	500 M	500 M		Kab. Banjar			
							1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	45000 M	45000 M					
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai	84,57 %	84,57 %	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur Kawasan Strategis dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2795 Jaringan	2795 Jaringan				
							1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2719 Jaringan	9000 Jaringan					

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pemanfaatan Bangunan yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	100.00 %	100.00 %	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber-IMB	8.25 %	8.25 %	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	125 Dokumen	125 Dokumen		
									1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen		
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan	81.00 %	81.00 %	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	22.86 %	22.86 %	1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	5 Dokumen	9 Dokumen		
									1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2 Kawasan	2 Kawasan		
									1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	6 Kawasan	6 Kawasan		
	1.03.10 PROGRAM PENYELenggaraAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	72.84 %	72.84 %	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	0.7 %	0.7 %	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advd dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	14 Dokumen	73 Dokumen		
		Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	73.47 %	73.47 %		Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	1.2 %	1.2 %						
						Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	82.7 %	82.7 %						
									1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	0 M ²	0 M ²		
									1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	9 Dokumen	9 Dokumen		
									1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	20 KM		
									1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	4 KM	20 KM		
									1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	20 KM	22 KM		
									1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	1.5 KM	2 KM		
									1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	8 KM	10 KM		
									1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	10 M	10 M		
									1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	6 M	40 M		
									1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	30 M	150 M		
									1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	6 M	150 M		
									1.03.10.2.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	1.7 KM	1.7 KM		
									1.03.10.2.01.27 Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Diganti/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit		
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	87.50 %	87.50 %	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	30 %	30 %	1.03.11.2.01.06 Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	35 Orang	35 Orang		
									1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	135 Orang	135 Orang		
					1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	90 %	90 %	1.03.11.2.02.06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	2 Dokumen	2 Dokumen		
									1.03.11.2.02.07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	2 Dokumen	2 Dokumen		
					1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi	40 %	40 %	1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	40 Orang	40 Orang		
									1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	50 Laporan	50 Laporan		
	1.03.12 PROGRAM PENYELenggaraAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	92.17 %	92.17 %	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan	60 %	60 %	1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persejuaan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persejuaan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		
									1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen		
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RUTR	100 %	100 %		1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		
									1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	250 Dokumen	250 Dokumen		
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Perumahan Yang Dibangun sesuai dengan dokumen teknis atau siteplan	100 %	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah yang terdata akibat korban bencana	100 %	100 %		1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	100 %	100 %		1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit	5 Unit	Kab. Banjar	
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Yang Diterbitkan	100 %	100 %		1.04.02.2.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	50 Dokumen	50 Dokumen	Kab. Banjar	
									1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	15,23 %	15,23 %	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah desa/kelurahan yang teridentifikasi sesuai pola penanganannya	5 Desa / Kelurahan	5 Desa / Kelurahan	1.04.03.2.02.01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar	
									1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
									1.04.03.2.02.04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Banjar	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	2.4 Ha	2.4 Ha		1.04.03.2.03.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Permukiman Kumuh	3 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar	
									1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Banjar	
									1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	0.1 Ha	0.2 Ha	Kab. Banjar	
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	22,68 %	22,68 %	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RTLH yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	100 %	100 %	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	5 Unit	5 Unit	Kab. Banjar	
									1.04.04.2.01.03 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Banjar	
									1.04.04.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	21,14 %	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang mendapatkan peningkatan kualitas PSU	100 %	100 %		1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	8 Lokasi	28 Lokasi	Kab. Banjar	
									1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
									1.04.05.2.01.04 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	0 Laporan	30 Laporan	Kab. Banjar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.04.05.2.01.05 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	15 Dokumen	15 Dokumen	Kab. Banjar	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (KKI) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	74.00 %	74.00 %	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100 %	100 %	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (KKI) Satuan Polisi Pamong Praja Nilai IKKI DPKP	74.00	74.00		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu dan tepat mutu	100 Persen	100 Persen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen		
						Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, laporan kinerja dan evaluasi kinerja tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan	100 Persen	100 Persen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen		
									1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
									1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
									1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	22 Laporan	Kab. Banjar	
									1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Banjar	
					1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan tepat waktu dan tepat mutu	100 Persen	100 Persen	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	19 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
						Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100 %	100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan		
						Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan	100 Persen	100 Persen		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan		
									1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Banjar	
										Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96 Dokumen	12 Dokumen		
									1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Banjar	
									1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
										Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan		
									1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	Kab. Banjar	
					1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.05.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
									1.05.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Banjar	
									1.05.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar	
					1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	100 %	100 %	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	Kab. Banjar	
						Persentase Layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	100 Persen	100 Persen						
									1.05.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan	100 Persen	100 Persen	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
					Persentase penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen							
					Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100 %	100 %	1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket			
								1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Banjar		
									Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			
								1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Banjar		
									Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			
								1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan	125 Laporan			
								1.05.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar		
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100 %	100 %	1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	Kab. Banjar		
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan BMD Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	73 Unit	73 Unit			
								1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	122 Unit	96 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	Kab. Banjar		
					Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai SOP	100 Persen	100 Persen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			
					Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	100 %	100 %	1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	12 Laporan			
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Cakupan Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar		
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100 %	100 %							
					Persentase pemeliharaan BMD PD dalam 1 tahun	100 Persen	100 Persen	1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar		
									Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit			
									Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit/Tahun	31 Unit/Tahun			
								1.05.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	Kab. Banjar		
								1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	Kab. Banjar		
									Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit	91 Unit			
									Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	102 Unit			
								1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar		
									Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit			
								1.05.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar		
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan	100 persen	100 persen	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rasio Jumlah Satuan Linmas	100 Persen	100 Persen	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	352 Kasus	352 Kasus	Kab. Banjar	

No	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Keterangan	Indikator Kinerja		Lokasi Kegiatan	Ket.			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah
							1.05.02.2.01.03 Peningkatan Atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	117 Kasus				
							1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat 2 Dokumen 2 Dokumen		Kab. Banjar			
							1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang 5 Orang	Kab. Banjar			
							1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Banjar			
							1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan 1 Laporan	Kab. Banjar			
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Gangguan Trantibum/K3 (Ketertiban, Ketertarikan dan keindahan) yang dapat diselesaikan	100 persen 100 persen	1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Laporan 4 Laporan	Kab. Banjar				
							1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4 Laporan 4 Laporan	Kab. Banjar				
							1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 Laporan 4 Laporan	Kab. Banjar				
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Meningkatnya Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 0.38 Indeks 0.38 Indeks	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 0.67 Indeks 0.67 Indeks	Indeks kekuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana 0.38 Indeks 0.38 Indeks	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Indeks kekuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana 0.38 Indeks 0.38 Indeks	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	800 Orang 800 Orang	Kab. Banjar				
					1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indeks meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana 0.38 Indeks 0.38 Indeks	Indeks kekuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana 0.67 Indeks 0.67 Indeks	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	150 Orang 150 Orang	Kab. Banjar			
							1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit 11 Unit	Kab. Banjar				
							1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan 1 Kawasan	Kab. Banjar				
							1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	0 Dokumen 0 Dokumen					
							1.05.03.2.02.12 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga					
					1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Indeks kekuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana 0.67 Indeks 0.67 Indeks	1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen 2 Dokumen	Kab. Banjar				
							1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1300 Orang 1300 Orang	Kab. Banjar				
					1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Indeks pengembangan sistem pemulihan bencana 0.53 Indeks 0.53 Indeks	1.05.03.2.04.03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	5 Dokumen 5 Dokumen	Kab. Banjar				
							1.05.03.2.04.06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	3 Dokumen 3 Dokumen	Kab. Banjar				
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran 100 Persen	Persentase layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi 100 Persen	Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran 13.79 Persen	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kabupaten/Kota	Persentase layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota 100 Persen 100 Persen	1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan 12 Laporan					
							1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan	12 Dokumen 12 Dokumen					

No	Program				Kegiatan				Ketersediaan Petugas Piket dan Penyelenggaraan Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				Lokasi Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Target Capaian				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum		Sesudah	Sebelum			Sesudah
							1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keselamatan	1 Orang	1 Orang					
							1.05.04.2.01.09 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	50 Dokumen	3 Dokumen					
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Layanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	100 Persen	100 Persen	1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen				
							1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelainan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen					
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100 Persen	100 Persen	1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	250 Orang	250 Orang				
							1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran (SKKL) Setiap Tahunnya	20 Desa/Kelurahan	20 Desa/Kelurahan					
				1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 Persen	100 Persen	1.05.04.2.05.01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	12 Laporan				
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (JKKI) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	74	74	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 Persen	100 Persen	1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar			
								1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar			
								1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	22 Laporan	Kab. Banjar			
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia dan Tersusun	100 Persen	100 Persen	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	40 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
								1.06.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Banjar			
								1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar			
								1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Banjar			
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terbimbing	100 Persen	100 Persen	1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	5 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Bermutu dan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
								1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	104 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
								1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Banjar			
								1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	250 Paket	250 Paket	Kab. Banjar			
								1.06.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
								1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
								SKPD	SKPD				Kab. Banjar		
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 Persen	100 Persen	1.06.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100 Persen	100 Persen	1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Banjar		
								1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Banjar		
								1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100 Persen	100 Persen	1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		Kab. Banjar		
								1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit		Kab. Banjar		
								1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit		Kab. Banjar		
								1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit		Kab. Banjar		
								1.06.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	1 Ha		Kab. Banjar		
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Diberdayakan	100 Persen	100 Persen	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	100 Persen	100 Persen	1.06.02.2.01.01 Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Keluarga	1 Keluarga		Kab. Banjar	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	171 Orang	171 Orang		Kab. Banjar		
								1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang		Kab. Banjar		
								1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga		Kab. Banjar		
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	13,50 Persen	13,50 Persen	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	75 Persen	75 Persen	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	165 Orang	165 Orang		Kab. Banjar	
								1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	13 Orang		Semua Kab/Kota		
								1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	55 Orang		Kab. Banjar		
								1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Orang	29 Orang		Kab. Banjar		
								1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang		Semua Kab/Kota		
								1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	158 Orang	158 Orang		Kab. Banjar		
								1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	8 Orang		Kab. Banjar		
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	75 Persen	75 Persen	1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	115 Orang		Semua Kab/Kota		
								1.06.04.2.02.03 Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang		Semua Kab/Kota		
								1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang		Semua Kab/Kota		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
								1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	45 Orang		Kab. Banjar		
								1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang		Kab. Banjar		
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial/OSIALitiasi Sosial	55 Persen	55 Persen	1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100 Persen	100 Persen	1.06.05.2.01.03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	202 Orang	202 Orang		Kab. Banjar	
					1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Terdata dan Terfasilitasi	65 Persen	65 Persen	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	201577 Orang	40.424 Orang		Kab. Banjar	
								1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	54814 Keluarga	68.693 Keluarga		Semua Kab/Kota		
								1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Keluarga	35 Keluarga		Kab. Banjar		
								1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	95 Orang	95 Orang		Kab. Banjar		
	1.06.06 PROGRAM PERLINDUNGAN BENCANA	Persentase Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tersalurkan	100 Persen	100 Persen	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	1000 Orang		Semua Kab/Kota	
					1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang Terkoordinasi dan Terlaksana	100 Persen	100 Persen	1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Mendapatkan Perumahan, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	1 Kampung		Kab. Banjar	
								1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang		Kab. Banjar		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	74 .	74 .	2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 %	100 %	2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									2.07.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Banjar	
									2.07.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									2.07.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Banjar	
									2.07.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	19 Laporan		Kab. Banjar	
									2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan		Kab. Banjar	
					2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100 %	100 %	2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan		Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									2.07.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Banjar	
									2.07.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54 Dokumen	54 Dokumen		Kab. Banjar	
									2.07.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Banjar	
									2.07.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Banjar	
									2.07.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Banjar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100 %	100 %	2.07.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasnya penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran	100 %	100 %	2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	10 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Banjar		
								2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Banjar		
								2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Banjar		
								2.07.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100 %	100 %	2.07.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								2.07.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Kab. Banjar		
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar		
								2.07.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar		
								2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100 %	100 %	2.07.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar		
								2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	Kab. Banjar		
								2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Kab. Banjar		
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang Tersusun	100 %	100 %	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Dokumen Tenaga Kerja Makro/Mikro	100 %	100 %	2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	15 Perusahaan	3 Perusahaan	Kab. Banjar	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas 20.774 Rp / Tenaga Kerja Jam / 20.774 Rp / Jam			2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarakan Unit Kompetensi	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi (Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan bersertifikat pelatihan dan bersertifikat kompetensi	4 %	4 %	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	592 Orang	528 Orang	Kab. Banjar	
								2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Lembaga	5 Lembaga			
								2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	1 Unit			
				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 Lembaga	5 Lembaga			
				2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja				2.07.03.2.03.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1 Perizinan	1 Perizinan			
				2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	2.57 %	2.57 %	2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	15 Perusahaan	15 Perusahaan	Kab. Banjar		
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	24 %		2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjar	150 Lowongan	150 Lowongan	2.07.04.2.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	2 Orang	2 Orang		
								2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	60 Orang	60 Orang	Kab. Banjar		
								2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	60 Orang	60 Orang			
								2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	30 Orang	30 Orang	Kab. Banjar		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	60 Orang	60 Orang			
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar	500 Orang	500 Orang	2.07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Banjar		
								2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	700 Orang	700 Orang	Kab. Banjar		
								2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	100 Orang	Semua Kab/Kota		
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (Pra dan Purna) yang diberikan fasilitasi Perindungan	100 %	100 %	2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	120 Orang	120 Orang	Kab. Banjar		
								2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	30 Orang	30 Orang			
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, PKWT, Struktur Skala Upah Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	25 %	25 %	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan perusahaan aktif yang disahkan	24 %	24 %	2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	25 Perusahaan	25 Perusahaan	Kab. Banjar	
								2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Banjar		
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sarana Hubungan Industrial (PKWT,LKS Bipartit,Serikat Pekerja/Buruh,Organisasi Pengusaha, dan Pekerja yang mendapatkan fasilitas Jamsostek)	100 %	100 %	2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	17 Perkara	22 Perkara	Kab. Banjar		
								2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	30 Orang	30 Orang			
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks PUG	0,5025	0,5025	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Resposif Gender (ARG) pada SKPD	75 Persen	75 Persen	2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Resposif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	Kab. Banjar	
					2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perempuan yang Dibina	100 Persen	100 Persen	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	Kab. Banjar	
					2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Dilatih Kecakapan Hidup	100 Persen	100 Persen	2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	650 Orang	650 Orang	Kab. Banjar	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	20 Persen	20 Persen	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Di Dampingi	100 Persen	100 Persen	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar	
					2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100 Persen	100 Persen	2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Layanan	24 Layanan	Kab. Banjar	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga Berkualitas	10 Persen	10 Persen	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina	100 Persen	100 Persen	2.08.04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	11 Dokumen	11 Dokumen	Kab. Banjar	
					2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	100 Persen	100 Persen	2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang	Kab. Banjar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Elemen Data Terpilah	100 Persen	100 Persen	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SKPD yang Memiliki Data Terpilah	100 Persen	100 Persen	2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tercapainya IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak)	56,80	56,80	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Pendukung Pemenuhan Hak Anak	57 Persen	57 Persen	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	60 Organisasi	60 Organisasi	Kab. Banjar	
									2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Banjar	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak)	62	62	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Didampingi	100 Persen	100 Persen	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar	
					2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kasus Terhadap Perempuan dan Anak	100 Persen	100 Persen	2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Layanan	35 Layanan	Kab. Banjar	
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKK)	74 Indeks	74 Indeks	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 %	100 %	2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35 Laporan	35 Laporan	Kab. Banjar	
					2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 %	100 %	2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									2.09.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Banjar	
									2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
									2.09.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	Kab. Banjar	
					2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	100 %	100 %	2.09.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
					2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Kab. Banjar	
									2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Kab. Banjar	
									2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
					2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	100 %	100 %	2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
									2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Banjar	
									2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
					2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100 %	100 %	2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar	
									2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	Kab. Banjar	
									2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	46 Unit	Kab. Banjar	
									2.09.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	Kab. Banjar	
									2.09.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	Kab. Banjar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Berkembangnya Desa Mandiri Pangan	1 Desa	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	2 Paket	2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar				
							2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar				
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama Persentase Stabilitas Harga Pangan Skor PPH Konsumsi	23,53 Persen ≤20 Persen 75.58 Skor	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase terciptanya stabilitas harga atas komoditas pangan	20 %	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar				
							2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota				
							2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar				
							2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	19 Unit	19 Unit	Kab. Banjar				
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan daerah	23.53 %	2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Banjar				
							2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25 Ton	25 Ton	Semua Kab/Kota				
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Konsumsi Kelompok Pangan	1625 kkal/kap/hari	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Banjar				
							2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar				
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Desa rentan rawan Pangan	7.14 %	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten	1 Sistem Informasi	2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar				
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	7.14 %	2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar				
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Skor Keamanan Pangan	65 %	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Skor Keamanan Pangan	65 %	2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar				
							2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar				
							2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar				
							2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar				
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase pelaksanaan fasilitasi sengketa tanah	100 %	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Inventaris Potensi Permasalahan Pertanahan	100 %	2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	25 Dokumen	25 Dokumen	Kab. Banjar				
							2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4 Berita Acara	4 Berita Acara	Kab. Banjar				
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	100 %	2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	100 %	2.10.06.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar				
	2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase luasan aset tanah pemkab yang tersertifikasi	46,67 %	2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Jumlah Bidang Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi	49.8 %	2.10.09.2.01.02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	250 Dokumen	250 Dokumen	Kab. Banjar				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase aset tanah pemkab yang terinventarisir dan dipatenkan	100 %	100 %	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Inventarisasi Aset Tanah Pemkab dalam satu Tahun	100 %	100 %	2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
									2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKI) Dinas Perumahan dan Permukiman	74,00	Indeks	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Mutu	100 %	100 %	2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
									2.11.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
									2.11.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Banjar	
									2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	16 Laporan	Kab. Banjar	
					2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Tepat Mutu	100 %	100 %	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan	87 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									2.11.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Banjar	
									2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
									2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	16 Laporan	Kab. Banjar	
									2.11.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Banjar	
					2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti BIMTEK	100 %	100 %	2.11.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	7 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
					2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									2.11.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	19 Paket	Kab. Banjar	
									2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	Kab. Banjar	
									2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
									2.11.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	700 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
					2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Terpenuhi Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		2.11.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Banjar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
					2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	100 %	100 %	2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar	
									2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Banjar	
									2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
					2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100 %	100 %	2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar	
									2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	33 Unit	Kab. Banjar	
									2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	89 Unit	Kab. Banjar	
									2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar	
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia	100 %	100 %	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
					2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Yang Tersusun	100 %	100 %	2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
									2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Pencemaran Air	5.3 IP	5.3 IP	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	50.3 IKA 76.83 IKU	50.3 IKA 76.83 IKU	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	30 Dokumen	30 Dokumen	Kab. Banjar	
									2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
									2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	25 Dokumen	25 Dokumen	Kab. Banjar	
					2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Ditanggulangi Dampak Kerusakan Lingkungannya	100 %	100 %	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
									2.11.03.2.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
	2.11.04 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Lokasi Kawasan Keekaragaman Hayati Yang Ditangani	100 %	100 %	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Keekaragaman Hayati Yang Ditangani	100 %	100 %	2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Ha	3 Ha	Kab. Banjar	
									2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10 ha	10 ha	Kab. Banjar	
									2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.5 ha	2.5 ha	Kab. Banjar	
									2.11.04.2.01.06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati	20 orang	20 orang	Kab. Banjar	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi	100 %	100 %	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Izin TPS Limbah B3	58 %	58 %	2.11.05.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
									2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Temuan Yang Ditindak Lanjuti	100 %	100 %	2.11.06.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	15 Dokumen	15 Dokumen	Kab. Banjar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.11.06.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2 Orang	2 Orang	Kab. Banjar	
									2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30 Laporan	30 Laporan	Kab. Banjar	
									2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	25 Dokumen	25 Dokumen	Kab. Banjar	
	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup	50 %	50 %	2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup	50 %	50 %	2.11.07.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan	30 %	30 %	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah Yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	55 %	55 %	2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang terselesaikan	100 %	100 %	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang Ditindak Lanjuti	100 %	100 %	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Banjar	
									2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Banjar	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	24.20 %	24.20 % 24.20 %	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah Persentase Sampah Yang Ditangani	24.2 % 61.25 %	24.2 % 61.25 %	2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	10 Laporan	10 Laporan	Kab. Banjar	
									2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	65700 Ton	65700 Ton	Kab. Banjar	
									2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	Kab. Banjar	
									2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	9 Unit	9 Unit	Kab. Banjar	
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKI) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74,00 %	74,00 %	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	78 Dokumen	78 Dokumen	2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
									2.12.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
									2.12.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Banjar	
									2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	22 Laporan	Kab. Banjar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	15 Dokumen	15 Dokumen	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								2.12.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Banjar		
								2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Banjar		
								2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Banjar		
								2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Banjar		
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	4 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	135 Paket	135 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2138 Paket	28 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1508 Paket	1508 Paket	Kab. Banjar		
								2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	42365 Paket	42365 Paket	Kab. Banjar		
								2.12.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	100 Persen	100 Persen	2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar		
								2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar		
								2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100 Persen	100 Persen	2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar		
								2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	Kab. Banjar		
								2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	Kab. Banjar		
								2.12.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	Kab. Banjar		
								2.12.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	118 Unit	118 Unit	Kab. Banjar		
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,26 %	99,26 %	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	99,27 persen	99,27 persen	2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36 Laporan	36 Laporan	Semua Kab/Kota	
								2.12.02.2.01.07 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	24 Laporan	24 Laporan	Semua Kab/Kota		
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	87,00 %	87,00 %	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	90 persen	90 persen	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	608 Dokumen	608 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	19000 Layanan	19000 Layanan	Semua Kab/Kota		
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen 62,00		2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pengelolaan data kependudukan yang sesuai aturan	100 persen	100 persen	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	100 Dokumen	100 Dokumen	Kab. Banjar	
					2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi	Persentase pengelolaan data kependudukan yang sesuai aturan	100 persen	100 persen	2.12.04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian,	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian,	7 Dokumen	19 Dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Target Capaian		Lokasi Sub	Ket.		
		Hasil Program	Target Capaian		Kegiatan	Target Capaian		Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum			Sesudah						Sebelum	Sesudah
			Kegiatan			Kegiatan							
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan kependudukan yang sesuai aturan	100 %	100 %	2.12.04.2.03.03 Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	52 Laporan	Semua Kab/Kota		
								2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	28 Dokumen	Semua Kab/Kota		
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	74 %	74 %	2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 %	100 %	2.13.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								2.13.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Banjar	
								2.13.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								2.13.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Banjar	
								2.13.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								2.13.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Banjar	
								2.13.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	16 Laporan	Kab. Banjar	
					2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 %	100 %	2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	27 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar
								2.13.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Banjar	
								2.13.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Banjar	
								2.13.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	2 Laporan	Kab. Banjar	
								2.13.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	20 Laporan	Kab. Banjar	
					2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100 %	100 %	2.13.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Banjar
					2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100 %	100 %	2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar
								2.13.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	Kab. Banjar	
								2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	Kab. Banjar	
								2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
					2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit	43 Unit	2.13.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Banjar
					2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar
								2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar	
								2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
					2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100 %	100 %	2.13.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit	Kab. Banjar
								2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	36 Unit	Kab. Banjar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.13.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 1 Unit 1 Unit atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Kab. Banjar	
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Administrasi Batas Wilayah Desa	10,12 % 10,12 %	2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang telah menyelesaikan tata batas wilayah desa	20 % 20 %	2.13.02.2.01.02 Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	5 Desa 30 Desa			Kab. Banjar		
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	2,89 % 2,89 %	2.13.03.2.01 Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama Persentase kawasan desa yang dikembangkan Persentase lembaga ekonomi desa dengan kinerja baik	40 % 40 % 5,6 % 5,6 % 26,92 % 26,92 %	2.13.03.2.01.01 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen			Kab. Banjar		
							2.13.03.2.01.02 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen			Kab. Banjar		
							2.13.03.2.01.03 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen 1 Dokumen			Kab. Banjar		
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib	43,32 % 43,32 %	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase administrasi Pemerintahan Desa yang berkualitas Persentase aparatur pemerintahan desa yang memahami manajemen pemerintahan desa Persentase desa dengan aset desa yang dikelola dengan baik Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan Persentase Desa yang mengelola Aset Desa dengan akuntabel	40 % 40 % 40 % 40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	2.13.04.2.01.01 Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1053 Dokumen 1053 Dokumen			Kab. Banjar		
							2.13.04.2.01.02 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	277 Dokumen 277 Dokumen			Kab. Banjar		
							2.13.04.2.01.04 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen 1 Dokumen			Kab. Banjar		
							2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	443 Orang 997 Orang			Kab. Banjar		
							2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen 1 Dokumen			Kab. Banjar		
							2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan 1 Laporan			Kab. Banjar		
							2.13.04.2.01.10 Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan 1 Laporan			Kab. Banjar		
							2.13.04.2.01.11 Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	2 Dokumen 2 Dokumen			Kab. Banjar		
							2.13.04.2.01.13 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen 1 Dokumen			Kab. Banjar		
							2.13.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	116 Orang 560 Orang			Kab. Banjar		
							2.13.04.2.01.15 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	20 Desa 20 Desa			Kab. Banjar		
							2.13.04.2.01.16 Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	277 Laporan 277 Laporan			Kab. Banjar		
							2.13.04.2.01.18 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen 2 Dokumen			Kab. Banjar		
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang Lembaga Kemasyarakatannya Diberdayakan	81,23 % 81,23 %	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelembagaan Adat yang aktif Persentase kelembagaan Desa yang terkoordinasi Persentase Pamsimas Aktif Persentase peningkatan desa berprestasi Persentase PKK Aktif Persentase Posyandu Aktif	20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 100 % 40 % 40 % 40 % 80 %	2.13.05.2.01.02 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	16 Dokumen 16 Dokumen			Kab. Banjar		
							2.13.05.2.01.05 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen 1 Dokumen			Kab. Banjar		
							2.13.05.2.01.06 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan 1 Laporan			Kab. Banjar		
							2.13.05.2.01.07 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan 2 Laporan			Kab. Banjar		
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median Usia Perempuan Kawin Pertama	17 Tahun 17 Tahun	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam Rangka	6150 PUS 6150 PUS	2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di	4 Satuan 4 Satuan	4 Satuan 4 Satuan			Kab. Banjar	

No	Program	Program		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kegiatan			dari ST/P/MS, Jalur Nonformal dan Informal	Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan Sub Kegiatan			Lokasi Sub	Ket.	
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja				Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Target Capaian			Kegiatan	Target Capaian				Kegiatan Sub	Target Capaian			
		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				Sebelum			Sesudah
		Hasil Program		2.14.02.2.02 Pemetaan Berkiraan	Usia Kelahiran Pertama	61	50	2.14.02.2.02.08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	Jumlah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	20	20	Kegiatan Kab Banjar		
				Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar		
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KULUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	9.10 Persen	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penurunan ASFR	20 Persen	20 Persen	2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar		
		Tingkat Prevelensi Kontrasepsi Modern (MCPR)	67.56 Persen					2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	500 Unit	500 Unit			
								2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar		
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 Persen	100 Persen	2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	27 Unit	27 Unit	Kab. Banjar		
								2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1012 Orang	1012 Orang	Kab. Banjar		
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah PUS yang Menggunakan Alat Kontrasepsi	67.56 Persen	67.56 Persen	2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1123 Orang	1123 Orang	Kab. Banjar		
								2.14.03.2.03.04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Banjar		
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina	100 Persen	100 Persen	2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	40 Kampung	40 Kampung	Kab. Banjar		
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KULUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	60.32	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Berkualitas	82.14 Persen	82.14 Persen	2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	34 Laporan	34 Laporan	Kab. Banjar		
								2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	1296 Orang	1296 Orang	Kab. Banjar		
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKKI Perangkat Daerah	69 indeks 69 indeks	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 persen	100 persen	2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Banjar		
								2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Banjar		
								2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Banjar		
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	500 Dokumen	Kab. Banjar		
								2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar		
				2.15.01.2.05 Administrasi	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	110 Paket	110 Paket	Kab. Banjar		

No	Program	Program		Kegiatan	Kepegawaian Perangkat Daerah	sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan			Ket.			
		Indikator Kinerja							Indikator Kinerja				Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian						Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Jumlah Orang yang Mendikuti	
			Sebelum							Sesudah	Sebelum				Sesudah
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
										2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Kab. Banjar	
										2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Banjar	
										2.15.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
										2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100 persen	100 persen	2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
										2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100 persen	100 persen	2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar	
										2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Terpenuhi Pelayan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar	
										2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	Kab. Banjar	
										2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	Kab. Banjar	
										2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	70,11 %	2.15.02.2.02 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			Persentase Perengkapan Jalan Yang Terpenuhi	75 persen	75 persen	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	Kab. Banjar	
		Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	70,00 %							2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Unit	30 Unit	Kab. Banjar	
		V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,39							2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	Kab. Banjar	
										2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	20 Unit	20 Unit		
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal tipe c sesuai standar	59 persen	59 persen	2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	1 Unit		
										2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit		
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			Persentase Titik Parkir berizin yang Dikelola	100 persen	100 persen	2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan		
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	100 persen	100 persen	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar	
										2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	5850 Unit	5850 Unit	Kab. Banjar	
										2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	9 Unit	Kab. Banjar	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,39 indeks	0,39 indeks	2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan		
										2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	25 Unit	25 Unit		
										2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen		
										2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian				Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah
			Sebelum	Setelah												
					2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	70 persen	70 persen	2.15.02.2.07.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				
									2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5 Laporan	5 Laporan				
									2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	10 Laporan	10 Laporan				
					2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	84.44 Persen	84.44 Persen	2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar			
					2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	37.5 persen	37.5 persen	2.15.02.2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan	12 Laporan				
									2.15.02.2.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				
					2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum	100 persen	100 persen	2.15.02.2.16.01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal	30 persen	30 persen	2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	50 Persen	50 Persen	2.15.03.2.03.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen				
									2.15.03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan				
					2.15.03.2.09 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.15.03.2.09.01 Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok				
					2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan	67 Persen	67 Persen	2.15.03.2.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				
									2.15.03.2.13.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				
									2.15.03.2.13.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit				
									2.15.03.2.13.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Laporan	1 Laporan				
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	74,00	74,00	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 %	100 %	2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab./Kota Kab. Banjar			
									2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar			
									2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab./Kota Kab. Banjar			
									2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar			
									2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab./Kota Kab. Banjar			
									2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Banjar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	Bangun / Kembangkan													
								2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	27 Unit	47 Unit			
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	36.17 Persen	36.17 Persen	2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	27 Unit	27 Unit			
								2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	22 Layanan	22 Layanan			
								2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	1 Dokumen			
								2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen			
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas DKUMPP	74 . 74 .	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksana kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 %	100 %	2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen		Kab. Banjar	
								2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan		Kab. Banjar	
								2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan		Kab. Banjar	
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan		Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Banjar	
								2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Banjar	
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Perencana yang meningkat kompetensinya	100 %	100 %	2.17.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana dan Prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	100 %	100 %	2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	15 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		Kab. Banjar	
								2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		Kab. Banjar	
								2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Banjar	
								2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur	100 %	100 %	2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		Kab. Banjar	
								2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit		Kab. Banjar	
								2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	862 Unit	862 Unit		Kab. Banjar	
								2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		Kab. Banjar	
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	persentase koperasi yang memiliki rekomendasi ijin usaha simpan pinjam Persentase Rekomendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas pembantu	74.14 % 74.14 %	2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam	6 Koperasi	6 Koperasi	2.17.02.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	6 Unit		Usaha Usaha	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
					2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi izin pembukaan kantor cabang pembantu, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	1 Koperasi	1 Koperasi	2.17.02.2.02.01 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	Kab. Banjar		
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mematuhi aturan perundangan	39.26 Persen	39.26 Persen	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	32 Koperasi	32 Koperasi	2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Unit Usaha	41 Unit Usaha	Kab. Banjar		
		Persentase KSP dan USP yang mematuhi aturan perundangan	44.83 Persen	44.83 Persen		Jumlah KSP USP yang diperiksa dan diawasi	9 KSP/USP	9 KSP/USP							
									2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan Kabupaten/kota	41 Unit Usaha	41 Unit Usaha			
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Sehat	18.97 Persen	18.97 Persen	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi Menerima penghargaan	6 kop	6 kop	2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	58 Unit Usaha	58 Unit Usaha			
						Jumlah KSP/USP Koperasi yang di Nilai Kesehatan	58 kop	58 kop							
									2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	6 Unit Usaha	6 Unit Usaha			
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi (pengawas dan pengurus) yang terlatih	34.58 %	34.58 %	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan Perkoperasian	60 Orang	60 Orang	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	60 Orang			
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya	36.81 Persen	36.81 Persen	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan	30 Koperasi	30 Koperasi	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Unit Usaha	70 Unit Usaha			
	2.17.07 PROGRAM USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	63.86 %	63.86 %	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	30.1 Persen	30.1 Persen	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	5000 Pelaku usaha mikro	5000 Pelaku usaha mikro			
						Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	5.95 Persen	5.95 Persen							
						Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0.37 Persen	0.37 Persen							
						Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	14.9 Persen	14.9 Persen							
						Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0.31 Persen	0.31 Persen							
									2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	650 Pelaku usaha mikro	650 Pelaku usaha mikro			
									2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan Usaha Mikro	2000 Pelaku usaha mikro	2000 Pelaku usaha mikro			
									2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	125 Unit Usaha	125 Unit Usaha			
									2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	20 Orang	20 Orang	Kab. Banjar		
									2.17.07.2.01.06 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	60 Orang	60 Orang			
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang meningkat Omzetnya	18.70 Persen	18.70 Persen	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pemasaran produknya	3.99 Persen	3.99 Persen	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	255 Unit Usaha	255 Unit Usaha	Kab. Banjar		
						Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan Produksi dan Pengolahan	0.56 Persen	0.56 Persen							
						Persentase usaha mikro yang mendapatkan HAKI	4.07 %	4.07 %							
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	74.00	74.00	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	24 dokumen	24 dokumen	2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
									2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar		
									2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota		

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah		
								RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kab. Banjar		
								2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar		
								2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Banjar		
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 Persen	100 Persen	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								2.18.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Banjar		
								2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76 Dokumen	76 Dokumen	Kab. Banjar		
								2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar		
								2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar		
				2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100 Persen	100 Persen	2.18.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar		
								2.18.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar		
								2.18.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar		
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	8 orang	8 orang	2.18.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	Kab. Banjar		
								2.18.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya penyelenggaraan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Banjar		
								2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Banjar		
								2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar		
								2.18.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								2.18.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar		
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100 persen	100 persen	2.18.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	202 Unit	202 Unit	Kab. Banjar		
								2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Banjar		
								2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Banjar		
								2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100 persen	100 persen	2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	10 Unit	10 Unit	Kab. Banjar	
									2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	Kab. Banjar	
									2.18.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	91 Unit	91 Unit	Kab. Banjar	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian regulasi kemudahan berinvestasi	20 Persen	20 Persen	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perda kemudahan berinvestasi	1 Dokumen	1 Dokumen	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru	13 Investor	13 Investor	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor yang mengenal Kabupaten Banjar	75 Investor	75 Investor	2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9 Dokumen	9 Dokumen	Kab. Banjar	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 Persen	100 Persen	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perizinan berusaha dan non perizinan yang diterbitkan	100 Persen	100 Persen	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	276 Pelaku Usaha	276 Pelaku Usaha	Kab. Banjar	
									2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	552 Kegiatan Usaha	552 Kegiatan Usaha	Kab. Banjar	
									2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Pelayanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	33 Orang	33 Orang	Kab. Banjar	
									2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	15 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	Kab. Banjar	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase LKPM	100 Persen	100 Persen	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memahami peraturan perundang-undangan LKPM	100 Persen	100 Persen	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	85 Kegiatan Usaha	85 Kegiatan Usaha	Kab. Banjar	
									2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	60 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	Kab. Banjar	
									2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	60 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha	Kab. Banjar	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan sistem perizinan yang mudah diakses	100 Persen		2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sistem perizinan yang terintegrasi	75 Persen	75 Persen	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Diteliti dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Diteliti dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	74,00	74,00	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Banjar	
									2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	20 Laporan	Kab. Banjar	
					2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan	100 Persen	100 Persen	2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									2.19.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	56 Dokumen	56 Dokumen	Kab. Banjar	
									2.19.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56 Dokumen	56 Dokumen	Kab. Banjar	
									2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
					2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perangkat daerah	100 persen	100 persen	2.19.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
					2.19.01.2.06 Administrasi Umum	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Paket	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
								2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen			
								2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	60 Orang	60 Orang			
								2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen			
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI Persentase Perangkat Daerah yang telah mendapat layanan keamanan informasi	180 Indeks 6.38 persen	180 Indeks 6.38 persen	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen dan laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah	100 persen 100 persen	2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen			
								2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan			
								2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan			
								2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah			
					2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	100 persen 100 persen	2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah			
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya tak benda kabupaten sebagai budaya tak benda nasional	55,56 %	55,56 %	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase budaya yang dikelola dalam sistem regnas WBTB	55,56 %	55,56 %	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	1 Objek		
					2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kelompok Kesenian yang dibina	81,25 Persen	81,25 Persen	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8 Objek	8 Objek		
								2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	1 Laporan			
					2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pelaku budaya yang memperoleh manfaat sarana kebudayaan	1 kelompok	1 kelompok	2.22.02.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	10 Unit	10 Unit	Kab. Banjar	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase topik sejarah yang informasinya akan disebarluaskan	40,00 %	40,00 %	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga masyarakat yang memahami sejarah lokal banjar	40 orang	40 orang	2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	40 Orang	40 Orang		
								2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen			
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase warisan budaya benda yang telah ditetapkan dan dilestarikan sebagai cagar budaya	65,00 %	65,00 %	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase warisan budaya benda yang diproses SK Penetapannya sebagai cagar budaya	65 persen	65 persen	2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	1 Objek		
					2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	36 unit	36 unit	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	24 Objek	24 Objek		
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar	74 persen	74 persen	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun Dengan Baik	100 Persen	100 Persen	2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								2.23.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar		
								2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	22 Laporan	Kab. Banjar		
					2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								2.23.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Banjar		
								2.23.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Banjar		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.23.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar		
				2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD yang Terpenuhi	100 Persen	100 Persen	2.23.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	4 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Banjar		
								2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Banjar		
								2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	11 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2.23.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Kab. Banjar		
								2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	7 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								2.23.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	9 Unit	Kab. Banjar		
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar		
								2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar		
								2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	Kab. Banjar		
								2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	39 Unit	Kab. Banjar		
								2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Kab. Banjar		
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan	82.40 . 82.40 .	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	28850 Orang	28850 Orang	2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	1 Layanan	Kab. Banjar		
		Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk	9.52 Persen					2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	2 Layanan	2 Layanan	Kab. Banjar		
								2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2109 Eksemplar	2109 Eksemplar	Kab. Banjar		
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	13 Kegiatan	13 Kegiatan	2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Keagaman Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	31 Lokus	31 Lokus	Kab. Banjar		
								2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	Kab. Banjar		
								2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kejadiannya	1 Orang	1 Orang	Kab. Banjar		
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Bahan Pustaka yang dilestarikan	99.17 Persen	2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Etnis Nusantara	350 Eksemplar	350 Eksemplar	2.23.03.2.02.01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	Kab. Banjar		
								2.23.03.2.02.02 Pengolahan dan Penyajian Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyajian	100 Eksemplar	100 Eksemplar	Kab. Banjar		
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.95 . 84.95 .	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip	Persentase Terlaksananya	100 Persen	100 Persen	2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang	53500 Berkas	53500 Berkas	Kab. Banjar		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	54422 Ton	54422 Ton	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	5 Kelompok	Kab. Banjar	
									3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	10 Kelompok	Kab. Banjar	
					3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	3.25.04.2.03.02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	Kab. Banjar	
					3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 %	100 %	3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	53 Unit	53 Unit	Kab. Banjar	
									3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
									3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100 Orang	100 Orang	Kab. Banjar	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Di Bidang Perikanan	71 %	71 %	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap dan Budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	3.25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Banjar	
									3.25.05.2.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Banjar	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	61,02 kg/kapita/tahun	61,02 kg/kapita/tahun	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
		Persentase Pertumbuhan Ekspor Produksi Perikanan	8 %	8 %	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Perizinan Masyarakat Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Sesuai Skala Usaha dan Risiko	150 Unit	150 Unit	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Perizinan Masyarakat Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	150 Unit	150 Unit	Kab. Banjar	
					3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32 Ton	32 Ton	3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32 Ton	32 Ton	Kab. Banjar	
									3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	22 Pelaku Usaha	22 Pelaku Usaha	Kab. Banjar	
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase destinasi wisata yang representatif	48,00 %	48,00 %	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Prosentase Daya Tarik / Atraksi Wisata Yang di berkembang	50 %	50 %	3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	7 Lokasi	7 Lokasi	Kab. Banjar	
									3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Banjar	
					3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Prosentase destinasi wisata dengan aksesibilitas yang memadai	9,7 Persen	9,7 Persen	3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8 Unit	8 Unit	Kab. Banjar	
						Prosentase Ketersediaan Amenitas	47,37 Persen	47,37 Persen	3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
					3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	prosentase rekomendasi TDUP yang diterbitkan	100 Persen	100 Persen	3.26.02.2.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase destinasi wisata yang telah dipasarkan	9 %	9 %	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung media promosi pariwisata melalui web dan medsos	100000 orang	100000 orang	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Banjar	
									3.26.03.2.01.02 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Banjar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota							
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif	10 % 10 %	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang meningkatkan kapasitasnya di sektor ekonomi kreatif	154 orang 154 orang	3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1 Orang 1 Orang			Kab. Banjar		
							3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	90 Orang 90 Orang			Kab. Banjar		
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Item (IKKI)	74 Indeks 74 Indeks	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 % 100 %	3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen 9 Dokumen			Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
							3.27.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan 3 Laporan			Kab. Banjar		
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 % 100 %	3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan 3276 Orang/bulan			Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
							3.27.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan 1 Laporan			Kab. Banjar		
				3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100 % 100 %	3.27.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang 2 Orang			Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100 % 100 %	3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket 2 Paket			Kab. Banjar		
							3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket 2 Paket			Kab. Banjar		
							3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan 12 Laporan			Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100 % 100 %	3.27.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit 0 Unit			Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
							3.27.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
							3.27.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit 13 Unit			Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100 % 100 %	3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan 12 Laporan			Kab. Banjar		
							3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan 13 Laporan			Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100 % 100 %	3.27.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit 0 Unit			Kab. Banjar		
							3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit 17 Unit			Kab. Banjar		
							3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit 23 Unit			Kab. Banjar		
							3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit 4 Unit			Kab. Banjar		
							3.27.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit 0 Unit			Kab. Banjar		
							3.27.01.2.09.11 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit 0 Unit			Kab. Banjar		
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase luas lahan pertanian yang didukung sarana pertanian yang berkualitas	1.08 %	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	100 % 100 %	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5 Laporan 1 Laporan			Kab. Banjar		
		Persentase pertumbuhan populasi ternak besar	2.60 %											
		Persentase pertumbuhan produktivitas tanaman perkebunan unggulan	0.09 %											
							3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 Laporan 5 Laporan			Kab. Banjar		
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas SDG Hewan/tanaman	100 % 100 %	3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	6000 VUB 6300 VUB			Kab. Banjar		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
				Kewenangan Kabupaten/Kota										
							3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Banjar		
							3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Banjar		
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengawasan Bahan pakan /Bibit hijauan pakan ternak yang beredar	100 % 100 %	3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	0 Laporan				
							3.27.02.2.03.02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Banjar		
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan produksi benih/ bibit ternak dan HPT, bahan pakan / ternak	100 % 100 %	3.27.02.2.05.01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	0 Ekor	0 Ekor				
							3.27.02.2.05.02 Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	0 Dokumen	0 Dokumen				
							3.27.02.2.05.06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	2 Laporan	2 Laporan		Kab. Banjar		
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase luas lahan yang mendapatkan fasilitas prasarana pertanian	11,79 %	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Data lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tertuang dalam peta	1 Dokumen	3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	4 Dokumen	0 Dokumen				
		Persentase luas perkebunan yang mendapatkan fasilitas prasarana perkebunan	100 %				3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	2 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Banjar		
							3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	2 Dokumen	0 Dokumen				
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Terpenuhinya pembangunan prasarana pertanian yang handal dan mantap	0,17 %	3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	0 Unit	0 Unit				
							3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	0 Unit				
							3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	0 Unit				
							3.27.03.2.02.04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0 Unit				
							3.27.03.2.02.05 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0 Unit				
							3.27.03.2.02.06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	0 Unit				
							3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit		Kab. Banjar		
							3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				
							3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit		Kab. Banjar		
				3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	3.27.03.2.03.01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	2 Laporan	2 Laporan		Kab. Banjar		
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Jenis Produk Olahan yang dikembangkan	20 %	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase menurunnya angka kematian ternak besar	0,32 % 0,32 %	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	8 Laporan	1 Laporan		Kab. Banjar		
		Persentase Menurunnya Angka Mortalitas Ternak Besar	0,32 % 0,32 %											
		Persentase produk asal hewan yang layak dikonsumsi	76 % 76 %											
							3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	0 Laporan				
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak Besar yang dipotong di RPH Jumlah Ternak Unggas yang dipotong di RPU	3100 ekor 2000 ekor 130000 Ekor 120000 Ekor	3.27.04.2.02.01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	12 Laporan	0 Laporan				
							3.27.04.2.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Banjar		

No	Program		3.30.02.2.02	Kegiatan	100 % 100 %	3.30.02.2.02.01	Sub Kegiatan	4 Dokumen 4 Dokumen	Kab.		
	Indikator Kinerja		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kegiatan	Indikator Kinerja	Tanda Daftar Gudang	Indikator Kinerja				
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Sebelum	Sesudah	3.30.02.2.03	Sub Kegiatan	4 Dokumen 4 Dokumen	Kab.		
			3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri yang dikeluarkan tepat waktu	100 % 100 %	3.30.02.2.03.01	Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Banjar		
			3.30.02.2.03.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		3.30.02.2.03.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Banjar		
			3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Lanjutan Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	100 % 100 %	3.30.02.2.04.01	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Banjar		
			3.30.02.2.04.02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri		3.30.02.2.04.02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Banjar		
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang representatif	18,75 % 18,75 %	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 sarana 3 sarana	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit 3 Unit	Kab. Banjar	
							3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit 1 Unit	Kab. Banjar	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	9,00 % 9,00 %	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 % 100 %	3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan 4 Laporan	Kab. Banjar	
			3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	12 Laporan 12 Laporan	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan 12 Laporan	Kab. Banjar		
							3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan 12 Laporan	Kab. Banjar	
							3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan 12 Laporan	Kab. Banjar	
			3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan 12 Laporan	Kab. Banjar		
	3.30.05 PROGRAM PENGUNCIAN DAN PEMASARAN EKSPOR	PERSENTASE PRODUK UNGGULAN DAERAH YANG DIKEMBANGKAN	100 % 100 %	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	5 Pelaku Usaha 5 Pelaku Usaha	Kab. Banjar	
							3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	1 Pelaku Usaha 1 Pelaku Usaha	Kab. Banjar	
							3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha 5 Pelaku Usaha	Kab. Banjar	
							3.30.05.2.01.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha 5 Pelaku Usaha	Kab. Banjar	
							3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	5 Produk 5 Produk	Kab. Banjar	
							3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	5 Pelaku Usaha 5 Pelaku Usaha	Kab. Banjar	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tertib Ukur	33 % 33 %	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	19 % 19 %	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	3220 Unit 3220 Unit	Kab. Banjar	
							3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	0 Orang 0 Orang	Kab. Banjar	
							3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	551 Orang 551 Orang	Kab. Banjar	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PRODUK DAERAH YANG DIPROMOSIKAN	100 % 100 %	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100 % 100 %	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	5 UMKM 5 UMKM	Kab. Banjar	
							3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Melalui Kemitraan dengan Retail,	5 UMKM 5 UMKM	Kab. Banjar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi						
							3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen				
							3.30.07.2.01.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	5 Orang	5 Orang			Kab. Banjar	
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri (%)	92.37 % 92.37 %	3.31.02.2.01 Penusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang di bina/ fasilitas (%)	100 % 100 %	3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Banjar	
							3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Banjar	
							3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Banjar	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Memiliki Izin	100 % 100 %	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin yang dikeluarkan tepat waktu	100 % 100 %	3.31.03.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Banjar	
							3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Banjar	
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (berdasarkan permendagri 18 2020)	95 % 95 %	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah di kab/kota yg masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah di kab/kota	95 % 95 %	3.31.04.2.01.01 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Banjar	
							3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Banjar	
							3.31.04.2.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Banjar	
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														
	3.32.04 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pengembangan Kawasan Ex.Transmigrasi	21.05 % 21.05 %	3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	2 Kawasan Wilayah 2 Kawasan Wilayah	3.32.04.2.01.01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	16 Kepala Keluarga	80 Kepala Keluarga			Kab. Banjar	
							3.32.04.2.01.02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman			Kab. Banjar	
4.01 SEKRETARIAT DAERAH														
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (KKI)	85 Nilai 85 Nilai	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Bagian yang Berkinerja Baik	100 Persen 100 Persen	4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	13 Dokumen			Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
							4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Banjar	
							4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 Laporan	29 Laporan			Kab. Banjar	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang Tertib Administrasi	100 Persen 100 Persen	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang	117 Orang			Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
							4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Banjar	
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Persen 100 Persen	4.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang			Kab. Banjar	

No	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
			Sebelum				Setelah			Sebelum			Setelah	Keluaran Kegiatan	Sebelum	Setelah
				4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah Terlayani	100 Persen	100 Persen	4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan	15 Orang	15 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Banjar				
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlayani	100 Persen	100 Persen	4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar				
								4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar				
								4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar				
								4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar				
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen	4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Banjar				
								4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Banjar				
								4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Banjar				
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen	4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Banjar				
								4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar				
								4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Banjar				
								4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar				
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	Kab. Banjar				
								4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	109 Unit	109 Unit	Kab. Banjar				
								4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	Kab. Banjar				
								4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	Kab. Banjar				
								4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	Kab. Banjar				
								4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	250 Unit	250 Unit	Kab. Banjar				
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase enyediaan dan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang sesuai ketentuan Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang sesuai ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Per Bulan	2 Orang/Per Bulan	Kab. Banjar				
								4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	Kab. Banjar				
								4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7 Orang	7 Orang	Kab. Banjar				
								4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Per Bulan	2 Orang/Per Bulan	Kab. Banjar				
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan KDH yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan WKDH yang Sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen	4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	Kab. Banjar				
								4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Kab. Banjar				
								4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	Kab. Banjar				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Kab. Banjar Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Sebelum	Tertarget	Setelah		Jabatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah								Sebelum			Sesudah
					4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase PD Pengelolaan RB Bernilai Baik	100 Persen	100 Persen	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	4 Dokumen			
						Persentase PD SAKI Kegiatan Keluaran	Bernilai	Tertarget	400 Persen						
						Persentase PD yang Publik Bernilai Baik	100 Persen	100 Persen							
						Persentase Penataan Organisasi	100 Persen	100 Persen							
						Persentase Pengelolaan Tatalaksana	100 Persen	100 Persen							
						Tingkat Efisiensi Unit dan Prestasi Kerja Unit Kabupaten Banjar Bernilai Baik	1.3 Nilai	1.3 Nilai							
									4.01.01.2.13.02 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Laporan	6 Laporan		Kab. Banjar	
									4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7 Dokumen	7 Dokumen		Kab. Banjar	
					4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Keprotokolan kepada Pimpinan	100 Persen	100 Persen	4.01.01.2.14.01 Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Banjar	
						Persentase Fasilitas Komunikasi Pimpinan	100 Persen	100 Persen							
						Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100 Persen	100 Persen							
									4.01.01.2.14.02 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Banjar	
									4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Banjar	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	3.1110 Nilai	3.1110 Nilai	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Fasilitas, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 Persen	100 Persen	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	4 Dokumen		Kab. Banjar	
						Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100 Persen	100 Persen							
						Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan	100 Persen	100 Persen							
									4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	4 Dokumen		Kab. Banjar	
									4.01.02.2.01.03 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen		Kab. Banjar	
					4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitas dan Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen	4.01.02.2.02.01 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	8 Dokumen		Kab. Banjar	
						Persentase Fasilitas dan Koordinasi di Bidang Bina Mental dan Spiritual Keagamaan	100 Persen	100 Persen							
						Persentase Fasilitas dan Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen							
									4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	3 Dokumen		Kab. Banjar	
									4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantbum Linmas	4 Dokumen	4 Dokumen		Kab. Banjar	
					4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	100 Persen	100 Persen	4.01.02.2.03.01 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen	550 Dokumen		Kab. Banjar	
						Persentase Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100 Persen	100 Persen							
						Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	100 Persen	100 Persen							
									4.01.02.2.03.02 Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	5 Kasus	5 Kasus		Kab. Banjar	
									4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	500 Dokumen		Kab. Banjar	
					4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah Dengan Pihak Terkait yang Ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	4.01.02.2.04.01 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Banjar	
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100 Persen	100 Persen	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitas dan koordinasi kebijakan lingkup urusan perekonomian	100 Persen	100 Persen	4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Banjar	
									4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan		Kab. Banjar	
					4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan	100 Persen	100 Persen	4.01.03.2.02.01 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		Kab. Banjar	
									4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan		Kab. Banjar	
									4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan		Kab. Banjar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik	40 Persen	40 Persen	4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Banjar		
								4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Banjar		
								4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	68 Orang	68 Orang	Kab. Banjar		
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan kebijakan Sumber daya alam	98 Laporan	98 Laporan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar		
								4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	94 Dokumen	94 Dokumen	Kab. Banjar		
4.02 SEKRETARIAT DPRD														
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	75 persen	75 persen	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun	100 persen	100 persen	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32 Dokumen	32 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
					4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat Daerah	100 persen	100 persen	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		Kab. Banjar		
								4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Banjar		
								4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan		Kab. Banjar		
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	100 persen	100 persen	4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		Kab. Banjar		
								4.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	825 Orang		Kab. Banjar		
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100 persen	100 persen	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		Kab. Banjar		
								4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		Kab. Banjar		
								4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen		Kab. Banjar		
								4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah yang tersedia	100 persen	100 persen	4.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pelayanan perkantoran	100 persen	100 persen	4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik, dan internet	12 bulan	12 bulan	Kab. Banjar		
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	100 persen	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		Kab. Banjar		
								4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		Kab. Banjar		
								4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		Kab. Banjar		
								4.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kab. Banjar		
				4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi bimtek/ workshop/ kunker/ konsultasi yang diikuti oleh anggota DPRD	100 persen	100 persen	4.02.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		Kab. Banjar		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					Persentase pelayanan kegiatan keprotokol	100 persen	100 persen							
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 persen	100 persen	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	Kab. Banjar		
								4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket		Kab. Banjar		
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	100 persen	100 persen	4.02.01.2.16.03 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rapat konsultasi dan koordinasi DPRD yang terfasilitasi	12 bulan	12 bulan	Kab. Banjar		
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan rese	100 persen	100 persen	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi penyusunan dan pembahasan program pembentukan Perda	100 persen	100 persen	4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	Kab. Banjar		
		Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas	100 persen	100 persen										
								4.02.02.2.01.04 Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen				
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase fasilitasi rese yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	100 persen	100 persen	4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	60 Dokumen	60 Dokumen	Kab. Banjar		
								4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen			
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD	100 persen	100 persen	4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Banjar		
								4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24 Dokumen		Kab. Banjar		
								4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen		Kab. Banjar		
5.01 PERENCANAAN														
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (KKI)	90 INDEKS	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Tersusun	100 %	100 %	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar		
								5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar		
								5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Banjar		
								5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	17 Laporan	Kab. Banjar		
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	546 Orang/bulan	546 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	50 Dokumen	Kab. Banjar		
								5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar		
								5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	Kab. Banjar		
				5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Banjar		
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	12 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terfasilitasi	100 %	100 %	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Banjar		

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
								5.01.01.2.06.05 Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Banjar		
								5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terfasilitasi	100 %	100 %	5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	59 Unit	124 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								5.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar		
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terfasilitasi	100 %	100 %	5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar		
								5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar		
								5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terfasilitasi	100 %	100 %	5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar		
								5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit	Kab. Banjar		
								5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar		
								5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	85 Unit	85 Unit	Kab. Banjar		
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH YANG TEPAT WAKTU	100 %	100 %	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Perencanaan Tepat Waktu	100 %	100 %	5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	2 Berita Acara	Kab. Banjar	
		PERSENTASE PERENCANAAN DAERAH YANG SELARAS	100 %	100 %										
								5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Kab. Banjar		
								5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Kab. Banjar		
								5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Banjar		
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data Pembangunan Daerah yang Dimutakhirkan	100 %	100 %	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	45 Masukan	45 Masukan	Kab. Banjar		
								5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	7500 Orang	384 Orang	Kab. Banjar		
								5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	Kab. Banjar		
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian Kinerja program prioritas RPJMD diatas 80% Persentase SKPD dengan nilai evaluasi kinerja baik	100 %	100 %	5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	11 Laporan	11 Laporan	Kab. Banjar		
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	77	INDEKS	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar	
									Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen	0 Dokumen			
								5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Terverifikasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	58 Dokumen	58 Dokumen	Kab. Banjar		
									29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah				
								5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Banjar		
									29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja							
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah					
								5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen		Kab. Banjar				
								5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Terverifikasi Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	Kab. Banjar			
								5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan	0 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	Kab. Banjar	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra SKPD Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		100 %	100 %	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen		Kab. Banjar			
								5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Terverifikasi Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	8 Dokumen	8 Dokumen	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	Kab. Banjar			
								5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	Kab. Banjar			
								5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen		Kab. Banjar				
								5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Terverifikasi Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	Kab. Banjar			
								5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Laporan	4 Laporan	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	Kab. Banjar			
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Infrastruktur dan Wilayah		100 %	100 %	5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen		Kab. Banjar			
								5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Terverifikasi Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 Dokumen	6 Dokumen	0 Laporan	0 Laporan	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	Kab. Banjar	
								5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	Kab. Banjar			
								5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen		Kab. Banjar				
								5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Terverifikasi	6 Dokumen	6 Dokumen		Kab. Banjar				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah			
								5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0 Laporan	0 Laporan	Kab. Banjar		
									Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	4 Laporan			
									Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah			
5.02 KEUANGAN														
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKK)	74 Persen	74 Persen	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	100 Persen	100 Persen	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
									5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
									5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Banjar	
									5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	19 Laporan	Kab. Banjar	
					5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100 Persen	100 Persen	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Banjar	
									5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Banjar	
									5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	Kab. Banjar	
					5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100 Persen	100 Persen	5.02.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
									5.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Banjar	
									5.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
					5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100 Persen	100 Persen	5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
					5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100 Persen	100 Persen	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Banjar	
									5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Banjar	
									5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
					5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang	100 Persen	100 Persen	5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	49 Unit	49 Unit	Kab. Banjar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksana sesuai dengan ketentuan									
								5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 13 Unit 79 Unit			Kab. Banjar		
				5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100 Persen	100 Persen	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	Kab. Banjar	
								5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
				5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100 Persen	100 Persen	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar	
								5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	57 Unit	Kab. Banjar		
								5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	131 Unit	131 Unit	Kab. Banjar		
								5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit	Kab. Banjar		
								5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	Kab. Banjar		
								5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Kab. Banjar		
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase capaian Dana Transfer	98.00 Persen	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	100 Persen	100 Persen	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar	
		Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	87.03 Persen												
		Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik	98.00 Persen												
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik	90.73 Persen												
								5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar		
								5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	96 Dokumen	96 Dokumen	Kab. Banjar		
								5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Banjar		
								5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Banjar		
								5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar		
								5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar		
				5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	100 Persen	100 Persen	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	372 Dokumen	372 Dokumen	Kab. Banjar	
								5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	277 Dokumen	277 Dokumen	Kab. Banjar		
								5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	72 Laporan	72 Laporan	Kab. Banjar		
								5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	47 Orang	47 Orang	Kab. Banjar		
				5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup)	100 Persen	100 Persen	5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pendapatan, Belanja,	189 Dokumen	189 Dokumen	Kab. Banjar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					Pelaporan Keuangan Daerah	pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan								
									5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	18 Laporan	Kab. Banjar	
									5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Banjar	
									5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar	
									5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
					5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian SPP dan SPM yang diajukan oleh PD	100 Persen	100 Persen	5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100 Laporan	100 Laporan	Kab. Banjar	
					5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian SPP SPM Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100 Persen	100 Persen	5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	54 Dokumen	54 Dokumen	Kab. Banjar	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib	88.88 Persen		5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	94 Persen	94 Persen	5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
									5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
									5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
									5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
									5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
									5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
									5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
									5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	25 Dokumen	25 Dokumen	Kab. Banjar	
									5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	96.00 Persen		5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	95 Persen	95 Persen	5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar	
						Persentase peningkatan pajak daerah	4 Persen	4 Persen	5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar	
						Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh	70 Persen	70 Persen	5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Banjar	
									5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit		Semua Kab/Kota	
									5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah objek pajak daerah per jenis pajak yang terdata dan terdaftar	10 Laporan	10 Laporan	Kab. Banjar	
									5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Banjar	
									5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	8300 Dokumen	8300 Dokumen	Kab. Banjar	
									5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Banjar	

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum		Sesudah			Sebelum	Sesudah
							5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (11 jenis layanan pajak daerah)	11 Layanan	11 Layanan	Kab. Banjar				
							5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	16 Dokumen	16 Dokumen	Kab. Banjar				
							5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	Kab. Banjar				
							5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar				
							5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar				
							5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Banjar				
5.03 KEPEGAWAIAN															
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern	74 Indeks	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 Persen	100 Persen	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
								5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar			
								5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
								5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar			
								5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
								5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3 Laporan	Kab. Banjar			
								5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	17 Laporan	Kab. Banjar			
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Tersusunnya laporan keuangan BKPSDM	100 Persen	100 Persen	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	52 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
								5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50 Dokumen	Kab. Banjar			
								5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar			
								5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	Kab. Banjar			
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang	47 Orang	Kab. Banjar			
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya fasilitas kebutuhan perkantoran	100 Persen	100 Persen	5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
								5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
								5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Banjar			
								5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Banjar			
								5.03.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
								5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	100 Persen	5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar			
								5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar		
								5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	Kab. Banjar		
								5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	68 Unit	Kab. Banjar		
								5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	25 Unit	Kab. Banjar		
								5.03.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	Kab. Banjar		
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesional ASN pada dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin	42.10 Indeks	42.10 Indeks	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kepegawaian bidang Pengadaan, pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
								5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar		
								5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	300 Dokumen	300 Dokumen	Kab. Banjar		
								5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	Kab. Banjar		
								5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar		
								5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Banjar		
								5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Banjar		
					5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelayanan Administrasi bidang mutasi dan promosi tepat waktu	100 Persen	100 Persen	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	150 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar	
								5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	850 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar		
								5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	50 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Banjar		
					5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100 Persen	100 Persen	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	146 Orang	138 Orang	Kab. Banjar	
								5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar		
								5.03.02.2.03.03 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	Kab. Banjar		
								5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	3 Orang	3 Orang	Kab. Banjar		
								5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Banjar		
								5.03.02.2.03.07 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Banjar		
								5.03.02.2.03.08 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	452 Orang	452 Orang	Kab. Banjar		
								5.03.02.2.03.12 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar		
								5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	104 Orang	Kab. Banjar		
								5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	100 Orang	100 Orang	Kab. Banjar		
								5.03.02.2.03.15 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar		
					5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penyelesaian pelayanan kepegawaian bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	5.03.02.2.04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
								5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar		
								5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	500 Orang	150 Orang	Kab. Banjar		
								5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	12 Orang	50 Orang	Kab. Banjar		
								5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
									5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	20 Dokumen	15 Dokumen	Kab. Banjar		
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesional ASN pada dimensi Kompetensi	19.40	Indeks 19.40	Indeks	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis ASN	100 Persen	100 Persen	5.04.02.2.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
										5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	63 Orang	65 Orang	Kab. Banjar	
										5.04.02.2.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar	
						5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 Persen	100 Persen	5.04.02.2.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Banjar	
										5.04.02.2.02.05 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	5 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Banjar	
										5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Banjar	
										5.04.02.2.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE INOVASI YANG DITERAPKAN PERSENTASE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINDAKLANJUTI	100 %	100 %	100 %	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Sesuai Kebutuhan	100 %	100 %	5.05.02.2.01.04 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
										5.05.02.2.01.07 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
						5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Sesuai Kebutuhan	100 %	100 %	5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Banjar	
						5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pelaksanaan Inovasi Daerah	100 %		5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH															
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKK) Inspektorat Daerah	97	Indeks	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	36 Dokumen	36 Dokumen	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
										6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan	23 Laporan	Kab. Banjar	
						6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	15 dokumen	15 dokumen	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
										6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Banjar	
										6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
										6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	14 Laporan	14 Laporan	Kab. Banjar	

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum		Sesudah			Sebelum	Sesudah
				6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel	7 Dokumen	7 Dokumen	6.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar			
								6.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Banjar			
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	100 %	100 %	6.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Banjar			
								6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang	47 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100 %	100 %	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
								6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
								6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Banjar			
								6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Banjar			
								6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	36 Dokumen	Kab. Banjar			
								6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
								6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100 %	100 %	6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	3 Paket	Kab. Banjar			
								6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	12 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar			
								6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Banjar			
								6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar			
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100 %	100 %	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Banjar			
								6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	13 Unit	Kab. Banjar			
								6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	66 Unit	Kab. Banjar			
								6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	Kab. Banjar			
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (KKI)	74 Indeks	74 Indeks	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Desa Yang Mengimplementasikan Penggunaan Aplikasi Keuangan Desa Secara Menyeluruh	100 %	100 %	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20 Laporan	20 Laporan	Kab. Banjar		
						Persentase Peningkatan Nilai Kepatuhan Perangkat Daerah	80 %	74 %							
						Persentase Peningkatan Nilai Kinerja Utama Perangkat Daerah	80 %	74 %							
						Persentase Peningkatan Nilai Pelayanan Publik Perangkat Daerah	80 %	74 %							
								6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	30 Laporan	30 Laporan	Kab. Banjar			
								6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	25 Laporan	9 Laporan	Kab. Banjar			
								6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Banjar			
								6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	24 Laporan	24 Laporan	Kab. Banjar			
								6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Banjar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
					6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Sesuai SOP	100 %	100 %	6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	30 Laporan	Kab. Banjar			
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan APIP	4.25	Indeks 4.25	Indeks	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3 Level	3 Level	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47 perangkat daerah	47 perangkat daerah	Kab. Banjar		
									6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	47 perangkat daerah	10 perangkat daerah	Kab. Banjar			
									6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Kab. Banjar			
									6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	47 perangkat daerah	47 perangkat daerah	Kab. Banjar			
7.01 KECAMATAN																
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio	74,00	74,00		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Indek 85	Indek	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Astambul	74,00	74,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	34 Buah	34 Buah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen		
		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru	74,00	74,00			Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen		
		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Cintapuri Darussalam	74,00	74,00			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100 Persen	100 Persen			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		
		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	74,00	74,00			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100 %	100 %			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen		
		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Karang Intan	74,00	74,00			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100 persen	100 persen			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen		
		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura	74 Nilai	74 Nilai			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100 Persen	100 Persen							
		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat	74,00	74,00			Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	100							
		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Timur	74,00	74,00			Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100 persen	100 persen							
		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Mataraman	74,00	74,00			Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100 Persen	100 Persen							
		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Paramasan	74,00	74,00			Persentase Jumlah sub kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat yang tersusun	100 persen	100 persen							
		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sambung Makmur	74,00	74,00	74 indeks		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi SKPD	100 %	100 %							
		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat	74,00	74,00			Persentase Terpenuhinya Renunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen							
		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	74 Persen	74 Persen												
		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	74,00	74,00												
		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur	74,00	74,00												
		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Telaga Baurtung	74,00	74,00												
		Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan Perangkat Daerah	74 Nilai	74 Nilai												
		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan Sambung Makmur	72 indeks	72 indeks												
		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar	74 persen	74 persen												
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dokumen											
										7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar		
										7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
											Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	0 Dokumen	0 Dokumen			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 Persen	100 Persen		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan			
					Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan			
					Terpenuhinya Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/bulan	140 Orang/bulan			
					Terpenuhinya Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	14 Bulan	14 Bulan			
								7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Banjar		
									Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			
									Jumlah Dokumen penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
									Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen			
								7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 laporan	1 laporan	Kab. Banjar		
									Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
									Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2 Laporan			
									Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen			
									Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan			
					7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Indeks	85 Indeks	7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Monitoring ,evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
						Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 laporan	5 laporan		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan		
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan		
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan		
						Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan		
						Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100 persen	100 persen						
						Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	100						
						Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100 Persen	100 Persen						
						Persentase Jumlah Laporan Administrai Milik Daerah Pada Perangkat yang tersusun	100 persen	100 persen						
						Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100 persen	100 persen						
						Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100 Persen	100 Persen						
						Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah yang Tersusun	100 persen	100 persen						

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.																			
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja																							
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian																						
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah																					
					pada Perangkat Daerah Yang Tersusun Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tersusun Persentase jumlah sub kegiatan Administrasi BMD pada perangkat daerah yang tersusun umlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen																								
								7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	Kab. Banjar							
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Terpenuhi Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi Persentase Jumlah sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana Persentasi dokumen perencanaan penganggaran Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian SKPD	100 persen	100 persen	85 Indek	85 Indek	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	100 Pe	100 Pe	100 persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	Kab. Banjar			
								7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang	2 Orang	2 Orang	5 Orang	5 Orang										Semua Kab/Kota Kab. Banjar								
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	85 Indek	85 Indek	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25 Paket	25 Paket	3 Paket	3 Paket														Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
								7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	0 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	3 Paket	3 Paket	4 Paket	4 Paket	5 Paket	4 Paket										

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan			
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan			
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan			
					Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan			
					Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persen	100 Persen			
					Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persen	100 Persen			
					Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persentase	100 Persentase			
					Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100 Persen	100 Persen		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persen	100 Persen			
					Persentase Jumlah sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100 persen	100 persen		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persen	100 Persen			
					Persentase Jumlah Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat yang Terlaksana	100 Persen	100 Persen		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	100 %			
					Persentasi dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi SKPD	100 %	100 %		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persen	100 Persen			
					Terpeenuhnya Administrasi Kecamatan	100 Persen	100 Persen		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persen	100 Persen			
					Terpeenuhnya Persentase Administrasi Umum Perangkat Dae	100 Persen	100 Persen		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persen	100 Persen			
								7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	45 Paket			
								7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	10 paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar		
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	4 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket			
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			
								7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 paket	22 paket	Kab. Banjar		
									Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			
									Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			
									Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			
									Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			
									Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	4 Paket			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 22 Paket 22 Paket				
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 23 Paket 23 Paket				
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 25 Paket 25 Paket				
										Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 Bulan 12 Bulan				
								7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket			Kab. Banjar	
										Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket				
										Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket				
										Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket				
										Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 4 paket 4 paket				
										Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 4 Paket				
										Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket				
										Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket				
										Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan Rutin 12 Bulan 12 Bulan				
										Terlaksananya Pencetakan Laporan SKPD Kecamatan 15 Dokumen 15 Dokumen				
								7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi 100 Orang 100 Orang			Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
										Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 Laporan				
										Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan				
										Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan				
										Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 12 Laporan				
										Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan				
										Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 laporan 50 laporan				
										Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 Laporan 50 Laporan				
										Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 Orang 50 Orang				
								7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1 Laporan 1 Laporan			Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan				
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan				
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan				
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 3 Laporan				
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 4 Laporan				
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan				
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan				
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan 12 laporan				
										Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan				
										Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah/keluar daerah SKPD 12 Bulan 12 Bulan				
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 Indek 85 Indek			7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 1 Unit			Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit				
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit									
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit									
					Kelengkapan Jaringan Internet dan CCTV 1 SET 1 SET									
					Pengadaan Mebel 1 Unit 1 Unit									
					Persenatse Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana 100 Persen 100 Persen									
					Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen									
					Persentase Dokumen Perencanaan 100 Persen 100 Persen									

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					Penganggaran dan Evaluasi SKPD									
					Persentase Jumlah sub kegiatan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 persen	100 persen							
					persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100 persen	100 persen							
					Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100 persen	100 persen							
					Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100 Persen	100 Persen							
					Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100 Persentase	100 Persentase							
					Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah	100 Persen	100 Persen							
					Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100 persen	100 persen							
					Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100 Persen	100 Persen							
					persentasi dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi SKPD	100 %	100 %							
					Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen							
									7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit		
										Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		Kab. Banjar
										Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		
										Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit		
										Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5 Unit		
									7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Banjar
										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		
										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit		
										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit		
										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit		
										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit		
										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4 Unit		
										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	4 Unit		
										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit		
										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit		
										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	12 Unit		
										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit		
									7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		Kab. Banjar
					7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Indeks	85 Indeks	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Banjar
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan		
						Jumlah Persentase Sub Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100 persen	100 persen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan		
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan		
						Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan		
						Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		
						Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		
						Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan		
						Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen						
						Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen						
						Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen						
						Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	100 Persentase						

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					Pemerintah Daerah Persentase Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia Persentasi dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi SKPD Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan umlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Persen 100 % 100 Persen 10 Laporan 1 Laporan	100 Persen 100 % 100 Persen 10 Laporan 1 Laporan							
								7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	12 laporan 0 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 3 Laporan 11 Unit 12 Bulan 12 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	12 laporan 0 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 3 Laporan 11 Unit 12 Bulan 12 Laporan 12 Bulan		Kab. Banjar	
								7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan		Kab. Banjar	
								7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Tenaga Kontrak yang terbayar Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jumlah pelayanan umum kantor yang terpenuhi	12 Bulan 7 laporan 0 Laporan 1 Laporan 7 Laporan 8 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 12 Laporan 13 Laporan 36 Laporan 12 Bulan	12 Bulan 7 laporan 0 Laporan 1 Laporan 7 Laporan 8 Laporan 10 Laporan 12 Laporan 13 Laporan 36 Laporan 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan	85 Indeks 1 Unit 6 Unit 12 Unit 1 Unit 4 Unit 4 Jenis 100 Persen	85 Indeks 1 Unit 6 Unit 12 Unit 1 Unit 4 Unit 4 Jenis 100 Persen	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit 3 Unit 9 Unit 12 Unit	2 Unit 3 Unit 9 Unit 12 Unit	Kab. Banjar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
		masyarakat di Kecamatan			Perencanaan Pembangunan Desa				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	12 Lembaga	12 Lembaga			
		Persentase koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100 persen	100 persen	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana	100 Persen	100 Persen		Jumlah Sub Kegiatan Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga	2 Lembaga			
		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	100	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga	2 Lembaga			
		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 persen	100 persen	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100 Persen	100 Persen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga	2 Lembaga			
		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	Kinerja Persentase koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat di kecamatan	100 %	100 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 LKM	4 LKM			
		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	100	Persentase Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana		100 Persen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	5 Lembaga			
		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		100 persen	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu	100 persen	100 persen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 LPM	5 LPM			
		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	Persentase koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100 Persen	100 Persen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	6 Lembaga			
		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		100 Persen	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 persen	100 persen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 LKM	6 LKM			
		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 persen	100 persen	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	100 Persen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 LKM	6 LKM			
					Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	100 Persen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga	9 Lembaga			
					Persentase Koordinasi Masyarakat Desa yang Terlaksana	100 persen	100 persen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga	9 Lembaga			
					Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 persen	100 persen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga	12 Lembaga			
					Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga	13 Lembaga			
					Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100 Persen	100 Persen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21 Lembaga	21 Lembaga			
					Persentase terlaksananya pemberdayaan desa	100 Persen	100 Persen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26 Lembaga	26 Lembaga			
					Terlaksananya Musrembangdes dan musrembangkel yang tepat waktu, terlaksananya musrembangkec. yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen		Jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	6 LKM	6 LKM			
									Terlaksananya musrembang kecamatan yang tepat waktu	2 kegiatan	2 kegiatan			
									Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tepat waktu	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
									7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah fasilitasi TP PKK Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
										Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
										Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan		
										Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan		
										Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan		
										Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan		
										Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan		
										Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	5 Laporan		
										Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan		

No	Program			Kegiatan	Kegiatan			Sub Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja			Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah			
			Sebelum											Setelah
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan				
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah musrenbang kelurahan yang tepat waktu Jumlah Musrenbang Kelurahan yang tepat waktu jumlah musrenbang yang tepat waktu Kinerja persentase koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Tercapainya Kepuasan Masyarakat	1 kegiatan 1 Kegiatan 1 kegiatan 100 % 100 % 100 Persen 100 % 100 % 1 Tahun	1 kegiatan 1 Kegiatan 1 kegiatan 100 % 100 % 100 Persen 100 % 100 % 1 Tahun	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga 6 LEMBAGA 6 Lembaga 6 Lembaga 6 LKK	6 Lembaga 6 LEMBAGA 6 Lembaga 6 LKK	Kab. Banjar			
							7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit 2 Unit 3 Unit 0 Unit 5 Unit 7 Unit		Kab. Banjar		
							7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas		Kab. Banjar		
							7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		1 Laporan 4 Laporan	1 Laporan 4 Laporan	Kab. Banjar		
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100 Persen	100 Persen	7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		4 LKM	4 LKM	Kab. Banjar		
							7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar		
			7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100 Persen	100 Persen	7.01.03.2.06.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	Kab. Banjar		
							7.01.03.2.06.11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		1 Keluarga	1 Keluarga	Kab. Banjar		
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (KKI) Kecamatan Persentase koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas Persentase koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan	74 Nilai 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	74 Nilai 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	85 Indeks 1 Laporan 2 Laporan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 persen 100 persen	85 Indeks 1 Laporan 2 Laporan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 persen 100 persen	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hasil Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Kegiatan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 6 Laporan 9 Laporan	Kab. Banjar		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
	ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100 Persen	100 Persen		persentase koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakatdbdi kecamatan	100 %	100 %		Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan			100 Persen		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan		100 persen		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan			
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan			100 Persen		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100 %	100 %							
	Persentase penyelenggaraan Ketertarikan dan ketertiban umum di Kecamatan			100 Persen		Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen							
						Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100							
						Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	100 persen	100 persen							
						Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 Persen	100 Persen							
						Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 persen	100 persen							
						Persentase penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum di Kecamatan	100 Persen	100 Persen							
						Persentase Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Kecamatan		100 Persen							
						Persentase Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase							
						Persentase Penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban urusan di kecamatan	100 persen	100 persen							
						Persentase koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah yang terfasilitasi	100 persen	100 persen							
						Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi umlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100 Persen	100 Persen							
							1 Laporan	1 Laporan							
										7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	0 Laporan	Kab. Banjar	
											Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan		
											Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	1 Laporan		
											Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
											Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan		
											Jumlah Rakor FKUB yang Dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
					7.01.04.2.02	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Indeks	85 Indeks		7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Banjar	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan			Jumlah kegiatan Patroli Trantibum	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
						Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah yang Dilaksanakan	100 %	100 %			"Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia"	2 Laporan	2 Laporan		
						Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtimuinmas	100 Persen	100 Persen			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 Persen 100 Persen Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang terfasilitasi 100 Persen 100 Persen Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi 100 Persentase 100 Persentase Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada 100 persen 100 persen Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi 100 Persen 100 Persen Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi 100 % 100 % Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi 100 persen 100 persen Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi 100 Persen 100 Persen Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi 100 persen 100 persen Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen Persentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan 100 % 100 % Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi SKPD 100 persen 100 persen Persentase koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah yang terfasilitasi 100 Persen 100 Persen Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi umlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 Laporan 2 Laporan				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 Laporan 2 Laporan					
				7.01.04.7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan 100 Persen 100 Persen			7.01.04.7.03.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan			Kab. Banjar		
				7.01.04.7.04 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemenuh Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana 100 Persen 100 Persen			7.01.04.7.04.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 3 Laporan 3 Laporan			Kab. Banjar		
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKI) Kecamatan 74 Nilai 74 Nilai	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah 100 Persen 100 Persen	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat 85 Indek 85 Indek Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2 Dokumen 2 Dokumen Jumlah Kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen jumlah masyarakat yang mengikuti 100 % 100 % Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan 6 kegiatan 6 kegiatan			7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 kegiatan 1 kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 Orang 1 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 4 Orang 4 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam			Kab. Banjar		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.									
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja													
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian												
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah											
					penganggaran dan evaluasi SKPD Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa umlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen														
								7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah pengelolaan yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Banjar		
								7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	"Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa" Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa yang terlaksana	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	13 Dokumen	15 Kegiatan	15 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
								7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Banjar			
								7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa "Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa"	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Banjar			
								7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan	1 Dokumen	1 Dokumen									Kab. Banjar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								Perangkat Desa	Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			
								7.01.06.2.01.09 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar		
								7.01.06.2.01.10 Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar		
								7.01.06.2.01.14 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Banjar		
								7.01.06.2.01.15 Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar		
									Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	2 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	3 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8 Dokumen	4 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	11 Dokumen	13 Dokumen			
									Jumlah Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
								7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13 Laporan	13 Laporan	Kab. Banjar		
								7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Banjar		
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	74,00	74,00	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 persen	100 persen	8.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									8.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Banjar	
									8.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Banjar	
									8.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									8.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Banjar	
									8.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan	23 Laporan	Kab. Banjar	
					8.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	8.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									8.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Banjar	
									8.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Banjar	
									8.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Banjar	
					8.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	8.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Banjar	
									8.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase fasilitasi kegiatan P4GN dan FKUB yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase jumlah Kebijakan Teknik dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terlaksana	65 Persen	65 Persen	8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1200 Orang	1270 Orang	Kab. Banjar	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan konflik Sosial.	100 Persen	100 Persen	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	80 Persen	80 Persen	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	350 Orang	980 Orang	Kab. Banjar	
									8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Banjar	
									8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Banjar	